



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2025-2029



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-NYA, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk lima tahun ke depan yang diselaraskan secara komprehensif dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga merefleksikan komitmen Sekretariat Daerah dalam mendukung perwujudan visi Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata melalui pencapaian 12 sasaran strategis dan indikator kinerja.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ini berakar kuat pada amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, dokumen ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Lebih jauh, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mempertegas keselarasan penyusunan rencana strategis terhadap indikator utama pembangunan yang akan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, Sekretariat Daerah menetapkan 12 sasaran strategis dan indikator kinerja yang diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Sasaran ini diterjemahkan melalui serangkaian indikator kinerja yang mencakup dimensi struktural dan prosedural pemerintahan. Penguatan tata kelola dimulai dari aspek kelembagaan melalui indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan. Kemudian, sasaran diperluas pada aspek penyelenggaraan pelayanan publik melalui indikator Indeks Pelayanan Publik. Sasaran pun menargetkan peningkatan akuntabilitas kinerja melalui indikator Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan dan Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A. Selanjutnya, fokus juga diberikan pada implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang diukur melalui Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Terakhir, kualitas tata kelola juga menyentuh proses kebijakan publik yang ditunjukkan melalui indikator Nilai Kualitas Kebijakan Daerah.

Peningkatan kualitas kebijakan diarahkan tidak hanya dalam memperkuat fondasi dalam menciptakan regulasi yang berbasis data dan bukti namun juga dalam mendukung amanat pusat. Secara khusus Sekretariat Daerah diamanatkan untuk memastikan kebijakan berdampak terhadap peningkatan Proporsi Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi serta peningkatan kendali atas Tingkat Inflasi. Disamping itu juga penataan dan penguatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan melalui indikator BUMD Sehat.



E1FA443D9A

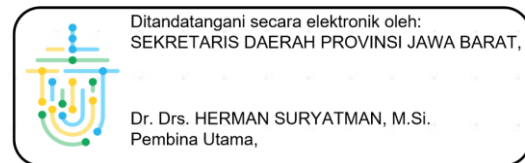
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja yang terperinci ini memberikan harapan bagi Sekretariat Daerah agar upaya penguatan tata kelola pemerintahan mampu menghasilkan dampak nyata pada perbaikan kinerja pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini diharapkan menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan kinerja di masa lalu dan mewujudkan visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh. Oleh karena itu, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 menjadi komitmen bersama antara seluruh entitas Sekretariat Daerah dan mitra terkait. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah pengabdian kita kepada masyarakat dan daerah.

Bandung, 15 September 2025

Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Barat,



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis.....	9
2.1. Kinerja Pelayanan.....	9
2.1.1. Struktur, Tugas, dan Fungsi	9
2.1.1.1 Struktur.....	9
2.1.1.2 Tugas dan Fungsi.....	10
2.1.2. Gambaran Sumber Daya.....	31
2.1.2.1 Gambaran Sumber Daya Manusia.....	31
2.1.2.2 Gambaran Sumber Daya Aset	34
2.1.2.3 Gambaran Sumber Daya Teknologi	36
2.1.3. Kinerja Pelayanan	39
2.1.3.1 Kinerja Utama.....	39
2.1.3.2 Kinerja Anggaran	50
2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci	54
2.1.3.4 Kelompok Sasaran	55
2.1.3.5 Dukungan BUMD.....	58
2.1.3.6 Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.....	60
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	61
2.2.1. Permasalahan	61
2.2.2. Isu Strategis.....	66
Bab 3 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi.....	71
3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	72
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi	86
3.3. Penahapan Renstra Setda.....	93
3.4. Manajemen Risiko Renstra Setda.....	94
Bab 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	101
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan	102
4.2. Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	137
4.3. Target Indikator Kinerja Kunci.....	144



E1FA443D9A



Bab 5 Penutup.....	145
5.1. Kesimpulan	145
5.2. Kaidah Pelaksanaan	146
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	147



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

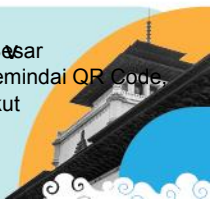


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Neraca Aset Sekretariat Daerah dalam 5 Tahun (dalam Rp000)	35
Tabel 2.2. Sistem Informasi Sekretariat Daerah.....	38
Tabel 2.3. Kinerja Utama Sekretariat Daerah Periode Renstra 2018-2023 dan Renstra 2024-2026	44
Tabel 2.4. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024	49
Tabel 2.5. Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024.....	51
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024	52
Tabel 2.7. Realisasi IKK Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024.....	54
Tabel 2.8. Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah	55
Tabel 2.9. Identifikasi Permasalahan Sekertariat Daerah.....	61
Tabel 2.10. Isu Strategis Sekretariat Daerah	69
Tabel 3.1. Acuan Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan Prioritas Nasional dan Indikator Utama Pembangunan (IUP).....	74
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra	85
Tabel 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Renstra	89
Tabel 3.4. Manajemen Risiko Renstra Sekretariat Daerah	96
Tabel 4.1. Target ‘Jumlah Produk Tersertifikasi Halal’.....	105
Tabel 4.2. Pagu Anggaran Sekretariat Daerah per Sasaran Renstra.....	109
Tabel 4.3. Rencana Alokasi Anggaran per Biro (dalam Rp000).....	110
Tabel 4.4. Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Kinerja, dan Indikasi Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030	112
Tabel 4.5. Dukungan Program Sekretariat Daerah terhadap Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat.....	138
Tabel 4.6. Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029	144



E1FA443D9A



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1. Rata-Rata Capaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024	1
Gambar	2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.....	10
Gambar	2.2. SDM Sekretariat Daerah berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Terakhir	31
Gambar	2.3. SDM Sekretariat Daerah berdasarkan Biro	34
Gambar	2.4. Aset Tetap Sekretariat Daerah (dalam Ha).....	36
Gambar	2.5. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024	40
Gambar	2.6. Pagu, Realisasi, dan Capaian Anggaran Setda Tahun 2020-2024	50
Gambar	2.7. Penyertaan Modal dan Dividen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024	59
Gambar	2.8. Status BUMD dalam Periode Tahun 2020-2024	60
Gambar	2.9. Kerja sama Daerah yang Didukung Setda	61
Gambar	3.1. Kerangka Penjabaran Sasaran Renstra	71
Gambar	3.2. Kerangka Pikir RPJMN Tahun 2025-2029.....	73
Gambar	3.3. Siklus Kebijakan Berbasis Bukti.....	93
Gambar	3.4. Penahapan Renstra Sekretariat Daerah	94
Gambar	4.1. Kerangka Penjabaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	101
Gambar	4.2. Komposisi Anggaran per Indikator Kinerja Utama dalam Enam Tahun (%).....	110
Gambar	4.3. Rencana Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah per Program.....	111



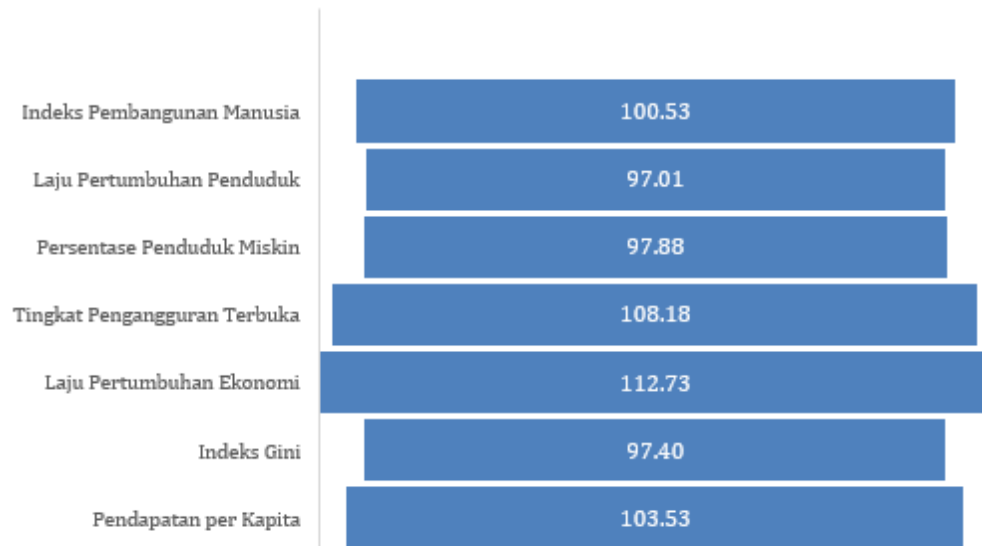
E1FA443D9A



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gambar 1.1. Rata-Rata Capaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024



Sumber: LKPJ Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 s.d. 2024, diolah.

Selama lima tahun terakhir, rata-rata kinerja penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang digambarkan melalui ketercapaian indikator kinerja makro memiliki tren yang positif di beberapa area. Progres kinerja positif terlihat pada pembangunan manusia, penurunan pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Fenomena ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada pada jalur yang benar dalam pembangunan SDM dan ekonomi. Namun kinerja kurang memuaskan dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kondisi ekonomi masyarakat yang terlihat dari ketercapaian penurunan persentase penduduk miskin dan Indeks Gini. Indikator ini memperlihatkan adanya kemungkinan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui program-program pembangunannya dalam kedua area tersebut kurang efektif.

Jika dilihat dari siklus kebijakan publik, penyebab ketidakefektifan kebijakan pembangunan dapat terjadi di setiap tahapan. Identifikasi akar masalah yang kurang tepat dalam tahapan perumusan kebijakan atau kesalahan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam program dalam tahapan implementasi kebijakan, dapat menjadi salah satu penyebabnya. Oleh sebab itu capaian kinerja pembangunan dapat



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

diwujudkan secara optimal dengan dukungan kebijakan yang dirumuskan secara tepat, implementasi yang dikendalikan secara akuntabel, rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, serta koordinasi yang dijalankan secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan kata lain capaian kinerja pembangunan adalah cerminan dari kualitas tata kelola kebijakan publik.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda) merupakan unit kerja utama dalam pengoordinasian perumusan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan umum daerah serta pengoordinasian kinerja perangkat daerah terutama yang mendukung pembangunan lintas sektor. Hal ini mengandung makna bahwa Setda memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola kebijakan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkualitas. Bahwa kapasitas Setda dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan secara efektif, memastikan kebijakan yang dihasilkan koheren, sinergis, dan terimplementasi secara terpadu. Peran ini juga berkorelasi dengan fungsi Setda sebagai unit kerja utama dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat sangat memuaskan. Atas dasar tersebut, sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan selaras dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, Setda melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (Renstra).

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Setda adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Setda dalam kurun waktu lima tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi Setda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung tercapainya visi 'Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata' serta 4 misi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Renstra Setda berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan rencana strategis tingkat daerah menjadi program dan kegiatan yang spesifik dan operasional di tingkat Setda. Melalui keterkaitan ini, tercipta keselarasan dan sinergi yang memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Setda Tahun 2025-2029 disusun dalam enam tahapan. Tahap pertama yaitu persiapan penyusunan dengan pembentukan tim penyusun serta agenda penyusunan. Tahap kedua adalah penyusunan Rancangan Awal yang memuat hasil identifikasi permasalahan melalui Diskusi Kelompok Terarah (DKT) bersama kelompok kepentingan baik internal maupun eksternal serta data dan informasi awal tentang isu terkini dan kinerja periode perencanaan sebelumnya. Tahap ketiga adalah penyusunan Rancangan Renstra



E1FA443D9A

Setda yang dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (FPD) untuk menginformasikan Renstra serta menerima masukan dari para pemangku kepentingan.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Akhir Renstra Setda Tahun 2025-2029. Pada tahapan ini telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan kelelasan serta pemuatan amanat-amanat pusat. Kemudian tahap terakhir atau tahap keenam yaitu penetapan dokumen Renstra Setda Tahun 2025-2029 sebagai pemastian legalisasi.

1.2. Dasar Hukum

Renstra Setda Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai acuan legal formal. Landasan hukum tersebut meliputi regulasi yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan daerah dan kewenangan Setda sebagai dasar penentuan program dan kegiatan, Regulasi yang mengatur tentang perencanaan pembangunan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sementara regulasi yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Selanjutnya, regulasi yang menjadi landasan hukum kelembagaan dan kewenangan Setda adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017. Secara spesifik diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jabar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 dan Nomor 7 Tahun 2025 menjadi rujukan dalam menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Setda Tahun 2025-2029. Sehingga rencana program dan kegiatan Renstra dipastikan direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis pembangunan Jawa Barat. Secara lebih detail, berikut peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Renstra Setda Tahun 2025-2029:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



E1FA443D9A

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Setda Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai peta jalan perencanaan kinerja Setda selama lima tahun dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian dokumen ini pun disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Di dalamnya termuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditargetkan untuk dicapai beserta dengan dukungan sumber daya dan penjabaran program-program teknis. Maka dari itu, Renstra Setda Tahun 2025-2029 bertujuan menjadi pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- c. Penentuan pagu anggaran per tahun;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja; serta
- e. Penyusunan pelaporan kinerja.



E1FA443D9A

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Setda Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas urgensi penyusunan Renstra Setda Tahun 2025-2029 serta gambaran umum terkait pokok bahasan yang dimuat

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat risalah tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Setda Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat uraian tentang maksud dan tujuan Renstra Setda Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Setda Tahun 2025-2029 serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Kinerja Pelayanan

Memuat informasi tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, gambaran sumber daya, tingkat capaian kinerja periode perencanaan tahun-tahun sebelumnya baik dari sisi kinerja maupun anggaran, kelompok sasaran, dukungan BUMD, dan pelaksanaan kerja sama daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis



E1FA443D9A

Memuat permasalahan-permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi serta isu-isu strategis pelayanan Setda yang diperoleh berdasarkan gambaran pelayanan sekretariat daerah, isu-isu daerah, maupun isu nasional dan global

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Memuat rumusan tujuan dan sasaran strategis Setda yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target untuk tahun 2025 s.d. 2029 dan tahun 2030 untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dalam masa transisi pembangunan jangka menengah selanjutnya

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Memuat rumusan pernyataan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Renstra

3.3. Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

Memuat tahapan rencana kinerja secara umum dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan

Memuat daftar program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, serta indikasi pendanaan tahun 2025 s.d. 2029 dan tahun 2030 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Setda.

4.2. Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah



E1FA443D9A

Memuat daftar program prioritas Setda baik yang menjadi penjabaran dari program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat maupun yang bersifat sektoral Setda.

4.3. Target Indikator Kinerja Kunci

Memuat target daftar indikator kinerja kunci yang menjadi tugas dan kewenangan Setda beserta target tahun 2025 s.d. 2029 dan tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan

BAB V PENUTUP



E1FA443D9A



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

2.1. Kinerja Pelayanan

2.1.1. Struktur, Tugas, dan Fungsi

2.1.1.1 Struktur

Setda merupakan salah satu unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Setda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022, susunan organisasi Setda terdiri dari sekretaris daerah, tiga asisten, sembilan biro, 12 bagian tata usaha, staf ahli, dan kelompok jabatan fungsional. Secara lebih rinci struktur tersebut terjabarkan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 - 2.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - 2.1.1. Bagian Tata Usaha
 - 2.2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 2.2.1. Bagian Tata Usaha
 - 2.3. Biro Kesejahteraan Rakyat
 - 2.3.1. Bagian Tata Usaha
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 3.1. Biro Perekonomian
 - 3.1.1. Bagian Tata Usaha
 - 3.2. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
 - 3.2.1. Bagian Tata Usaha
 - 3.3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3.3.1. Bagian Tata Usaha
4. Asisten Administrasi Umum
 - 4.1. Biro Organisasi
 - 4.1.1. Bagian Tata Usaha
 - 4.2. Biro Administrasi Pimpinan
 - 4.2.1. Bagian Tata Usaha
 - 4.2.2. Bagian Protokol
 - 4.3. Biro Umum
 - 4.3.1. Bagian Tata Usaha
 - 4.3.2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
 - 4.3.3. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Provinsi
5. Staf Ahli Gubernur
6. Kelompok Jabatan Fungsional

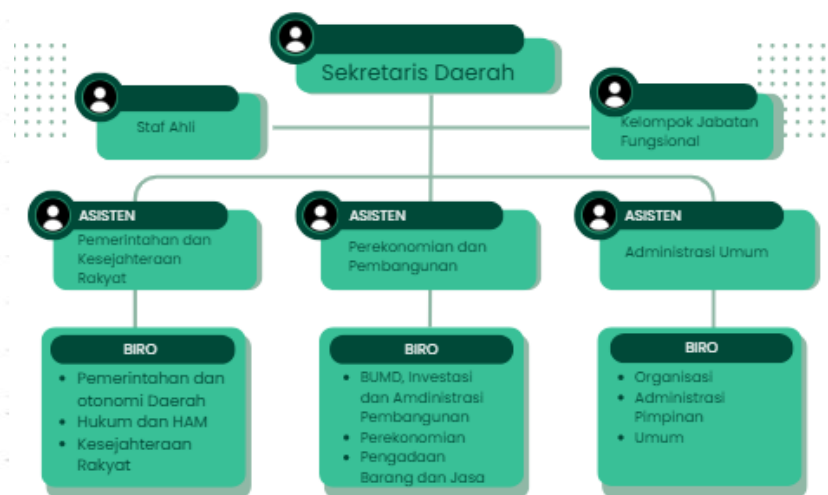
Selanjutnya, tata kerja Setda sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 adalah bahwa sekretaris daerah



E1FA443D9A

selaku pimpinan unit memimpin, mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya. Kemudian, setiap pelaporan yang diterima sekretaris daerah dari bawahannya, perlu diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut. Untuk itu, sekretaris daerah wajib mengadakan rapat berkala. Disamping itu dalam rangka pembinaan dan pengawasan setiap pejabat struktural harus melaksanakan Sistem Pengendalian Intern sesuai ketentuan dan dalam melaksanakan tugas Setda, kepala biro menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai kebutuhan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Setda



Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022

2.1.1.2 Tugas dan Fungsi

a. Sekretariat Daerah

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas lima elemen yaitu *strategic apex* (kepala daerah), *middle line* (sekretaris daerah), *operating core* (dinas daerah), *technostructure* (badan daerah), dan *supporting staff* (staf pendukung). Lalu ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa sekretariat daerah merupakan unsur staf. Berdasarkan regulasi tersebut, sekretaris daerah sebagai kepala sekretariat daerah merupakan *middle line* dan sekretariat daerah sebagai sebuah unit merupakan *supporting staff*.

Secara teori, elemen *middle line* merupakan lapisan organisasi yang menghubungkan *strategic apex* atau manajemen puncak (kepala daerah) dengan *operating core* atau dalam hal ini dinas



E1FA443D9A

teknis. Di dalam struktur organisasi, *middle line* bertanggung jawab dalam menerjemahkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh manajemen puncak ke tingkat operasional. Sehingga perannya adalah mengomunikasikan arahan strategis dari manajemen puncak kepada operasional dan umpan balik dari operasional ke manajemen puncak. Sementara itu, *supporting staff* merupakan lapisan organisasi yang menyediakan layanan pendukung untuk membantu organisasi berfungsi secara efektif dan efisien. Aktivitas *supporting staff* tidak berhubungan langsung dengan aktivitas utama operasional organisasi tetapi penting untuk mendukung fungsi organisasi secara keseluruhan.

Selanjutnya, peran *middle line* dan *supporting staff* tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tugas fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 yaitu bahwa tugas pokok sekretaris daerah adalah ‘merumuskan dan menetapkan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengoordinasian administratif, membina, mengawasi, mengendalikan, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas oleh perangkat daerah serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli gubernur’. Di dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi sekretariat daerah adalah:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah provinsi meliputi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum sebagai bahan penetapan kebijakan gubernur;
- 2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum lingkup sekretariat daerah provinsi;
- 3) Penyelenggaraan kepemimpinan manajemen pada sekretariat daerah provinsi;
- 4) Penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan administratif, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi oleh perangkat daerah; serta
- 5) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli gubernur.

Merujuk kepada peraturan gubernur di atas, di dalam menjalankan perannya, sekretaris daerah dibantu oleh unit yang menangani urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022, nomenklatur unit tersebut adalah ‘asisten’ yang



E1FA443D9A

membawahkan biro-biro. Masing-masing ‘asisten’ memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 yaitu:

1. Pasal 5 menyebutkan bahwa Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pokok ‘merumuskan, memonitor dan mengevaluasi kebijakan umum bidang pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat, serta kebijakan strategis program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi, melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian untuk memandu dan menyinergikan implementasinya oleh biro dan perangkat daerah lingkup tugasnya’. Adapun fungsinya adalah:
 - a) Penyelenggaraan perumusan, monitoring, dan evaluasi kebijakan umum lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Penyelenggaraan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitasi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administratif lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e) Penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis serta pemanduan dan penyinergian pelaksanaan program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; serta
 - f) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pasal 10 menyebutkan bahwa Asisten Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas pokok ‘merumuskan, monitoring dan evaluasi kebijakan umum bidang perekonomian, badan usaha milik daerah, investasi, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan strategis meliputi program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi, melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian untuk memandu dan menyinergikan pelaksanaan program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi oleh biro dan perangkat daerah dalam lingkup tugasnya’. Adapun fungsinya adalah:



E1FA443D9A



- a) Penyelenggaraan perumusan, monitoring, dan evaluasi kebijakan umum lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b) Penyelenggaraan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitasi lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administratif lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - e) Penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis serta pemanduan dan penyinerjian pelaksanaan program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan; serta
 - f) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pasal 17 menyebutkan bahwa Asisten Administrasi Umum memiliki tugas pokok ‘merumuskan, monitoring, evaluasi kebijakan umum bidang organisasi, administrasi pimpinan serta umum, serta kebijakan strategis program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi, melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian untuk memandu dan menyinerjikan implementasinya oleh biro dan perangkat daerah dalam lingkup tugasnya’. Adapun fungsinya adalah:
- a) Penyelenggaraan perumusan, monitoring, dan evaluasi kebijakan umum lingkup Asisten Administrasi Umum;
 - b) Penyelenggaraan koordinasi, supervise, pembinaan, dan pengendalian, serta fasilitasi lingkup Asisten Administrasi Umum;
 - c) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administratif dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Asisten Administrasi Umum;
 - d) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi lingkup Asisten Administrasi Umum;
 - e) Penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis serta pemanduan dan penyinerjian pelaksanaan program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi lingkup Asisten Administrasi Umum; serta
 - f) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



E1FA443D9A



Dari uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tersebut, tugas asisten membantu sekretaris daerah dalam menjalankan perannya sebagai *middle line* adalah memandu, menyinergikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan baik tugas-tugas perangkat daerah di bawah lingkup koordinasinya maupun program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, tugas asisten dalam menjalankan peran sekretariat daerah sebagai *supporting staff* adalah mengelola tugas biro-biro yang berada di bawah lingkup kewenangannya.

b. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok ‘memimpin, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah provinsi serta pelayanan administratif bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, meliputi otonomi daerah, pemerintahan dan kerja sama yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya’. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam hal fasilitasi otonomi daerah, karakter tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terbagi dua yaitu tugas ‘memfasilitasi’ serta tugas ‘menyusun’. Tugas ‘menyusun’ berkaitan dengan penyusunan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan bahan tindak lanjut evaluasi kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan rencana tindak lanjut kapasitas daerah provinsi, penyusunan rekomendasi peningkatan kapasitas daerah



E1FA443D9A



kabupaten/kota, penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Jawa Barat, penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat, dan penyusunan dokumen standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tugas ‘memfasilitasi’ berkaitan dengan fasilitasi administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, fasilitasi peringatan hari jadi provinsi dan kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan SPM provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam hal fasilitasi pemerintahan, dua karakter tugas dan fungsi pada fasilitasi otonomi daerah juga diterapkan. Dalam tugas ‘menyusun’, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan penyusunan laporan pelaksanaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), penyusunan kebijakan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyusunan bahan penataan daerah. Sedangkan untuk tugas ‘memfasilitasi’, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan fasilitasi kesekretariatan gubernur dalam penyelenggaraan tugas dekonsentrasi, fasilitasi perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan, fasilitasi administrasi penataan desa, fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, serta fasilitasi penamaan rupabumi. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga melaksanakan pengoordinasian dalam perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang penanggulangan bencana daerah dan satuan polisi pamong praja,

Adapun dalam hal fasilitasi kerja sama, karakter tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah ‘memfasilitasi’. Untuk itu, biro melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi naskah kerja sama baik dalam negeri, luar negeri, maupun pihak ketiga. Fasilitasi ini dilakukan tidak hanya untuk perangkat daerah provinsi namun juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terutama kerja sama yang bersifat antar daerah dan antar daerah dengan pihak luar negeri. Dalam melakukan fasilitasi tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga/instansi vertikal. Disamping itu, tugas biro juga meliputi fasilitasi penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, ASN, anggota DPRD baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi pendampingan kunjungan kerja gubernur/wakil Gubernur ke luar negeri, serta fasilitasi



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



penerimaan kunjungan kerja mitra dan calon mitra kerja sama luar negeri.

c. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tugas pokok Biro Hukum dan HAM adalah ‘menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, analisis dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi produk hukum daerah provinsi, kajian dan telaahan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya’. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022.

Dari kalimat tugas pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum, tugas pokok Biro Hukum dan HAM Setda Jabar melingkupi fasilitasi hukum daerah, yang mencakup penyusunan, pengkajian, serta evaluasi berbagai kebijakan hukum di tingkat daerah, bantuan dan konsultasi hukum, penyelesaian sengketa hukum, serta pembinaan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Adapun fungsi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, analisis, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Terkait perumusan kebijakan umum di lingkup pemerintah daerah, Biro Hukum dan HAM memiliki peran dalam memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah (perda dan pergub). Tugas tersebut juga mencakup mengkaji dan menyusun rancangan peraturan daerah serta produk hukum lainnya, baik yang diinisiasi oleh perangkat daerah maupun legislatif. Sementara itu, dalam hal penanganan masalah hukum, Biro Hukum dan HAM berperan dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada pemerintah daerah yang juga meliputi menangani dan membantu



E1FA443D9A



penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan pemerintah daerah, baik di dalam maupun luar pengadilan.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta untuk memberikan akses informasi hukum bagi masyarakat, Biro Hukum dan HAM juga bertugas memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait hukum kepada masyarakat, perangkat daerah provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu juga mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan dan keputusan kepala daerah. Adapun terkait pengelolaan hak asasi manusia (HAM) di daerah, Biro Hukum dan HAM bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam mengoordinasikan dan mengelola kebijakan terkait hak asasi manusia di tingkat daerah, termasuk perlindungan HAM dan pemenuhan hak-hak warga negara.

d. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu biro yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 8 dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2022 menyatakan bahwa tugas pokok Biro Kesejahteraan Rakyat adalah 'membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar'. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki empat fungsi yaitu:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Biro Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan umum merujuk kepada perumusan regulasi bidang kesejahteraan rakyat. Di dalam pelaksanaan fungsi ini, Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dimulai dari penyusunan *policy brief*, pembahasan isi regulasi, hingga penetapannya. Pelibatan *stakeholder* dilakukan untuk



E1FA443D9A



memastikan regulasi telah mempertimbangkan setiap sudut pandang.

Selain itu dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, Biro Kesejahteraan Rakyat juga melakukan fasilitasi penyusunan regulasi oleh perangkat daerah. Fasilitasi yang dilakukan dimulai dari pelayanan administrasi yaitu pemberian paraf koordinasi untuk proses penetapan serta registrasi regulasi kepada Biro Hukum dan HAM hingga pemberian *review* dan tanggapan atas draf regulasi yang disampaikan perangkat daerah. Di dalam proses ini perangkat daerah mengundang Biro Kesejahteraan Rakyat dari sejak pembahasan draf awal hingga penetapan regulasi. Fasilitasi lainnya yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat kepada perangkat daerah adalah fasilitasi program atau kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti kegiatan upaya pencegahan *stunting* (program kesehatan masyarakat) dan program pengentasan kemiskinan. Selain kepada perangkat daerah, dilakukan pula fasilitasi pemenuhan instruksi pimpinan seperti pengusulan Calon Pahlawan Nasional dan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan.

Adapun perangkat daerah yang secara spesifik difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan unit kerja yang menangani urusan: kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Masih berkaitan dengan penyelenggaraan rumusan kebijakan, setelah sebuah regulasi ditetapkan terutama yang diinisiasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, dilakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) terhadap implementasinya. *Monev* terutama difokuskan kepada regulasi-regulasi yang bersifat strategis dan/atau prioritas dengan cara pengecekan pada instrumen *monev* yang sebelumnya telah disusun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi benar-benar diimplementasikan sesuai tujuan dan kelompok sasarannya.

Selain berkoordinasi dan memfasilitasi perangkat daerah dan pimpinan, Biro Kesejahteraan Rakyat juga menangani urusan residual dengan melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan bina mental spiritual. Beberapa fasilitasi yang dilakukan adalah penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), pemberian hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Tim Pemandu Haji



E1FA443D9A

Daerah (TPHD). Selain itu juga memfasilitasi dialog Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat serta pemberian hibah kepada lembaga keagamaan maupun lembaga pendidikan keagamaan. Hibah diberikan dalam rangka peningkatan kualitas lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan peribadatan maupun pendidikan agama kepada masyarakat. Di dalam pelaksanaan hibah dilakukan monitoring dan evaluasi atas proses pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa hibah digunakan sesuai peruntukannya, menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan dan anggaran, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana, mencegah terjadinya penyimpangan serta meminimalkan risiko, menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan pemberian hibah pada tahun berikutnya, serta memastikan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Selain pemberian hibah dan fasilitasi kegiatan keagamaan sebagaimana tersebut di atas, Biro Kesejahteraan Rakyat juga melakukan pengelolaan lembaga keagamaan yang menjadi aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Badan Pengelola Islamic Center (BPIC) yang mencakup Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Jawa Barat, LPTQ, Masjid Atta'awun Bogor, Masjid Raya Bandung, dan Masjid Raudhatul Irfan Sukabumi. Peran Biro Kesejahteraan Rakyat berfokus pada pengelolaan pengurus lembaga seperti Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) pada masjid-masjid. Pengelolaan pengurus dilakukan untuk memastikan agar lembaga-lembaga tersebut aktif berkegiatan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

e. **Biro Perekonomian**

Sesuai Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022, Biro Perekonomian mempunyai tugas pokok 'menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang perekonomian meliputi sumber daya air, energi dan pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, infrastruktur daerah, penataan ruang, perumahan dan permukiman, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil, serta penanaman modal, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'. Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Perekonomian mempunyai fungsi yaitu:



E1FA443D9A



- 1) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Perekonomian;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Biro Perekonomian;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Perekonomian;
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan umum merujuk kepada perumusan regulasi bidang perekonomian dan pembangunan. Di dalam pelaksanaan fungsi ini, Biro Perekonomian melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dimulai dari penyusunan *policy brief*, pembahasan isi regulasi, hingga penetapannya. Pelibatan stakeholder dilakukan untuk memastikan regulasi telah mempertimbangkan setiap sudut pandang.

Selain itu dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, Biro Perekonomian juga melakukan fasilitasi penyusunan regulasi oleh perangkat daerah. Fasilitasi yang dilakukan dimulai dari pelayanan administrasi yaitu pemberian paraf koordinasi untuk proses penetapan serta registrasi regulasi kepada Biro Hukum dan HAM hingga pemberian review dan tanggapan atas draf regulasi yang disampaikan perangkat daerah. Di dalam proses ini perangkat daerah mengundang Biro Perekonomian dari sejak pembahasan draf awal hingga penetapan regulasi. Adapun perangkat daerah yang secara spesifik difasilitasi oleh Biro Perekonomian merupakan unit kerja yang menangani urusan: sumber daya air, energi dan pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, infrastruktur daerah, penataan ruang, perumahan dan permukiman, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil, serta penanaman modal.

Masih berkaitan dengan penyelenggaraan rumusan kebijakan, setelah sebuah regulasi ditetapkan terutama yang diinisiasi oleh Biro Perekonomian, dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasinya. Monev terutama difokuskan kepada regulasi-regulasi yang bersifat strategis dan/atau prioritas dengan cara pengecekan pada instrumen monev yang sebelumnya telah disusun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi benar-benar diimplementasikan sesuai tujuan dan kelompok sasarannya.

Selain berkoordinasi dan memfasilitasi perangkat daerah, Biro Perekonomian juga menangani urusan residual yaitu dengan melakukan koordinasi, fasilitasi, dan perumusan bahan



E1FA443D9A



kebijakan pengendalian inflasi daerah, yang diantaranya melalui penerapan beberapa strategi kunci yaitu (1) Keterjangkauan harga yang dilakukan melalui intervensi harga yakni mengatur harga barang-barang pokok, dan atau penyediaan bantuan sosial untuk masyarakat; 2) Ketersediaan pasokan barang untuk menjaga kestabilan harga, melalui koordinasi pemantauan dan pengelolaan stok barang di pasar dan melakukan diversifikasi sumber pasokan melalui Kerjasama dengan berbagai sumber produksi untuk memastikan pasokan barang tidak terhambat; 3) Kelancaran jalur distribusi, melalui peningkatan infrastruktur dan koordinasi antar pemangku kepentingan; 4) Komunikasi efektif, salah satunya melalui Pengembangan berkelanjutan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat (SILINDA JABAR). Aplikasi ini diarahkan tidak hanya meng-update perkembangan harga kebutuhan pokok, tetapi juga menginformasikan potensi produksi dan pasokan pangan strategis, sehingga terdapat integrasi aspek produksi, distribusi, perdagangan, dan manajemen stok.

Selain fungsi pengendalian inflasi, Biro Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan fasilitasi pembiayaan dan akses keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, Biro Perekonomian berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, sehingga memudahkan akses masyarakat dan UMKM terhadap sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Biro juga berupaya menjalin kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menciptakan program-program pembiayaan yang inovatif, serta memberikan informasi mengenai berbagai skema pembiayaan yang tersedia, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

f. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022, Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BUMD, Investasi, dan Adbang) mempunyai tugas pokok ‘menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pembinaan, pengoordinasian, dan evaluasi pelayanan administrasi bidang BUMD, investasi daerah, dan administrasi pembangunan, meliputi BUMD lembaga keuangan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), BUMD non lembaga keuangan, investasi daerah, dan administrasi pembangunan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-



E1FA443D9A



undangan'. Biro BUMD, Investasi dan Adbang mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang BUMD, investasi, dan administrasi pembangunan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi BUMD, investasi, dan administrasi pembangunan;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan; dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam hal perumusan kebijakan, Biro BUMD, Investasi, dan Adbang memfasilitasi penyusunan kebijakan untuk urusan BLUD, BUMD (lembaga keuangan dan lembaga non keuangan (LK/NLK)), dan investasi daerah. Untuk penyusunan kebijakan berkaitan BLUD, BUMD dan investasi daerah, Biro BUMD, Investasi, dan Adbang memiliki tim pendamping khusus. Hal ini dilakukan agar kebijakan dapat mencakup segala sisi.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan administrasi pembangunan, Biro BUMD, Investasi, dan Adbang melakukan monev. Beberapa hal yang dimonitor dan dievaluasi adalah pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemanfaatan penyaluran bantuan keuangan oleh kabupaten/kota penerima. Disamping itu, monev juga dilakukan terhadap urusan BUMD dan BLUD.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan terbaru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat peran Biro BUMD, Investasi, dan Adbang dalam urusan inovasi pembiayaan adalah memberikan alternatif pembiayaan untuk membiayai urusan pemerintahan yang bersumber dari anggaran di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alternatif pembiayaan yang direkomendasikan memberikan akses bagi pihak ketiga untuk menyalurkan dana yang mereka miliki untuk digunakan dalam membiayai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD yang mayoritas bersumber dari perolehan pajak.

g. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ) merupakan salah satu unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Biro PBJ bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang



E1FA443D9A



dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Biro PBJ berpedoman pada peraturan-peraturan yang diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta turunannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro PBJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif bidang pengadaan barang dan jasa, meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi utama Biro PBJ, diantaranya yakni:

- 1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang meliputi:
 - Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa;
 - Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; dan
 - Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
- 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE). PLPSE bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.
- 3) Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang mencakup Pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa serta pendampingan konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

Biro PBJ memegang peran strategis dalam mengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan tugas yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Biro PBJ bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi



E1FA443D9A



bagian penting dari upaya Biro PBJ dalam meningkatkan kualitas pengadaan di Provinsi Jawa Barat.

h. Biro Organisasi

Biro Organisasi merupakan salah satu biro yang menjalankan peran *supporting staff*. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2022, tugas pokok Biro Organisasi adalah ‘menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang organisasi meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya’. Di dalam melaksanakan tugas pokok, Biro Organisasi memiliki fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang organisasi;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Biro Organisasi;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Organisasi; dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian tugas pokok bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi Biro Organisasi mencakup bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tata laksana. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kelembagaan, dilakukan perumusan kebijakan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta kebijakan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai penjabaran dari regulasi pusat. Disamping itu, dilakukan pula fasilitasi pembentukan Cabang Dinas (Cabdin), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada level provinsi. Untuk fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Biro Organisasi memberikan pembinaan, pendampingan, dan rekomendasi dalam hal pembentukan organisasi dari penetapan struktur organisasi hingga uraian tugas. Rekomendasi kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pengesahan lebih lanjut.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang analisis jabatan, Biro Organisasi melakukan penyusunan analisis jabatan, kebijakan formasi jabatan, dan



E1FA443D9A



kebijakan standar kompetensi jabatan. Dilakukan juga evaluasi jabatan yang menetapkan kelas dan nilai jabatan yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran penghasilan yang wajar diterima oleh suatu jabatan. Hal-hal yang dilaksanakan pada level provinsi ini juga diterapkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui pembinaan, pendampingan, dan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang reformasi birokrasi, Biro Organisasi menyusun kebijakan penerapan reformasi birokrasi seperti roadmap reformasi birokrasi yang memuat rencana aksi implementasi. Untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi diterapkan secara menyeluruh, dilaksanakan pembinaan kepada perangkat daerah dan penilaian melalui evaluasi implementasi reformasi birokrasi oleh perangkat daerah. Pembinaan dan pendampingan juga dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Biro Organisasi juga menyusun strategi implementasi reformasi birokrasi terutama dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kemudian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang akuntabilitas kinerja, Biro Organisasi mengambil peran dalam mengoordinasikan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan pada level provinsi oleh perangkat daerah. Juga pendampingan dalam penyusunan arsitektur kinerja pada lingkup perangkat daerah. Disamping itu, mengoordinasikan pengukuran kinerja secara berkala secara bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan melalui sistem teknologi informasi. Berkenaan dengan pengukuran kinerja tahunan, Biro Organisasi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada level provinsi dan mendampingi penyusunan LKIP pada tingkat perangkat daerah untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB. Pengoordinasian juga dilakukan dalam penyusunan perjanjian kinerja jabatan pimpinan tinggi (JPT) pada perangkat daerah dan sebagaimana pada bidang lainnya, pendampingan dan pembinaan dilakukan untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Seperti halnya kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana, budaya kerja merupakan bidang yang termasuk dalam komponen pengukuran tingkat implementasi reformasi birokrasi. Budaya kerja adalah apa yang dicoba diubah dalam manajemen perubahan. Pengoperasionalannya oleh Biro Organisasi adalah pada penyusunan kebijakan berkaitan budaya kerja dan pengukuran budaya kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Barat.



E1FA443D9A



Berlanjut kepada penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang tatalaksana, Biro Organisasi melakukan perumusan kebijakan terkait standar kerja seperti jam kerja, standar pakaian dinas, tata naskah dinas, dan tata hubungan kerja. Termasuk dalam bidang ini adalah penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta pendampingan penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) perangkat daerah. Selain terkait standar kerja, penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tatalaksana mencakup pembinaan tentang penerapan standar pelayanan publik oleh perangkat daerah. Kebijakan tentang penerapan pelayanan publik juga disusun oleh Biro Organisasi berikut koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi penerapan kebijakan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Baik terkait standar kerja maupun pelayanan publik, pembinaan kepada perangkat daerah juga dilakukan.

i. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan merupakan salah satu unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Dengan ditetapkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi, berimplikasi pada perubahan struktur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang kemudian ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022. Berbeda dengan biro-biro lain, Biro Administrasi Pimpinan membawahkan Bagian Tata Usaha dan Bagian Protokol (Pasal 8). Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022, Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas ‘membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif bidang administrasi pimpinan, meliputi tata usaha, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol yang menjadi kewenangan provinsi’. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan pelayanan administratif dalam bidang administrasi pimpinan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Biro Administrasi Pimpinan;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Administrasi Pimpinan; dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



E1FA443D9A



Berdasarkan uraian tugas terdapat tiga pengelompokan tugas utama Biro Administrasi Pimpinan yaitu pelayanan kerumahtanggaan, pelayanan keprotokolan, serta pelayanan materi dan komunikasi pimpinan. Penyelenggaraan tugas pelayanan kerumahtanggaan meliputi fasilitasi urusan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur pada ruang kerja dan rumah jabatan serta penyiapan rencana kerja harian operasional gubernur dan wakil gubernur. Selain itu juga penyiapan penerimaan tamu dan istri/suami gubernur dan wakil gubernur.

Selanjutnya, penyelenggaraan tugas pelayanan keprotokolan mencakup fasilitasi acara yang dihadiri pimpinan dimulai dari penyiapan bahan acara/upacara, rapat dinas, resepsi, penyiapan bahan laporan pimpinan, penyusunan buku panduan acara, penyiapan koordinasi gladi lapangan dalam acara resmi dan acara kenegaraan, koordinasi ajudan pimpinan, pendokumentasian acara kegiatan pimpinan pemerintah provinsi, penyiapan tanda kenang-kenangan, serta pemantauan dan evaluasi pengaturan acara. Selain itu juga memfasilitasi tamu mulai dari penyiapan bahan koordinasi persiapan penerimaan, akomodasi dan transportasi kunjungan, penyiapan bahan rencana agenda kunjungan tamu, perjalanan dinas pimpinan serta penyiapan bahan pelaporan kegiatan tamu. Lebih jauh, pelayanan dalam hal keprotokolan juga meliputi hubungan keprotokolan serta koordinasi dengan instansi yang memerlukan kegiatan keprotokolan

Terakhir, penyelenggaraan tugas pelayanan materi dan komunikasi pimpinan mencakup tiga objek, yaitu:

- 1) Fasilitasi penyiapan materi pimpinan berupa penyiapan materi kebijakan, penyusunan notulensi rapat, naskah sambutan dan pidato gubernur dan wakil gubernur serta penggandaan materi rapat;
- 2) Fasilitasi komunikasi pimpinan berupa menyelenggarakan hubungan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah untuk agenda yang bersifat khusus, fasilitasi aspirasi masyarakat kepada pimpinan berupa kajian, seminar, lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), dan aspirasi langsung, termasuk menyelenggarakan kerja sama promosi, sosialisasi dan pemasangan advertorial iklan/iklan layanan masyarakat;
- 3) Fasilitasi dokumentasi pimpinan meliputi pendokumentasian kegiatan, fasilitasi peliputan, konferensi pers dan pelayanan media kegiatan gubernur dan wakil gubernur, serta program strategis gubernur dan wakil gubernur. Selain itu juga menyiapkan penyiapan dan



E1FA443D9A



produksi bahan materi pimpinan untuk konten di kanal digital, media sosial, media elektronik, media online, media cetak dan media luar ruang termasuk penataan foto dan media digital di koridor/lorong lingkup gedung kantor dan rumah jabatan.

- 4) Berdasarkan poin-poin di atas, Biro Administrasi Pimpinan secara jelas bertanggung jawab langsung dalam memberikan pelayanan dalam bentuk administrasi dan fasilitasi kepada pimpinan baik itu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah ataupun pejabat yang mewakili pimpinan tersebut. Selain itu juga memberikan informasi dalam bentuk dokumentasi serta publikasi kegiatan pimpinan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui seluruh rangkaian kegiatan pimpinan.

j. Biro Umum

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022, Biro Umum mempunyai tugas pokok 'menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha'. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang umum;
- 2) Penyelenggaraan administrasi biro umum;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas biro umum; dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berbeda dengan karakter tugas pokok dan fungsi biro lainnya, cakupan tugas pokok dan fungsi Biro Umum adalah pengelolaan urusan internal sekretariat daerah. Terdapat tiga kelompok tugas utama yaitu kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta tata usaha. Ketiga kelompok tugas tersebut mencakup penyelenggaraan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan monev implementasi kebijakan yang mengatur internal sekretariat daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata usaha meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan kearsipan. Tugas dan fungsi pada bidang perencanaan meliputi diantaranya fasilitasi penyusunan rencana kerja sekretariat daerah baik yang bersifat strategis hingga operasional pada



E1FA443D9A



tingkat kegiatan dan sub kegiatan, pengoordinasian penyusunan arsitektur kinerja, pemantauan capaian kinerja, pengoordinasian penyusunan laporan kinerja baik itu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Karakter tugas dan fungsi bidang perencanaan juga bernuansa middle line yang menyambungkan arahan sekretaris daerah (sebagai kepala sekretariat daerah) melalui para 'asisten' dengan biro-biro pada level operasional. Adapun fokus pengoordinasian adalah pada perumusan dan pencapaian kinerja sekretariat daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya tugas dalam pengelolaan kepegawaian meliputi pelayanan administrasi kepegawaian seperti fasilitasi kenaikan pangkat, fasilitasi pelaporan penilaian kinerja individu, serta fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sekretariat daerah. Selain fasilitasi administrasi, Biro Umum juga melakukan analisis terhadap kebutuhan dan pola karir serta dukungan pengembangan kompetensi pegawai sekretariat daerah. Sedangkan tugas pada pengelolaan kearsipan meliputi diantaranya fasilitasi penataan arsip pada biro-biro, fasilitasi pemusnahan arsip, serta pengelolaan arsip pada record center.

Selanjutnya Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum, pemantauan dan evaluasi bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah Provinsi, penatausahaan keuangan serta akuntansi dan pelaporan. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset merupakan salah satu bagian penting dalam struktur organisasi Biro Umum karena memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset lingkup Sekretariat Daerah serta memastikan bahwa keuangan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta aset dimanfaatkan secara optimal.

Ketiga adalah Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi dan pelayanan administratif urusan dalam, penggunaan dan penyediaan barang milik daerah serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. Dengan karakteristik tugasnya yang secara garis besar adalah urusan pelayanan administratif dan dukungan terhadap organisasi, Bagian Rumah Tangga banyak menangani beberapa tugas residual terutama yang berkaitan dengan pelayanan pimpinan. Bagian Rumah Tangga memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran aktivitas sehari-hari di lingkungan Sekretariat Daerah. Bagian ini bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan



E1FA443D9A



pengelolaan rumah tangga, termasuk kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja.

Selain tugas pokok, Bagian Tata Usaha juga menangani urusan residual yaitu pengelolaan aset milik Sekretariat Daerah yang dimanfaatkan menjadi objek retribusi. Bagian Tata Usaha di Sekretariat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran kegiatan administrasi dan operasional sehari-hari. Secara garis besar, bagian ini bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi umum dan ketatausahaan.

k. Staf Ahli Gubernur

Staf Ahli Gubernur dibagi ke dalam tiga bidang yaitu Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Bidang Ekonomi dan Pembangunan; serta Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Staf Ahli Gubernur memiliki tugas pokok memberikan telaahan, kajian, saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai masalah pemerintahan, hukum dan politik, ekonomi dan pembangunan, serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok, Staf Ahli Gubernur memiliki fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan telaahan, kajian, saran, pertimbangan, dan rekomendasi bidang pemerintahan, hukum politik, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, sesuai bidang tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan penyampaian telaahan, kajian, saran, pertimbangan, dan rekomendasi bidang pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya; serta
- 3) Penyelenggaraan tugas membantu pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok ini dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk. Jenis, jenjang, dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu. Adapun tugas yang dilaksanakan adalah sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.2. Gambaran Sumber Daya



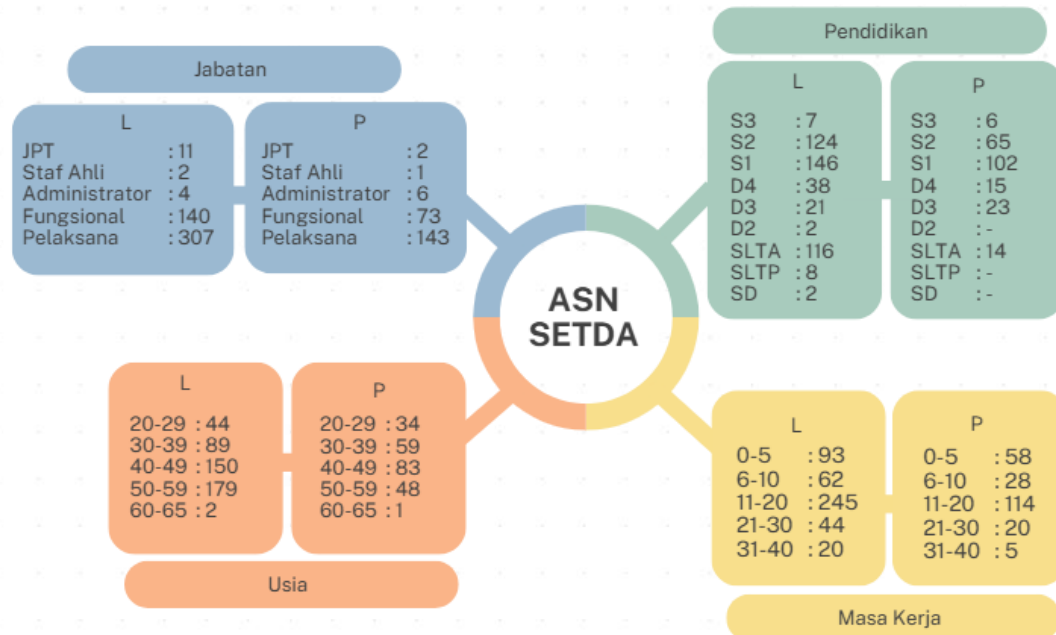
E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



2.1.2.1. Gambaran Sumber Daya Manusia

Gambar 2.2. SDM Sekretariat Daerah berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Terakhir



Sumber: Biro Umum, Agustus 2025

Sumber daya manusia (SDM) pada organisasi merupakan sebuah aset. Oleh karena itu, Setda memahami bahwa pengelolaan SDM yang efektif dapat menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Dengan demikian, gambaran kondisi SDM merupakan data krusial yang dapat mendukung pengelolaan kinerja secara efektif.

Berdasarkan data per Agustus 2025, PNS Setda berjumlah 689 orang yang terdiri dari 13 orang pejabat pimpinan tinggi yang terdiri dari satu orang Eselon 1 dan 12 orang Eselon 2, tiga orang staf ahli, 10 pejabat administrasi, 213 orang pejabat fungsional, dan 450 orang pelaksana. Dilihat dari kategori jenis kelamin rasio antara laki-laki dan perempuan adalah 67:33 persen dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 464 orang dan perempuan sebanyak 225 orang. Perbandingan jenis kelamin pada setiap jenis jabatan antara laki-laki dan perempuan adalah 4:6 persen pada jabatan administrasi, 66:34 persen pada jabatan fungsional, dan 68:32 persen pada jabatan pelaksana.

Pada kategori kelompok usia, pegawai Setda mayoritas berada pada rentang usia 40-49 tahun yaitu 33,82% dari total jumlah pegawai dan merupakan pegawai dengan mayoritas menduduki jabatan pelaksana yaitu sebanyak 30,67% dari total jumlah seluruh pelaksana. Pada kelompok usia ini, sebanyak 87 orang merupakan lulusan sarjana (S1) atau 37,34% dari total jumlah



E1FA443D9A

pegawai dalam rentang usia tersebut. Kelompok usia terbanyak kedua adalah pada usia 50-59 tahun yaitu sebanyak 227 orang atau 32,95% dari total jumlah pegawai. Rentang usia ini dimiliki oleh kelompok jabatan pelaksana sebanyak 160 orang atau 35,56% dari total jumlah pelaksana.

Pada kategori kualifikasi pendidikan, lulusan S1 merupakan mayoritas kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai Setda yaitu sebanyak 248 orang atau 35,99% dari total seluruh pegawai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 164 orang atau 66,13% menduduki jabatan pelaksana dan sebanyak 83 orang atau 33,47% merupakan pegawai yang menduduki jabatan fungsional.

Tingkat kualifikasi lainnya yang mendominasi adalah S2 (magister) sebanyak 189 orang atau 27,43% dari total keseluruhan pegawai. Tingkat kualifikasi S2 merupakan mayoritas pada jabatan fungsional yaitu sebanyak 110 orang atau 51,64% dari keseluruhan jumlah pejabat fungsional. Begitu pun mayoritas tingkat kualifikasi pada jabatan administrasi yaitu sebesar 70% dari total jumlah pejabat administrasi. Sedangkan tingkat kualifikasi S3 memenuhi jabatan administrasi sebesar 20% dari total pejabat administrasi atau 1,89% dari total seluruh pegawai dengan jumlah keseluruhan pegawai berkualifikasi S3 sebanyak 13 orang.

Dari data yang diuraikan tersebut, dapat dilihat bahwa kualifikasi mayoritas pegawai Setda telah memenuhi syarat. Dalam arti bahwa, bagi unit kerja yang memiliki fungsi perumusan serta evaluasi dan pengendalian implementasi kebijakan, kualifikasi S1 memiliki karakteristik yang dibutuhkan yaitu menguasai konsep teoritis, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Disamping itu, kualifikasi mayoritas pejabat fungsional sangat mendukung *performance* Setda. Sebab berdasarkan KKNI, kualifikasi magister memiliki karakter mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi, menguasai teori mutakhir dan metode penelitian, serta mampu menyusun kebijakan berbasis pengetahuan dan mengambil keputusan strategis.

Dari sisi usia, berdasarkan teori *Lifespan Development* dan *Sosioemotional Selectivity Theory* (SST) mayoritas pegawai Setda berada pada tahap puncak karir yang memiliki keseimbangan pada *fluid intelligence* dan *crystallized intelligence*. Artinya bahwa para pegawai tersebut mampu memproses informasi baru dan beradaptasi secara efisien serta kaya akan pengalaman mendalam dan keahlian teknis/manajerial yang teruji. Selain itu, mereka memiliki motivasi kuat untuk memimpin tim dan membangun



E1FA443D9A

pengaruh. Dengan demikian, memiliki produktivitas tinggi, inovasi adaptif, dan kepemimpinan operasional.

Secara lebih detil berdasarkan biro, Biro Umum menjadi unit kerja dengan SDM terbanyak sebesar 25,40% dari total jumlah pegawai atau sejumlah 175 orang. Unit kerja lain dengan kuantitas SDM signifikan adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan jumlah pegawai sebanyak 100 orang atau 14,51% dari total jumlah pegawai. Sementara itu, Biro BUMD, Investasi, dan Adbang merupakan biro dengan jumlah pegawai paling sedikit yaitu sebanyak 43 orang atau 6,23%. Biro Organisasi dan Biro Perekonomian juga memiliki jumlah yang mendekati yaitu masing-masing 45 dan 47 orang.

Selanjutnya dari komposisi jenis jabatan, terdapat dua biro yang didominasi jabatan fungsional yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Biro Hukum dan HAM. Masing-masing biro memiliki pejabat fungsional sebanyak 59 dan 40 orang atau 27,70% dan 18,78% dari total jumlah pejabat fungsional. Sebaliknya pada tujuh biro lainnya, jumlah jabatan pelaksana mendominasi. Biro Umum memiliki 139 orang pelaksana atau sebesar 30,89% dari keseluruhan total jumlah pelaksana. Disamping Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan juga memiliki pelaksana cukup signifikan jika dibanding jenis jabatan lainnya yaitu 17,78% dari total jumlah pelaksana atau sebanyak 80 orang.

Dilihat dari jenis kelamin, Biro BUMD, Investasi, dan Adbang merupakan unit dengan rasio laki-laki dan perempuan terbesar yaitu 72:27 persen. Sedangkan Biro Hukum dan HAM merupakan biro dengan rasio laki-laki dan perempuan paling mendekati seimbang yaitu 60:39 persen. Kemudian, dilihat dari kelompok usia, Biro Umum merupakan biro dengan kelompok usia 40-49 tahun terbanyak sebesar 9,72% dari total pegawai Setda atau 28,76% dari total pegawai biro. Lalu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Biro Umum merupakan unit kerja yang memiliki pegawai dengan rentang usia termuda yaitu 20-29 tahun terbanyak yaitu masing-masing 16 dan 14 orang.

Dari segi kualifikasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan biro dengan jumlah lulusan S1 terbanyak yaitu 48 orang atau 19,35% dari jumlah pegawai berkualifikasi S1. Biro Umum juga merupakan biro dengan jumlah pegawai berkualifikasi S1 terbanyak yaitu 47 orang atau 18,95% dari jumlah pegawai berkualifikasi S1. Biro Umum juga menjadi biro dengan jumlah pegawai dengan kualifikasi S2 terbanyak yaitu 33 orang atau 17,93% dari total pegawai berkualifikasi S2. Sementara itu Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah, Biro Hukum dan HAM, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian serta Biro Organisasi memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan doctoral

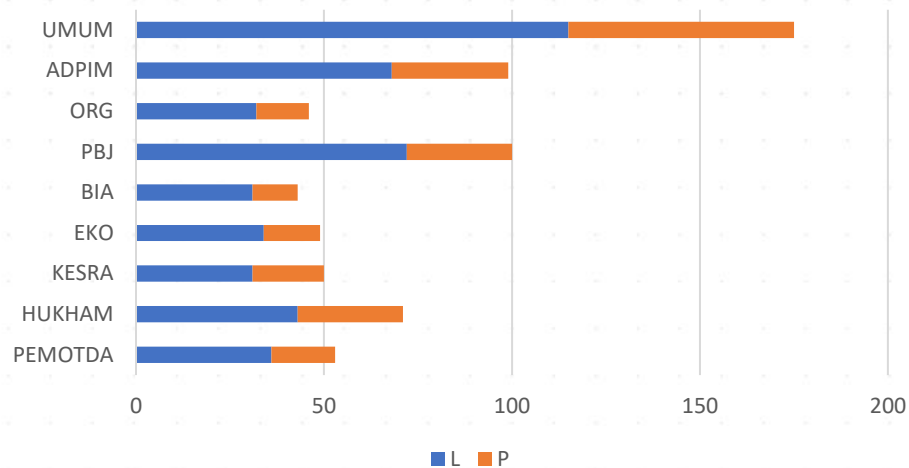


E1FA443D9A



masing-masing sebanyak dua orang. Adapun Biro Administrasi Pimpinan memiliki pegawai berkualifikasi S3 sebanyak 1 orang.

Gambar 2.3. SDM Sekretariat Daerah berdasarkan Biro



Sumber: Biro Umum, Agustus 2025

2.1.2.2. Gambaran Sumber Daya Aset

Dalam Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 71 Tahun 2010, klasifikasi aset pemerintah sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. SAP mengklasifikasikan aset dalam Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat digunakan dalam waktu 12 bulan



E1FA443D9A



atau dalam satu siklus operasi dan merupakan refleksi dari ketersediaan anggaran dan pengelolaan dana kas daerah. Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini merupakan area yang paling krusial karena secara langsung berkaitan dengan kapasitas pelayanan Setda kepada masyarakat. Sedangkan aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar maupun aset tetap tetapi masih memberikan manfaat ekonomi maupun sosial di masa mendatang seperti software, hak paten, atau pun aset kerjasama.

Tabel 2.1 Neraca Aset Sekretariat Daerah dalam 5 Tahun
(dalam Rp000)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Aset Lancar	1,087,710	1,393,855	1,236,505	2,129,613	3,955,813	0.381
Aset Tetap	729,993,719	839,209,800	997,997,322	1,064,029,818	1,076,532,396	0.102
Aset Lainnya	686,074	686,074	686,074	683,580	683,580	-0.001
Jumlah Aset	731,767,503	841,289,729	999,919,900	1,066,843,011	1,081,171,789	0.103
Kewajiban Jangka Pendek	326,046	318,716	975,018	1,104,228	1,008,481	0.326
Jumlah Kewajiban	326,046	318,716	975,018	1,104,228	1,008,481	0.326
Ekuitas	731,441,457	840,971,013	998,944,883	1,065,738,783	1,080,163,307	0.102
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	731,767,503	841,289,729	999,919,900	1,066,843,011	1,081,171,789	0.103

Sumber: Bagian Administrasi Keuangan, Desember 2024

Rata-rata pertumbuhan aset Setda dalam lima tahun terakhir positif pada angka 0,10%. Peningkatan aset tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 18,85% atau meningkat Rp158.630.171.691,00. Namun jumlah aset tertinggi ada di tahun 2024 sebesar Rp1.081.171.768,00 meningkat 1,34% dari tahun sebelumnya.

Aset lancar tumbuh 0,38% menunjukkan bahwa selama lima tahun persediaan anggaran operasional Setda terus meningkat. Terdapat kenaikan signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar Rp1.826.199.271,00 meningkat sebesar 85,75%. Aset tetap Setda selama lima tahun tumbuh positif sebesar 0,10%. Kondisi ini diwujudkan melalui upaya pemeliharaan dan peremajaan terutama pada aset layanan publik seperti Lapangan Gasibu, Lapangan Saparua, Monumen Perjuangan Jawa Barat, dan OSS. Hal ini dilakukan sehingga kapasitas pelayanan Setda meningkat secara kualitas.

Lebih rinci berkenaan dengan aset tetap Setda, dapat diklasifikasikan ke dalam enam kategori terdiri dari Gedung

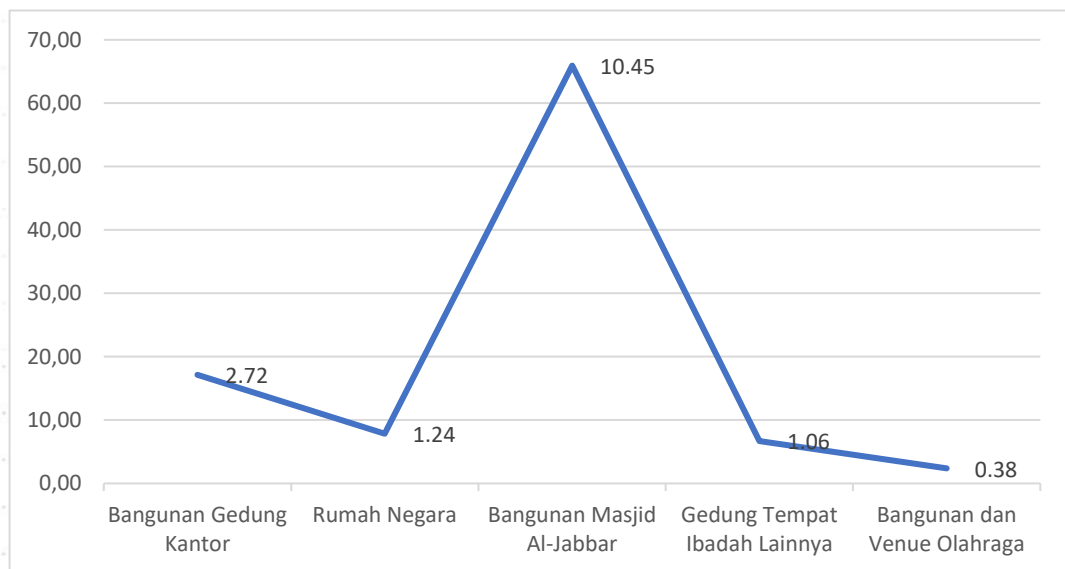


E1FA443D9A



Kantor, Rumah Negara, Masjid Al-Jabbar, Gedung Tempat Ibadah Lainnya, serta Bangunan dan Venue Olahraga dengan total luas sebanyak 15,85 ha. Aset tetap terluas adalah Gedung Masjid Al-Jabbar yang berada di enam lokasi yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran dengan luas secara total 10,45 ha. Aset lainnya yang merupakan layanan publik adalah Gedung dan Venue Olahraga yang terdiri dari Lapangan Gasibu dan Area Saparua yang memiliki luas secara total 0,37 ha. Sementara itu, gedung kantor baik yang berada di kawasan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung maupun yang di luar kawasan secara total memiliki luas 2,72 ha.

Gambar 2.4. Aset Tetap Sekretariat Daerah (dalam Ha)



Sumber: Biro Umum, Desember 2024, diolah.

2.1.2.3. Gambaran Sumber Daya Teknologi

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pemanfaatan informasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan. Sistem informasi yang dibangun merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat diakses oleh stakeholder melalui browser dan 15% diantaranya telah didukung oleh aplikasi mobile. Dari 20 sistem informasi yang telah dibangun dari tahun 2018-2024, sebanyak tiga diantaranya merupakan pengembangan dari aplikasi pusat dan sisanya merupakan inovasi sekretariat daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan.



E1FA443D9A



Beberapa sistem informasi yang merupakan inovasi sekretariat daerah adalah:

- 1) JAPATI sebuah sistem informasi pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi untuk mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat.
- 2) SKM sebuah platform digital yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik.
- 3) SURABI sebuah sistem informasi berbasis website yang terintegrasi untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien, serta sebagai alat yang efektif dan efisien untuk mengukur kinerja RB pada Perangkat Daerah secara realtime.
- 4) AKSES PASTI sebuah layanan pembentukan peraturan daerah dan peraturan gubernur Provinsi Jawa Barat dan penyediaan media informasi berbasis web untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap produk hukum daerah, dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan serta memberikan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat
- 5) SIPELANG sebuah Layanan Pengajuan Nomor Naskah Produk Hukum Pengaturan dan Penetapan dan digunakan untuk menyusun perencanaan dan pemrosesan usulan produk hukum agar dapat dilacak dan disimpan sesuai dengan ketentuan kearsipan.
- 6) SILINDA sebuah sistem yang digunakan untuk melihat informasi harga komoditas di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan data Tim Pengendali Inflasi Daerah di seluruh Jawa Barat.
- 7) SITABAH sebuah sistem informasi yang mengelola data hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk untuk mengelola proses pemberkasan pencairan bantuan hibah, pengelolaan hibah sampai dengan kontroling penggunaan hibah.
- 8) eClip sebuah media monitoring yang dirancang khusus untuk memantau pemberitaan daring terkait Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Jawa Barat.



E1FA443D9A



- 9) DPLEGA sebuah sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai platform manajemen data dan analitik lembaga keagamaan di Jawa Barat dengan cakupan data meliputi: identitas lembaga, sejarah, legalitas, kepengurusan, aktivitas, hingga prestasi.

Selanjutnya Tabel 2.2. menyajikan alamat masing-masing sistem informasi pada sekretariat daerah.

Tabel 2.2. Sistem Informasi Sekretariat Daerah

No	Nama	Laman
1	Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi (JAPATI)	http://kinerja.jabarprov.go.id/sakip
2	Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	http://skm.jabarprov.go.id
3	Sistem Pengukuran Reformasi dan Birokrasi Terintegrasi (SURABI)	https://surabi.jabarprov.go.id/
4	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	https://jdih.jabarprov.go.id/
5	Sistem Database Bantuan Hukum Daerah (SIDBANKUMDA)	https://sidbankumda.jabarprov.go.id/
6	Sistem Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (SIPELANG)	https://sipedang.jabarprov.go.id
7	Fasilitasi aspirasi masyarakat terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan (AKSES PASTI)	https://jdih.jabarprov.go.id/aksespasti/
8	Website Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat	https://birohukum.jabarprov.go.id/
9	Sistem Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum (E-Darkum)	http://103.147.222.245/darkum/
10	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	https://lpse.jabarprov.go.id
11	Website Biro Pengadaan Barang dan Jasa	https://biropbj.jabarprov.go.id/
12	Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat (SILINDA DI JABAR)	https://silinda.jabarprov.go.id/
13	Website Biro Perekonomian	https://bioperekonomian.jabarprov.go.id/



E1FA443D9A



No	Nama	Laman
14	Website Biro Administrasi Pimpinan	https://bit.ly/WebsiteAdpim
15	E-Clip	https://eclip.jabarprov.go.id/
16	Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR)	https://sinar.big.go.id/
17	Sistem Tata Kelola Bantuan Hibah (SITABAH)	https://sitabah.kesrajabar.id/
18	Website Biro Kesejahteraan Rakyat	https://birokesra.jabarprov.go.id/
19	Kuliah Kerja Nyata (KKN) JABAR CAANG	https://jabarprov.go.id/layanan/kknjabarcaang
20	Layanan Informasi Hibah Keagamaan	https://birokesra@jabarprov.go.id/layanan/bantuanhibahkeagamaan
21	Dashboard Potensi Lembaga Keagamaan (DPLEGA)	http://dplega.jabarprov.go.id

Sumber: Biro pada Sekretariat Daerah, Desember 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan

2.1.3.1. Kinerja Utama

Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2018-2023 adalah 'Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi'. Visi ini dicapai melalui lima misi yaitu:

- 1) membentuk manusia pancasila yang bertaqwa;
- 2) melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif;
- 3) mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan;
- 4) meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi kerakyatan yang sejahtera dan adil; serta
- 5) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selanjutnya, misi dicapai melalui tujuh tujuan yang dirinci menjadi 21 sasaran strategis dengan 30 indikator kinerja pembangunan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja.

Kinerja sekretariat daerah pada periode ini secara spesifik diprioritaskan dalam mendukung tiga misi yaitu misi pertama, ketiga, dan kelima. Pada misi pertama, kinerja sekretariat daerah mendukung tujuan 'Terwujudnya Manusia yang Berke-Tuhan-an, Berdemokrasi, Berkebangsaan dan Berkeadilan Sosial dengan sasaran 'Meningkatnya Keimanan dan Kerukunan Umat



E1FA443D9A

Beragama dalam Kerangka Demokrasi'. Ketercapaian sasaran pembangunan tersebut dilihat melalui pengukuran 'Indeks Kerukunan Umat Beragama'.

Tujuan selanjutnya yang didukung oleh kinerja sekretariat daerah pada misi ketiga adalah 'Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan'. Adapun sasaran yang dituju adalah 'Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan' dengan tolok ukur ketercapaian adalah 'Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru'. Sementara pada misi kelima, kinerja sekretariat daerah mendukung ketercapaian tujuan 'Terwujudnya *Good Governance* dan *Whole of Government*'. Tujuan ini memiliki dua sasaran yang keduanya didukung oleh kinerja sekretariat daerah yaitu 'Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang Smart, Bersih, dan Akuntabel' serta 'Terwujudnya Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pihak Lainnya dalam Pembangunan yang Sinergis dan Integratif'. Sasaran pertama diukur oleh ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi dan sasaran kedua diukur oleh Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah.

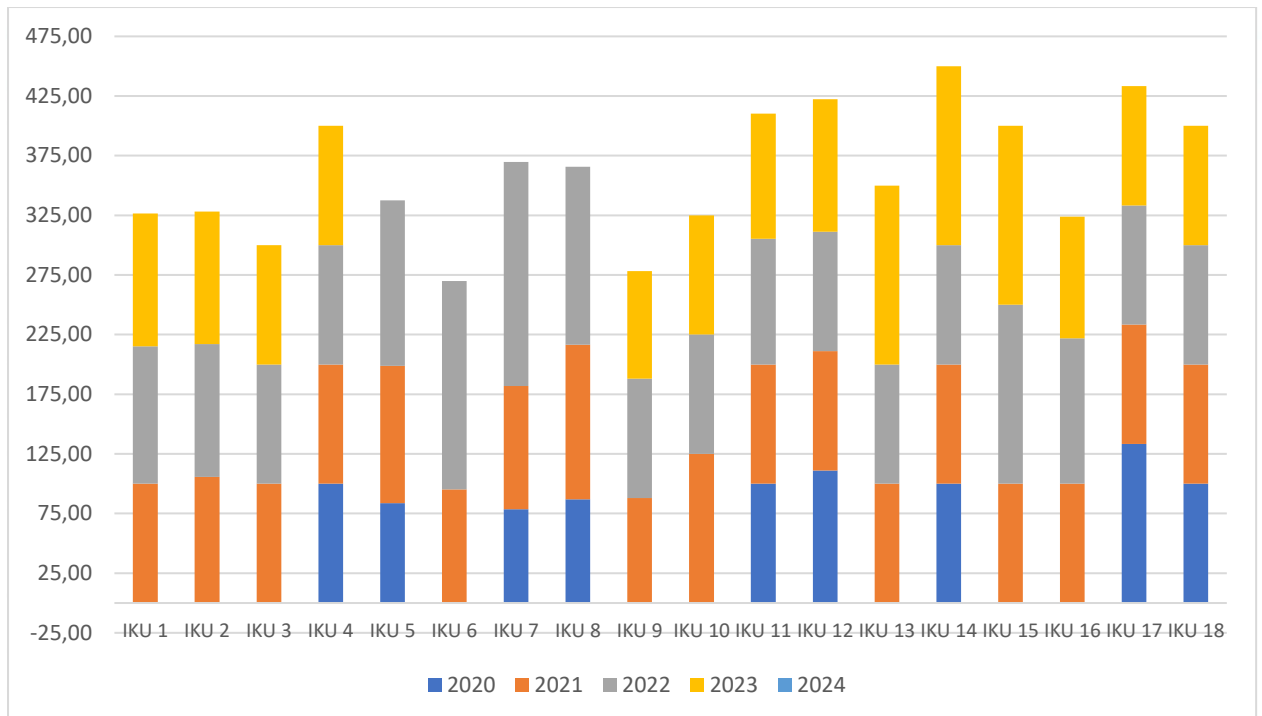
Ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas, diterjemahkan ke dalam enam sasaran strategis yang diukur oleh 18 indikator kinerja utama. Sasaran-sasaran strategis tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh sekretariat daerah selaras dengan visi dan misi Provinsi Jawa Barat. Sedangkan indikator kinerja utama yang ditetapkan selain berfungsi sebagai alat ukur pencapaian sasaran namun juga menggambarkan fungsi masing-masing biro.

Gambar 2.5. Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024



E1FA443D9A





Sumber: LKIP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 s.d. 2024, diolah

18 indikator kinerja utama ini mengalami perubahan sepanjang periode 2020-2024. Dari total jumlah indikator kinerja utama Setda, 50% ditetapkan mulai tahun 2020 sementara 50% lainnya ditetapkan mulai tahun 2021. Adapun latar belakang perubahan ini adalah upaya adaptasi pasca Covid 19 serta penerapan perubahan struktur dan nomenklatur tugas pokok serta fungsi.

Selama periode tahun perencanaan 2020 s.d. 2023, terdapat empat IKU yang memiliki ketercapaian kinerja secara stabil yaitu 100%. Kemudian terdapat peningkatan kinerja pada sepuluh IKU di tahun 2022 dan satu penurunan kinerja. Sementara di tahun 2023 terdapat peningkatan kinerja pada tiga IKU, penurunan pada empat IKU, stabilitas kinerja pada tujuh IKU, dan empat IKU tanpa ketercapaian yaitu indikator-indikator kinerja yang mengacu kepada komponen pembangun reformasi birokrasi.

'Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan' (IKU1) merupakan kinerja Setda yang mendukung ketercapaian Misi 1 pada indikator pembangunan 'Indeks Kerukunan Umat Beragama' (IKUB). Dalam periode tahun 2020-2024, nilai IKUB Jawa Barat terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,75% (2020: 68,5%; 2021: 70,52; 2022: 72,21; 2023: 74,1; 2024: 73,43). Peningkatan ini sejalan dengan konsistensi ketercapaian kinerja Setda pada IKU1 dengan target meningkat setiap tahun dari 2020-2023 dan rata-rata ketercapaian 108%. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara kebijakan keagamaan yang dirumuskan dan



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



diimplementasikan oleh Setda terhadap tingkat kerukunan baik antar maupun intra agama di Jawa Barat.

Selanjutnya, 'Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis' (IKU2) merupakan kinerja Setda yang mendukung ketercapaian Misi 3 pada indikator pembangunan 'Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru'. Pada kurun waktu tahun 2020-2023, Jawa Barat telah mengusulkan sembilan calon daerah otonomi baru yang akan mendorong terhadap peningkatan pemerataan pembangunan. Kondisi ini didorong oleh keberhasilan Setda dalam melakukan pembinaan, pendampingan, koordinasi, dan analisis pemenuhan persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah kepada kabupaten/kota. Sehingga kelayakan dapat dipenuhi, disetujui oleh seluruh pihak (eksekutif, legislatif, dan masyarakat) dan diusulkan kepada pemerintah pusat.

Kemudian, IKU3-IKU17 merupakan kinerja Setda yang mendukung ketercapaian Misi 5 pada indikator pembangunan 'Indeks Reformasi Birokrasi'. 'Nilai Manajemen Perubahan', 'Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi', 'Nilai Penataan Tatalaksana', serta 'Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik' merupakan empat diantara lima komponen pembangun reformasi birokrasi yang berada dalam ruang lingkup kinerja Setda. Keempat indikator ini menunjukkan peningkatan kinerja pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hasil kinerja diperoleh melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan reformasi birokrasi yang disampaikan oleh Kementerian PANRB. Namun, pada tahun 2023, LHE tersebut tidak mencantumkan hasil evaluasi per komponen. Sehingga data realisasi tidak dapat diperoleh.

Selanjutnya, untuk IKU 'Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah' terjadi penurunan kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidaktercapaian target kinerja sebesar 90 poin terealisasi 81,08 poin menyebabkan capaian kinerja sebesar 90,09%. Capaian ini disebabkan oleh adanya penurunan pemanfaatan SIRUP yang diperlihatkan dari hasil penilaian 10 poin di tahun 2022 menjadi 9,92 poin di tahun 2023.

Sementara itu penurunan kinerja pada IKU 'Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti' didorong oleh gap antara realisasi dan target yang lebih besar jika dibanding dengan kinerja sebelumnya. Pada tahun 2022, kinerja ditargetkan tercapai 80% dan terealisasi 97,55% menghasilkan capaian kinerja sebesar 121,94%. Sementara pada tahun 2023, kinerja ditargetkan sebesar 98,05% dapat direalisasikan sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 101,99%.



E1FA443D9A



Meski mengalami beberapa tantangan seperti keharusan dilakukannya perubahan sasaran dan indikator kinerja yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dan nomenklatur, namun sekretariat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Baik itu dalam bentuk layanan administrasi, pendampingan, pengendalian, maupun fasilitasi koordinasi. Hal ini diperlihatkan dari rata-rata capaian kinerja sekretariat daerah dalam lima tahun tersebut sebesar 106,36%.

Selanjutnya, pada masa perencanaan transisi pemerintahan, merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, kinerja sekretariat daerah mendukung pencapaian tujuan 'Terciptanya Demokrasi dan Birokrasi yang Berkualitas dan Didukung Oleh Inovasi Daerah' dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Penjabarannya pada sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 kepada satu sasaran yaitu 'meningkatnya praktik baik reformasi birokrasi' dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi General. Reformasi Birokrasi General merupakan salah satu komponen penilaian penyelenggaraan reformasi birokrasi. Fokus terhadap komponen ini disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan peran sekretariat daerah dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Hasil kinerja tahun 2024 memperlihatkan performa yang memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 109,18% dengan target sebesar 80,75 poin dapat direalisasikan sebesar 88,16 poin. Berdasarkan laporan evaluasi KemenPANRB, dalam ruang lingkup kewenangan sekretariat daerah, ketercapaian kinerja ini didukung oleh keberadaan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi general yang telah diformalkan dengan target yang menantang dan kinerja yang terus meningkat, akuntabilitas kinerja yang semakin memuaskan, ITKP yang meningkat, budaya kerja yang sehat, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Capaian kinerja ini memperlihatkan bahwa progres penyelenggaraan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada pada jalur yang benar dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi 'Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif' sebagaimana tercantum dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024.

Secara diagnostik, keberhasilan pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi General ini didorong oleh sejumlah faktor kunci yang saling memperkuat, terutama melalui penguatan peran kolaboratif perangkat daerah *leading institutions* pengampu indikator komponen indeks reformasi birokrasi. Penguatan ini terbukti mampu menghantarkan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu yang terbaik secara nasional pada sejumlah komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain Indeks Sistem



E1FA443D9A



Merit, Indeks Pelayanan SPBE, dan Opini BPK. Selain itu, komponen penting lainnya yang turut mendukung capaian RB General meliputi Indeks BerAKHLAK, Indeks Pelayanan Publik, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Tata Kelola Reformasi Birokrasi melalui SURABI. Melalui tujuh komponen utama ini, Setda berkomitmen untuk memimpin dan mengawal konsistensi arah kebijakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Lebih lanjut, peningkatan tata kelola pemerintahan juga berkontribusi terhadap capaian Indeks Inovasi Daerah sebesar 81,27 poin dengan predikat Sangat Inovatif (peringkat 3 nasional) serta Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,88 poin melampaui rata-rata nasional (3,43 point). Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah mendorong percepatan inovasi, efisiensi pelayanan, dan daya saing daerah. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi General menjadi cerminan dari efektivitas peran strategis Sekretariat Daerah dalam memimpin transformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil, serta memastikan reformasi pemerintahan berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.



E1FA443D9A



Tabel 2.3. Kinerja Utama Sekretariat Daerah Periode Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023					
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	1	Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan umum terkait pembinaan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan yang disusun dan ditetapkan	Jumlah bahan kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan yang dirumuskan / Jumlah bahan kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan yang ditindaklanjuti x 100%
2	Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan ke DPRD	2	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Indikator yang menunjukkan dilakukannya kajian terhadap usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk memastikan bahwa usulan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah yang sesuai aturan / Jumlah dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah yang diajukan x 100%
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	3	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan umum lingkup kesejahteraan rakyat yang telah disusun, ditetapkan menjadi kebijakan daerah	Jumlah bahan kebijakan umum lingkup Kesra yang dirumuskan/ Jumlah bahan kebijakan umum lingkup Kesra yang ditindaklanjuti x 100%
		4	Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan umum terkait BUMD, BLUD, investasi daerah, dan administrasi pembangunan yang disusun, ditetapkan menjadi kebijakan daerah	Jumlah kebijakan umum bidang BUMD, BLUD, Investasi dan Administrasi Pembangunan yang dirumuskan/ Jumlah kebijakan umum bidang BUMD, BLUD, Investasi dan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti x 100%



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



		5	Persentase Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan daerah berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan Jawa Barat dirumuskan, diimplementasi, dan dievaluasi	Jumlah kebijakan umum bidang perekonomian dan pembangunan yang dirumuskan/ Jumlah kebijakan umum bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti x 100%
4	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan	6	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Klasifikasi yang memperlihatkan tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ditandai dengan klasifikasi sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik, memuaskan, dan sangat memuaskan	$\text{Nilai SAKIP} = \sum_{i=1}^4 (\text{Nilai Komponen}_i \times \text{Bobot Komponen}_i)$ <p>Keterangan komponen dan bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)
		7	Nilai Manajemen Perubahan	Indikator yang menunjukan kemajuan pelaksanaan manajemen perubahan RB dalam rangka mencapai sasaran, yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi	$\text{Nilai Manajemen Perubahan} = \sum_{i=1}^4 (\text{Nilai Komponen}_i \times \text{Bobot Komponen}_i)$ <p>Keterangan komponen dan bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Reformasi Birokrasi (0,4%) 2. Road Map Reformasi Birokrasi (0,4%) 3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (0,8%) 4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (0,4%)
		8	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Indikator yang menunjukan upaya terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi Pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	$\text{Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi} = \sum_{i=1}^3 (\text{Nilai Komponen}_i \times \text{Bobot Komponen}_i)$ <p>Keterangan komponen dan bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Organisasi (1%) 2. Evaluasi Kelembagaan (1%) 3. Tindak Lanjut Evaluasi (1%)



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



	9	Nilai Penataan Tatalaksana	Indikator yang menunjukkan kemajuan pelaksanaan penataan tata laksana dalam rangka mencapai sasaran, yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance	$\text{Nilai Penataan Tata Laksana} = \sum_{i=1}^3 (\text{Nilai Komponen}_i \times \text{Bobot Komponen}_i)$ <p>Keterangan komponen dan bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (0,5%) 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (1,5%) 3. Keterbukaan Informasi Publik (0,5%)
	10	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indikator yang menunjukkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka mencapai sasaran, yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	$\text{Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik} = \sum_{i=1}^5 (\text{Nilai Komponen}_i \times \text{Bobot Komponen}_i)$ <p>Keterangan komponen dan bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan (0,4%) 2. Budaya Pelayanan Prima (0,4%) 3. Pengelolaan Pengaduan (0,6%) 4. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan (0,7%) 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,4%)
	1 1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Indikator yang memperlihatkan tingkat tata kelola pengadaan dalam level operasional sebagai salah satu pengukuran penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam aspek 'antara'. Klasifikasi ditandai dengan kategori: kurang, cukup, baik, sangat baik, dan istimewa	Nilai Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan (30%) + Nilai Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (30%) + Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ (40%)
	1 2	Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemenuhan HAM	Indikator yang menggambarkan penyelenggaraan penataan kebijakan daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta pemenuhan HAM	Jumlah Produk Perundang-undangan yang dibentuk dan disebarluaskan serta implementas HAM dibagi jumlah rancangan produk perundang-undangan yang diusulkan dan rencana implementasi HAM x 100%
	1 3	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Indikator yang menunjukkan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diklasifikasikan dalam lima tingkat yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah = ((Capaian Kinerja Makro + Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan) x 0,75) + (Perubahan Kinerja Makro x 0,25)



E1FA443D9A



		1 4	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	Indikator yang memperlihatkan penyelenggaraan tugas fasilitasi administrasi pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan undang-undang	Jumlah fasilitasi administrasi pemerintahan umum yang dipenuhi / Jumlah fasilitasi administrasi pemerintahan umum yang dibutuhkan x 100%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	1 5	Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan	Indikator yang menunjukkan tingkat kepuasan Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah) terhadap layanan yang diberikan	$\text{Nilai Kepuasan Pimpinan} = \sum_{i=1}^3 (\text{Nilai Rata} - \text{Rata per Unsur} \times \text{Nilai Rata} - \text{Rata Tertimbang})$ <p>Keterangan komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur 2. Fasilitasi Dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur 3. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur
		1 6	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan yang diterima	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
		1 7	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda	Indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
6	Meningkatnya Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 8	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	Indikator yang menggambarkan kewajiban para pihak yang dicantumkan dalam kerjasama yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pihak lain (pemda lain, instansi luar negeri, pihak ketiga) dipenuhi seluruhnya	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti / Jumlah kerjasama yang ditandatangani x 100%
Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026					



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



1	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	1	Nilai Reformasi Birokrasi General	Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan	<p>Nilai RB General = Nilai RB General Awal \pm Koefisien</p> <p>Nilai RB General Awal terdiri dari empat komponen dengan total bobot 100% yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Perencanaan RB General (15%) 2. Implementasi Kebijakan Percepatan (40%) 3. Capaian Sasaran Strategis RB (25%) 4. Soft Elemen (20%) merujuk kepada hasil SKM dan SPI <p>Koefisien merupakan faktor koreksi yang dapat menambah atau mengurangi Nilai RB General Awal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Sistem Merit 3. Temuan Auditor
---	---	---	-----------------------------------	--	---

Sumber: Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Tabel 2.4. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Kinerja Renstra Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKU 1	Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Persen	75	80	85	90	-	100	80	85	90	-	133.33	100.00	100.00	100.00	-
IKU 2	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Persen	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-
IKU 3	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	80	85	90	-	N/A	80	98	100	-	-	100.00	115.29	111.11	-
IKU 4	Persentase Perumusan Kebijakan Umum Serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMDLembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	90	90	90	-	N/A	95.25	100	100	-	-	105.83	111.11	111.11	-
IKU 5	Persentase Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	Persen	N/A	100	100	100	-	N/A	100	100	100	-	-	100.00	100.00	100.00	-
IKU 6	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Poin	A	A	A	A	-	A	A	A	A	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-
IKU 7	Nilai Manajemen Perubahan	Poin	3.88	3.45	3.55	3.65	-	3.25	3.97	4.92	N/A	-	83.76	115.07	138.59	-	-
IKU 8	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Poin	N/A	3.94	4.06	4.18	-	N/A	3.75	7.09	N/A	-	-	95.18	174.63	-	-
IKU 9	Nilai Penataan Tatalaksana	Poin	3.82	3.2	3.3	3.4	-	3	3.31	6.2	N/A	-	78.53	103.44	187.88	-	-
IKU 10	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Poin	4.39	4.06	4.18	4.3	-	3.82	5.26	6.23	N/A	-	87.02	129.56	149.04	-	-
IKU 11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Poin	N/A	70	80	90	-	N/A	61.57	80.2	81.08	-	-	87.96	100.25	90.09	-
IKU 12	Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemenuhan HAM	Persen	N/A	80	100	100	-	N/A	100	100	100	-	-	125.00	100.00	100.00	-
IKU 13	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Poin	3.31	3.329	3.344	3.354	-	3.31	3.33	3.52	3.52	-	100.00	100.03	105.26	104.95	-
IKU 14	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	Persen	90	90	90	90	-	100	90	90	100	-	111.11	100.00	100.00	111.11	-
IKU 15	Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan	Poin	N/A	Baik	Baik	Baik	-	N/A	Baik	Baik	Sangat Baik	-	-	100.00	100.00	150.00	-
IKU 16	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Poin	Baik	Baik	Baik	Baik	-	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	-	100.00	100.00	100.00	150.00	-
IKU 17	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda	Poin	N/A	B	B	B	-	N/A	B	A	A	-	-	100.00	150.00	150.00	-
IKU 18	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	80	80	98.05	-	84.12	80	97.55	100	-	-	100.00	121.94	101.99	-
IKU 19	Nilai Reformasi Birokrasi General	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	80.75	N/A	N/A	N/A	N/A	88.16	N/A	N/A	N/A	N/A	109.18

Sumber: LKIP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 s.d. 2024, diolah

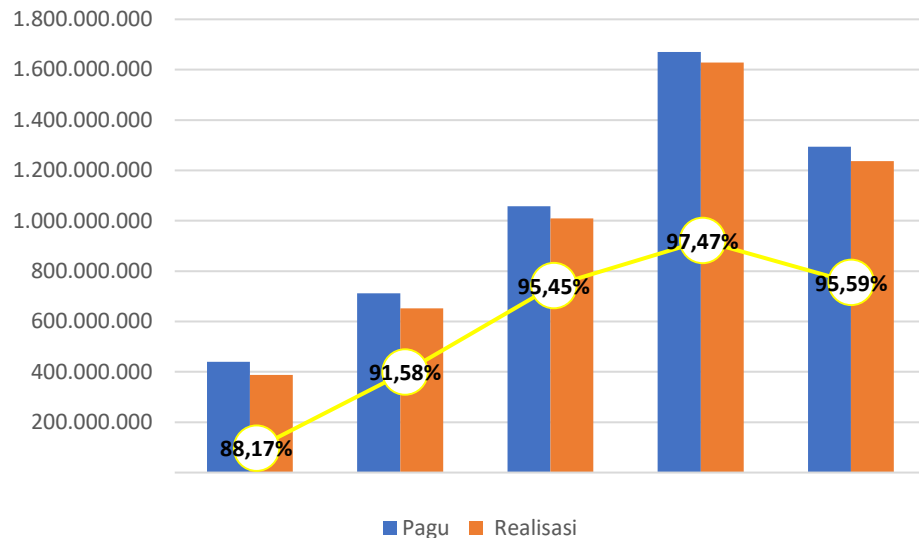


E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

2.1.3.2. Kinerja Anggaran

Gambar 2.6. Pagu, Realisasi, dan Capaian Kinerja Anggaran Setda Tahun 2020-2024



Sumber: Biro Umum, Juni 2025

Secara keseluruhan, tren pagu anggaran Setda meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dan menurun di tahun 2024. Pada tahun 2020, anggaran Setda sebesar Rp439.222.668.476,00 dan meningkat secara signifikan sebesar 62,13% seiring adanya perbaikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2021 dan pelimpahan belanja hibah yang sebelumnya dianggarkan pada perangkat daerah lain. Pada Tahun 2022 dan 2023, anggaran Setda mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 48,55% dan 57,88% dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.057.859.572.097,00 dan Rp1.670.164.158.655,00. Sedangkan pada tahun 2024 anggaran menurun 22,54% menjadi Rp.1.293.679.269.902,00.

Tingkat realisasi belanja Setda dalam lima tahun terakhir secara rata-rata berada dalam kategori baik yaitu sebesar 93,65%. Grafik realisasi belanja Setda sejalan dengan jumlah anggaran yang hampir selalu meningkat dalam periode tersebut. Realisasi belanja tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada angka Rp1.009.694.655.506,00 atau meningkat sebesar 54,82% dibandingkan realisasi belanja tahun 2021, dan meningkat menjadi 95,45% terhadap anggaran tahun 2022 yang hanya sebanyak Rp652.171.623.513,00. Tahun 2023, realisasi belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat meningkat pesat, dengan terjadinya peningkatan sebesar 61,22% dari jumlah



E1FA443D9A

realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp.1.627.864.042.657,00 (97,47%). Capaian Tahun 2023 ini merupakan capaian tertinggi realisasi anggaran selama kurun waktu 2019-2024. Realisasi anggaran pada tahun 2024, mengalami penurunan kembali yaitu hanya tercapai 95,59% dari realisasi sebesar Rp1.236.692.588.435,00, atau turun sebesar 1,88% dari capaian tahun 2023 yang mencapai 97,47%.

Tabel 2.5. Pagu dan Realisasi Anggaran Setda Tahun 2020-2024

Tahun	Pagu	Realisasi	% Capaian
2020	439,222,668,476.00	387,268,904,871.00	88.17
2021	712,129,954,435.00	652,171,623,513.00	91.58
2022	1,057,859,572,097.00	1,009,694,655,506.00	95.45
2023	1,670,164,158,655.00	1,627,864,042,657.00	97.47
2024	1,293,679,269,901.00	1,236,692,588,435.00	95.59

Sumber: Biro Umum, Juni 2025



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Program	Pagu Anggaran (dalam miliar) pada Tahun					Realisasi Anggaran (dalam miliar) pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)		BIRO
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	Pagu	Realisasi	
1	Kerja Sama Daerah	5,371	-	-	-	-	5,145	-	-	-	-	95.79	-	-	-	-	-	Pemerintahan & Kerjasama
2	Penataan Daerah	1,125	-	-	-	-	1,059	-	-	-	-	94.11	-	-	-	-	-	Pemerintahan & Kerjasama
3	Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1,390	-	-	-	-	1,146	-	-	-	-	82.48	-	-	-	-	-	Pemerintahan & Kerjasama
4	Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pemerintahan Dan Kerjasama	1,540	-	-	-	-	1,435	-	-	-	-	93.21	-	-	-	-	-	Pemerintahan & Kerjasama
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	464	-	-	-	-	423	-	-	-	-	91.22	-	-	-	-	-	Pemerintahan & Kerjasama
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	697	1,066	2,303	1,734	-	665	1,033	1,849	1,548	-	95.38	96.93	80.29	0.55	0.60	Pemerintahan & Otda
7	Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	-	5,027	27,246	23,101	19,086	-	4,851	25,446	21,985	16,716	-	96.49	93.39	95.17	0.47	0.47	Pemerintahan & Otda
8	Bantuan Hukum Dan Ham	2,627	-	-	-	-	2,506	-	-	-	-	95.41	-	-	-	-	-	Hukum & HAM
9	Dokumentasi Hukum, Pembinaan, Pengawasan Produk Hukum	2,754	-	-	-	-	2,694	-	-	-	-	97.84	-	-	-	-	-	Hukum & HAM
10	Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia	1,493	-	-	-	-	1,450	-	-	-	-	97.09	-	-	-	-	-	Hukum & HAM
11	Perundang-Undangan Daerah Provinsi	1,742	-	-	-	-	1,647	-	-	-	-	94.57	-	-	-	-	-	Hukum & HAM
12	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	1,365	2,040	1,765	1,863	-	1,362	2,013	1,763	1,861	-	99.79	98.67	99.90	0.88	0.88	Hukum & HAM
13	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	-	5,077	6,333	6,391	4,657	-	4,983	6,086	6,258	4,627	-	98.15	96.09	97.92	0.89	0.89	Hukum & HAM
14	Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pelayanan Dan Pengembangan Sosial	3,053	-	-	-	-	3,014	-	-	-	-	98.72	-	-	-	-	-	Pelayanan & Pengembangan Sosial
15	Pelayanan Sosial	1,690	-	-	-	-	1,656	-	-	-	-	97.99	-	-	-	-	-	Pelayanan & Pengembangan Sosial
16	Pembinaan, Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan	11,114	-	-	-	-	10,436	-	-	-	-	93.90	-	-	-	-	-	Pelayanan & Pengembangan Sosial
17	Penanggulangan Masalah Dan Pemberdayaan Sosial	1,374	-	-	-	-	1,340	-	-	-	-	97.47	-	-	-	-	-	Pelayanan & Pengembangan Sosial
18	Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	1,556	-	-	-	-	1,465	-	-	-	-	94.20	-	-	-	-	-	Pelayanan & Pengembangan Sosial
19	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	4,100	4,553	5,818	10,056	-	3,492	4,323	5,398	6,217	-	85.18	94.95	92.78	0.84	0.80	Kesejahteraan Rakyat
20	Kesejahteraan Rakyat	-	301,229	570,572	1,101,122	791,804	-	256,087	539,050	1,079,907	760,845	-	85.01	94.48	98.07	0.52	0.49	Kesejahteraan Rakyat
21	Bumd Lembaga Keuangan	464	-	-	-	-	411	-	-	-	-	88.47	-	-	-	-	-	BUMD & Investasi
22	Bumd Non Lembaga Keuangan	704	-	-	-	-	685	-	-	-	-	97.26	-	-	-	-	-	BUMD & Investasi
23	Dukungan Manajemen Perkantoran Biro BumD Dan Investasi	1,252	-	-	-	-	1,196	-	-	-	-	95.53	-	-	-	-	-	BUMD & Investasi
24	Investasi Daerah	571	-	-	-	-	533	-	-	-	-	93.42	-	-	-	-	-	BUMD & Investasi
25	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	1,015	2,076	2,383	2,290	-	972	1,989	2,178	2,192	-	95.68	95.81	91.37	0.65	0.67	BUMD & Investasi
26	Perekonomian Dan Pembangunan	-	2,809	4,965	4,255	5,059	-	2,706	4,752	3,851	4,496	-	96.31	95.71	90.51	0.81	0.84	BUMD & Administrasi Pembangunan
27	Kebijakan Administrasi Pembangunan	-	-	798	759	380	-	-	778	758	331	-	-	97.52	99.82	-	-	BUMD & Administrasi Pembangunan
28	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Ketahanan Pangan Dan Pertanian	248	-	-	-	-	247	-	-	-	-	99.55	-	-	-	-	-	Perekonomian
29	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Sarana Perekonomian	216	-	-	-	-	214	-	-	-	-	99.20	-	-	-	-	-	Perekonomian
30	Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Perekonomian	1,204	-	-	-	-	1,174	-	-	-	-	97.48	-	-	-	-	-	Perekonomian
31	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Sumber Daya Alam	150	-	-	-	-	150	-	-	-	-	99.93	-	-	-	-	-	Perekonomian
32	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	2,103	6,732	6,067	4,266	-	1,892	5,888	5,810	4,248	-	89.95	87.46	95.77	0.59	0.57	Perekonomian
33	Perekonomian Dan Pembangunan	-	540	2,542	7,257	6,323	-	534	2,281	6,874	5,904	-	98.97	89.75	94.73	0.27	0.28	Perekonomian
34	Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pengadaan Barang/Jasa	1,826	-	-	-	-	1,648	-	-	-	-	90.25	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang/Jasa
39	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	1,768	-	-	-	-	1,715	-	-	-	-	97.03	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang/Jasa



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

No	Program	Pagu Anggaran (dalam miliar) pada Tahun					Realisasi Anggaran (dalam miliar) pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)		BIRO
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	Pagu	Realisasi	
40	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	234	-	-	-	-	218	-	-	-	-	93.14	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang/Jasa
41	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	435	-	-	-	-	390	-	-	-	-	89.62	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang/Jasa
42	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	1,645	2,458	2,125	3,590	-	1,315	2,286	1,944	2,802	-	79.95	93.00	91.50	0.88	0.82	Pengadaan Barang dan Jasa
43	Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	-	3,611	4,085	7,374	5,088	-	3,266	3,915	6,948	4,423	-	90.45	95.84	94.21	0.70	0.69	Pengadaan Barang dan Jasa
44	Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Organisasi	1,823	-	-	-	-	1,773	-	-	-	-	97.25	-	-	-	-	-	Organisasi
45	Pengembangan Ketatalaksanaan	153	-	-	-	-	153	-	-	-	-	99.88	-	-	-	-	-	Organisasi
46	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	278	-	-	-	-	276	-	-	-	-	99.04	-	-	-	-	-	Organisasi
47	Peningkatan Pelayanan Publik	509	-	-	-	-	508	-	-	-	-	99.91	-	-	-	-	-	Organisasi
48	Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	504	-	-	-	-	476	-	-	-	-	94.45	-	-	-	-	-	Organisasi
49	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	1,068	1,918	1,392	1,155	-	1,067	1,894	1,388	1,154	-	99.98	98.73	99.71	0.88	0.88	Organisasi
50	Penataan Organisasi	-	3,449	2,845	3,704	2,549	-	3,408	2,754	3,702	2,549	-	98.80	96.81	99.93	0.96	0.96	Organisasi
51	Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	1,885	-	-	-	-	1,792	-	-	-	-	95.05	-	-	-	-	-	Humas & Keprotokolan
52	Pengelolaan Informasi, Media Dan Hubungan Antar Lembaga	11,322	-	-	-	-	10,745	-	-	-	-	94.91	-	-	-	-	-	Humas & Keprotokolan
53	Pengelolaan Publikasi Dan Dokumentasi	21,961	-	-	-	-	21,018	-	-	-	-	95.71	-	-	-	-	-	Humas & Keprotokolan
54	Penyelenggaraan Keprotokolan Di Pemerintah Daerah	8,604	-	-	-	-	7,658	-	-	-	-	89.00	-	-	-	-	-	Humas & Keprotokolan
55	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	56,918	60,045	58,386	39,531	-	55,314	59,134	57,518	39,366	-	97.18	98.48	98.51	0.99	0.98	Administrasi Pimpinan
56	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah	19,895	-	-	-	-	17,688	-	-	-	-	88.90	-	-	-	-	-	Umum
57	Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Umum	149,546	-	-	-	-	144,497	-	-	-	-	96.62	-	-	-	-	-	Umum
58	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	132,249	145,450	212,590	171,662	-	128,423	137,789	205,678	167,306	-	97.11	94.73	96.75	0.79	0.79	Umum
	Total Anggaran Program	262,847	522,904	845,726	1,446,792	1,071,095	250,583	470,337	801,412	1,413,810	1,026,583	95.33	89.95	94.76	97.72	0.37	0.34	
	Belanja Pegawai	176,376	189,226	212,134	223,372	222,585	136,685	181,835	208,283	214,054	210,110	77.50	96.09	98.18	95.83	0.62	0.59	
	Total Anggaran	439,223	712,130	1,057,860	1,670,164	1,293,679	387,269	652,172	1,009,695	1,627,864	1,236,693	88.17	91.58	95.45	97.47	0.42	0.16	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024, diolah.



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

2.1.3.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain sebagai alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, IKK juga dapat digunakan untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, menjadi dasar dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EKPPD), dan mendukung penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). Dengan demikian, IKK digunakan dalam penyusunan LPPD, pelaksanaan EKPPD, monitoring capaian kinerja daerah, serta sinkronisasi kinerja pusat dan daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020, IKK yang digunakan untuk mengukur kinerja sekretariat daerah difokuskan pada kinerja penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. IKK untuk urusan ini dirancang untuk mengukur efektivitas dan efisiensi proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.7. Realisasi IKK Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No.	IKK Outcome	Rumus	Realisasi Kinerja Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembayarannya}}{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar}}$	0	2	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Total belanja operasi dan modal}}$	57,43	10,55	1,61	77,18	32,69
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}}$	60,21	5,46	50,26	35,57	61,27
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi}}{\text{Jumlah nilai PBJ}}$	-	-61,54	-18,54	177,56	13,62

Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Juli 2025

Hasil evaluasi atas IKK setiap tahunnya tidak dapat menginformasikan tren kenaikan atau penurunan kinerja. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, terutama adanya perbedaan jenis data yang dibutuhkan, periode pengumpulan data, dan yang lainnya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.



E1FA443D9A



2.1.3.4. Kelompok Sasaran

Sekretariat Daerah merupakan unit kerja unsur penunjang yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, secara umum kelompok sasaran kinerja pelayanan sekretariat daerah adalah perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Namun di beberapa area tugas dan fungsi lain, kelompok sasaran sekretariat daerah adalah masyarakat umum seperti dalam layanan pemberian hibah, layanan fasilitasi penerimaan surat, fasilitasi bantuan hukum, serta fasilitasi kebijakan BUMD. Disamping itu, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas GWPP, kelompok sasaran sekretariat daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk layanan pembinaan dan evaluasi. Secara lebih terinci tabel 2.7 memperlihatkan kelompok sasaran pada masing-masing biro.

Tabel 2.8. Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran	Biro
1	Fasilitasi Penyusunan Kerjasama Daerah	PD Provinsi Jawa Barat	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2	Fasilitasi penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah Wakil Kepala Daerah, ASN, Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemda Kab/Kota	PD Provinsi Jawa Barat, Pemda Kab/Kota	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota	PD Provinsi Jawa Barat, Pemda Kab/Kota	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	Fasilitasi Usulan Nama Rupabumi	PD Provinsi Jawa Barat, Pemda Kab/Kota	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5	Fasilitasi Usulan Perubahan Penegasan Batas Wilayah	PD Provinsi Jawa Barat, Pemda Kab/Kota	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
6	Fasilitasi Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum	PD Provinsi Jawa Barat, Pemda Kab/Kota	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7	Fasilitasi Usulan Penataan Desa	PD Provinsi Jawa Barat, Pemda Kab/Kota	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
8	Fasilitasi Aspirasi Masyarakat terhadap Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Masyarakat, PD Provinsi Jawa Barat	Biro Hukum
9	Sistem Database Bantuan Hukum Daerah (SIDBANKUMDA)	Masyarakat	Biro Hukum
10	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Provinsi	Masyarakat, PD Provinsi Jawa Barat	Biro Hukum
11	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Pemda Kab/Kota	Pemda Kab/Kota	Biro Hukum
12	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Masyarakat, PD Provinsi Jawa Barat	Biro Hukum



E1FA443D9A



No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran	Biro
13	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan rakyat	PD Provinsi Jawa Barat	Biro Kesejahteraan Rakyat
14	Pelayanan Usulan Bantuan Hibah Keagamaan	Lembaga Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, instansi vertikal	Biro Kesejahteraan Rakyat
15	Fasilitasi Perencanaan, Perumusan, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Umum Daerah Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	PD Provinsi Jawa Barat sektor ekonomi dan infrastruktur, Biro BUMD, Investasi dan Pembanbangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Perekonomian
16	Fasilitasi Pengendalian Inflasi	Pemda Kab/Kota, Masyarakat	Biro Perekonomian
17	Informasi data BUMD	Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah, Bappeda, BPKAD	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
18	Fasilitasi penilaian kelayakan BLUD	PD Provinsi Jawa Barat	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
19	Fasilitasi Kebijakan dan Pembinaan BUMD	BUMD Provinsi Jawa Barat	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
20	Penyampaian Laporan capaian kinerja PD Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Daerah	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
21	Fasilitasi Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMD	BUMD Provinsi Jawa Barat	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
22	Fasilitasi dan analisis rencana penyertaan modal kepada BUMD	BUMD Provinsi Jawa Barat	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
23	Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama BLUD	BLUD Provinsi Jawa Barat	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
24	Informasi Data Pelaku Usaha (SPSE)	PD Provinsi Jawa Barat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
25	Perubahan Data (SPSE)	PD Provinsi Jawa Barat & Penyedia	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
26	Perubahan Email (SPSE)	PD Provinsi Jawa Barat & Penyedia	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
27	Pelatihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	PD Provinsi Jawa Barat & Penyedia	Biro Pengadaan Barang dan Jasa



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai 57 Sar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran	Biro
28	Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	PD Provinsi Jawa Barat & Penyedia	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
29	Data dan Informasi (Pengadaan Barang dan Jasa, RUP)	PD Provinsi Jawa Barat & Penyedia	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
30	Pelayanan Katalog Elektronik (Penayangan Paket, Tata Cara Pengadaan dan Pembuatan Akun Katalog)	PD Provinsi Jawa Barat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
31	Pelayanan Katalog Elektronik (Tata Cara Pengadaan dan Pembuatan Akun Katalog)	Penyedia	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
32	Konsultansi Pengadaan Barang Impor	PD Provinsi Jawa Barat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
33	Konsultansi Progres Produk dalam Negeri	PD Provinsi Jawa Barat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
34	Konsultansi Progres Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	PD Provinsi Jawa Barat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
35	Fasilitasi Penataan Kelembagaan PD Provinsi Jawa Barat	PD Provinsi Jawa Barat Provinsi, Pemda Kab/Kota	Biro Organisasi
36	Fasilitasi pendampingan/Advokasi Reformasi Birokrasi	PD Provinsi Jawa Barat Provinsi, Pemda Kab/Kota	Biro Organisasi
37	Fasilitasi Penilaian Maturitas Kelembagaan Kabupaten/Kota	Pemda Kab/Kota	Biro Organisasi
38	Fasilitasi pembinaan Pelayanan Publik	PD Provinsi Jawa Barat Provinsi dan Pemda Kab/Kota	Biro Organisasi
39	Fasilitasi pendampingan/Advokasi Budaya Kerja	PD Provinsi Jawa Barat Provinsi dan Pemda Kab/Kota	Biro Organisasi
40	Fasilitasi pendampingan/Advokasi SAKIP Pemda Kab/Kota	Pemda Kab/Kota	Biro Organisasi
41	Fasilitasi Pembinaan Tata Laksana Pemerintah Pemda Kab/Kota (Tata Hubungan Kerja, Penyusunan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP)	Pemda Kab/Kota	Biro Organisasi
42	Permohonan data dan informasi publik	Masyarakat	Biro Organisasi
43	Fasilitasi Keprotokolan	Gubernur dan Wakil Gubernur serta PD Provinsi Jawa Barat	Biro Administrasi Pimpinan
44	Supernetworking Protokol	Kelompok pendidikan (SMA, Universitas, dan Pesantren)	Biro Administrasi Pimpinan
45	Fasilitasi Kerumahtangaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gubernur dan Wakil Gubernur	Biro Administrasi Pimpinan
46	Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan	Gubernur dan Wakil Gubernur	Biro Administrasi Pimpinan
47	Fasilitasi Penyiapan Materi Pimpinan	Gubernur dan Wakil Gubernur	Biro Administrasi Pimpinan
48	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Gubernur dan Wakil Gubernur	Biro Administrasi Pimpinan



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



No	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran	Biro
49	Penyampaian Informasi Seputar Program Prioritas/Strategis termasuk Kebijakan Gubernur/Wakil Gubernur	Masyarakat	Biro Administrasi Pimpinan
50	Pelayanan Aspirasi Langsung Masyarakat kepada Pimpinan melalui Mapag Jabar Istimewa	Masyarakat	Biro Administrasi Pimpinan
51	Fasilitas Layanan Kepegawaian	ASN lingkup Sekretariat Daerah	Biro Umum
52	Fasilitasi Layanan Persuratan	Masyarakat umum & Biro-biro lingkup Setda Jabar	Biro Umum
53	Fasilitasi Layanan Kearsipan	Biro-biro lingkup Setda jabar	Biro Umum
54	Fasilitasi Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Biro-biro lingkup Setda jabar	Biro Umum
55	Layanan Museum Ged. Sate	Masyarakat	Biro Umum
56	Layanan Fasilitasi Sarana Olahraga (Gasibu & GOR Saparua)	Masyarakat	Biro Umum

Sumber: Biro pada Sekretariat Daerah, Maret 2025

2.1.3.5. Dukungan BUMD

BUMD Provinsi Jawa Barat merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014, pembentukan BUMD dilakukan dengan pertimbangan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan kemanfaatan umum yaitu penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi masyarakat, serta memperoleh laba. Saat ini, jumlah BUMD yang tercatat adalah sebanyak 37 perusahaan yang 97% telah berstatus perusahaan perseroan daerah.

Secara garis besar, BUMD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu BUMD lembaga keuangan (LK) dan BUMD non lembaga keuangan (NLK). BUMD LK saat ini berjumlah 28 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan bergerak di bidang perbankan, satu perusahaan bergerak di bidang penjaminan, dan 14 perusahaan merupakan lembaga keuangan mikro. Sedangkan BUMD NLK berjumlah sepuluh perusahaan yang bergerak di industri pertanian, pariwisata, infrastruktur, properti, asuransi, makanan dan minuman, transportasi, serta minyak dan gas bumi.



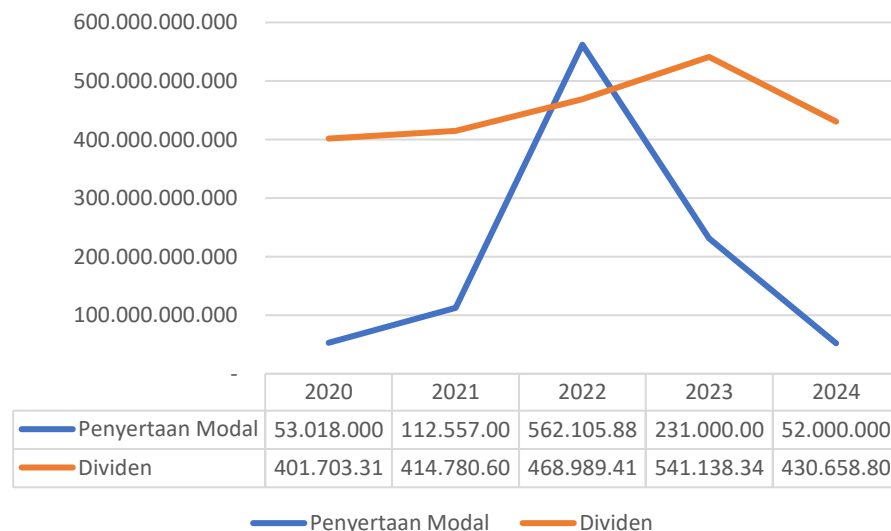
E1FA443D9A



Tiga BUMD diberikan penugasan untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan tertentu. PT Agro Jabar memperoleh penugasan untuk melakukan pengelolaan pusat distribusi provinsi untuk mendukung pengendalian inflasi. PT Jasa dan Kepariwisata Jabar memperoleh amanat penugasan dalam pengelolaan aset provinsi sebagai pengelola Pondok Seni Pangandaran, pengelola Pasar Kreatif Jawa Barat, dan pengelola Kawasan Wisata Waduk Darma. Selanjutnya PT Jasa Sarana memperoleh penugasan dalam memberikan manfaat khusus sebagai pihak yang melakukan pengusahaan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional (TPPAS) Nambo dan pengelola BRT Metro Trans Jabar.

Penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada BUMD secara total dari tahun 2019-2024 adalah sebesar Rp1,04 triliun. Kontribusi dividen BUMD terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat dalam periode yang sama secara total adalah sebesar Rp2,64 triliun.

Gambar 2.7. Penyertaan Modal dan Dividen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Biro BUMD, Investasi, dan Adbang, Agustus 2025

Untuk memastikan bahwa keberadaan BUMD mencapai tujuan pembentukannya, sekretariat daerah diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengaturan melalui penerbitan kebijakan daerah. Pembinaan terhadap BUMD dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *good corporate governance* dan memastikan perusahaan dalam kondisi sehat

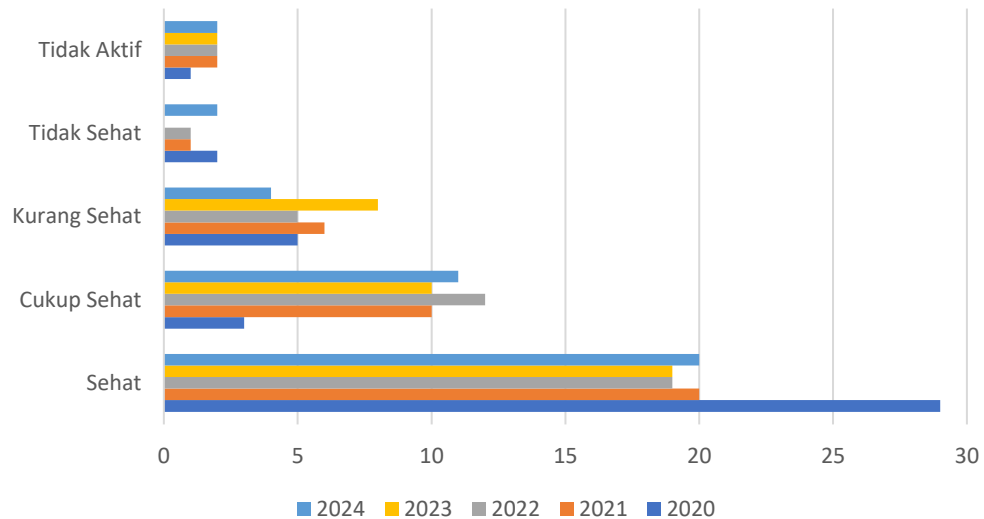


E1FA443D9A



untuk beroperasi. Berdasarkan data terakhir di tahun 2024, 18 BUMD dikategorikan 'Sehat', 11 BUMD dikategorikan 'Cukup Sehat', enam BUMD dikategorikan 'Tidak Sehat', dan dua BUMD tidak aktif.

Gambar 2.8. Status BUMD dalam Periode Tahun 2020-2024



Sumber: Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan, Agustus 2025.

2.1.3.6. Pelaksanaan Kerja sama Daerah

Kerja sama daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selain sebagai unit kerja yang memberikan fasilitasi penyusunan dan penandatanganan naskah kerja sama daerah, sekretariat daerah juga mendapatkan amanat untuk menangani beberapa urusan yang dikolaborasikan. Dari tahun 2020 terdapat 154 kerja sama yang menjadi tanggung jawab sekretariat daerah serta satu indikasi kerja sama yang akan dilaksanakan di tahun 2026.

Kerja sama yang menjadi kewenangan sekretariat daerah meliputi pemanfaatan data dan informasi geospasial, pengelolaan batas daerah, program magang dan praktik kerja, tri dharma perguruan tinggi, paralegal desa, dan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Kolaborasi ini dilaksanakan bersama Badan Informasi Geospasial (lembaga pusat), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, perguruan tinggi dalam dan luar Jawa Barat, serta lembaga bantuan

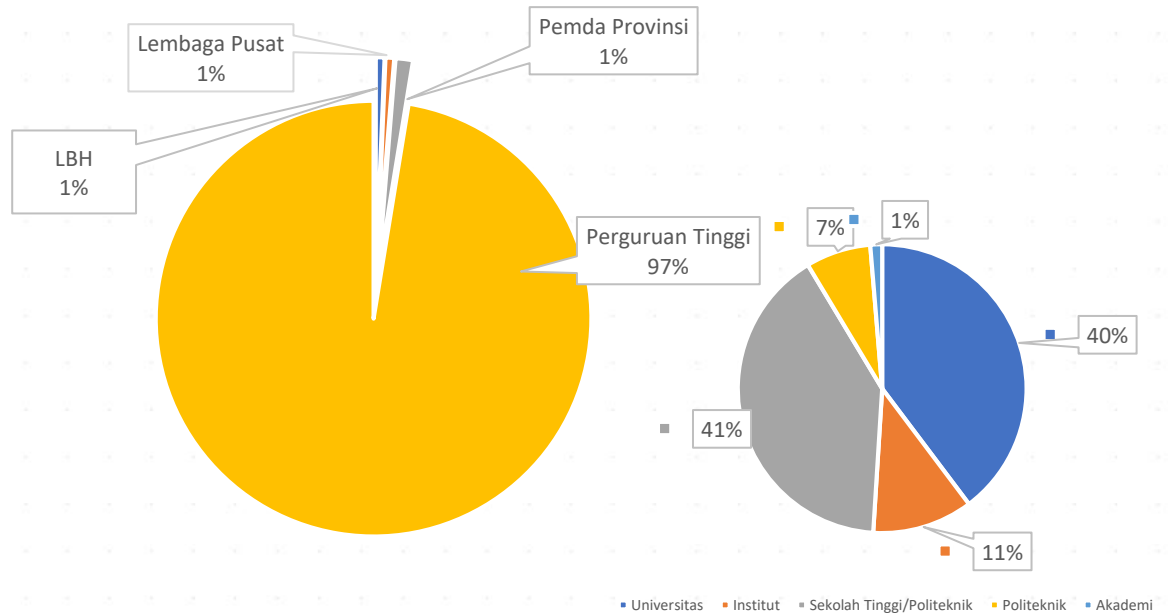


E1FA443D9A



hukum. Adapun para pelaksana kolaborasi ini adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum dan HAM, serta Biro Kesejahteraan Rakyat.

Gambar 2.9. Kerja sama Daerah yang Didukung Setda



Sumber: Biro pada Sekretariat Daerah, Maret 2025

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

Tabel 2.9. Identifikasi Permasalahan Sekretariat Daerah

RPJMN	Grand Design RB	RPJMD	KLHS RPJMD	Hasil Penjarangan dan Evaluasi Kinerja
Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Netralitas ASN dalam konstelasi politik	Sistem tata kelola pemerintahan belum terpadu	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) masih belum mencapai target	Struktur dan proses organisasi masih memiliki kelemahan



E1FA443D9A



RPJMN	Grand Design RB	RPJMD	KLHS RPJMD	Hasil Penjaringan dan Evaluasi Kinerja
	Integritas birokrat yang rendah	Sistem akuntabilitas pemerintahan daerah yang belum terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha masih belum mencapai target	Pelaporan kinerja belum cukup dimanfaatkan dalam perencanaan
	Patronase politik yang menghasilkan misalokasi urusan-urusan publik dan tekanan pada birokrasi	Kapasitas birokrasi yang belum adaptif dan responsif terhadap dinamika global dan tuntutan masyarakat		Kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih memerlukan perbaikan
	Daya saing ASN	Masih terbatasnya kolaborasi intensif antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta		Kualitas kebijakan Setda masih perlu ditingkatkan
				Kualitas regulasi daerah masih belum cukup adaptif dan harmonis
				Kepatuhan terhadap pemanfaatan SPSE dan kompetensi SDM PBJ belum memenuhi
				Koordinasi lintas sektor serta dengan perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan
				Tata kelola internal belum optimal



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, Sosialisasi Grand Design RB Nasional (GDRBN) Tahun 2025-2045, RPJMD Jawa Barat Tahun 2025-2029, KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, dan FGD Identifikasi Masalah Setda September 2024

Sebagai unsur pendukung kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Setda memegang peranan strategis dalam memastikan kelancaran koordinasi antar perangkat daerah serta penyusunan kebijakan yang efektif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Setda kerap menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Setda dapat memberikan landasan yang jelas dalam penyusunan strategi perbaikan ke depan.

Permasalahan pertama yang teridentifikasi bersumber dari RPJMN Tahun 2025-2029. Bab I pada Lampiran 1 menguraikan tujuh tantangan pembangunan dan yang berkaitan dengan kinerja Setda adalah tata kelola dan akuntabilitas pemerintah. Secara khusus disampaikan bahwa permasalahan yang diangkat adalah tata kelola data sebagai komponen kunci yang mendukung pembangunan nasional terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan.

Permasalahan kedua yang teridentifikasi bersumber dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yaitu tentang belum optimalnya penyelenggaraan layanan pemerintahan. Lebih fokus pada sistem manajemen pelayanan publik yang dinilai belum mampu mendorong perubahan profesional para penyedia pelayanan. Permasalahan lainnya adalah tentang kapasitas birokrasi yang belum mampu adaptif dan responsif terhadap dinamika global dan tuntutan masyarakat. Dua fokus permasalahan tersebut diidentifikasi berasal dari sistem tata kelola pemerintahan yang belum terpadu, sistem akuntabilitas pemerintahan daerah yang belum terpadu antara provinsi dengan kabupaten/kota, serta masih terbatasnya kolaborasi intensif antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

Identifikasi permasalahan ketiga bersumber dari KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Secara spesifik, kinerja Setda mendukung ketercapaian TPB 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh serta TPB 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Target TPB 16 adalah mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Permasalahan yang berkaitan dengan target tersebut adalah persentase peningkatan SAKIP masih belum mencapai target. Sementara pada target TPB 17 yaitu mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama permasalahan yang diangkat adalah jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema KPBU masih belum mencapai target.

Identifikasi permasalahan selanjutnya bersumber dari hasil evaluasi kinerja serta penjaringan aspirasi baik dari stakeholder eksternal



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



maupun internal Setda. Jika dilihat dari capaian IKU selama lima tahun terakhir, kinerja Setda sangat memuaskan. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas kelembagaan secara menyeluruh. Beberapa tantangan strategis masih menghambat optimalisasi peran Setda sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Berikut penjelasan sejumlah aspek yang memerlukan perhatian serius untuk dioptimalkan, salah satu tantangan utama diantaranya adalah kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Setda dalam mendukung pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Proses perumusan kebijakan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan terverifikasi, serta perlu distandardisasi pada seluruh level kebijakan dan dipastikan keterpenuhannya di seluruh perangkat daerah. Di sisi lain, evaluasi implementasi kebijakan yang selama ini bersifat administratif perlu ditransformasi menjadi evaluasi yang menghasilkan rekomendasi konkret, berorientasi perubahan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kondisi masyarakat.

Koordinasi lintas sektor juga masih menjadi tantangan tersendiri. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan program-program lintas sektor belum optimal. Keterpaduan dan sinergi antarsektor masih perlu diperkuat, khususnya dalam program prioritas, strategis, dan unggulan daerah yang memerlukan kolaborasi erat antarperangkat daerah.

Merujuk kepada permasalahan yang disoroti oleh RPJMN, RPJMD, dan KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan adalah pemastian kualitas penyelenggaraannya berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan. Dalam konsep *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2045, reformasi birokrasi diarahkan sebagai sarana perbaikan yang tidak hanya berfokus pada tata kelola internal tetapi juga mendorong dihasilkannya *outcome* pembangunan yang dirasakan nyata oleh masyarakat. Beberapa permasalahan yang disoroti adalah netralitas ASN dalam konstelasi politik dan integritas birokrat yang rendah, patronase politik yang menghasilkan misalokasi urusan-urusan publik dan tekanan pada birokrasi, serta daya saing ASN dengan fokus terhadap ketidakmerataan tingkat pendidikan ASN dan kompetensi digital yang belum memenuhi.

Kualitas tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat, meski memperoleh hasil evaluasi yang memuaskan namun masih dirasa belum sempurna. Kualitas implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah belum seluruhnya memuaskan. Hal ini berarti bahwa belum seluruh perangkat daerah memenuhi kriteria birokrasi yang bersih, efektif, berdaya saing (melalui percepatan transformasi digital), dan membangun budaya berAKHLAK. Sehingga belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.



E1FA443D9A



Kemudian untuk mewujudkan birokrasi yang fokus dalam memberikan perubahan kepada masyarakat, kelembagaan yang *agile* menjadi salah satu yang perlu diwujudkan. Saat ini, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai efektif baik dari sisi struktur maupun proses organisasi. Bahwa kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mampu mengakomodir kebutuhan internal dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika lingkungan eksternal. Namun demikian, masih perlu dilakukan tindakan korektif secara sistematis. Beberapa kelemahan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat seperti inkonsistensi antara nomenklatur unit kerja dengan tugasnya serta proses bisnis dan SOP yang masih perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi terkini.

Sementara itu, dari sisi implementasi SAKIP, pelaporan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih perlu didorong untuk dimanfaatkan dalam penetapan strategi dan target kinerja dalam perencanaan. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2023, pemenuhan kualitas pelaporan kinerja baru mencapai 86%. Disamping itu, kualitas penyampaian informasi mendalam dalam pelaporan kinerja masih belum merata di seluruh perangkat daerah.

Selanjutnya, kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih memerlukan perbaikan. Meskipun telah berada dalam kategori 'Tinggi' masih ditemukan capaian-capaian kinerja yang rendah pada beberapa sektor. Kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh Setda juga masih memerlukan peningkatan. Hasil penilaian mandiri menunjukkan rata-rata ketercapaian dalam pengukuran kualitas kebijakan sebesar 66%. Disamping itu, kualitas regulasi daerah masih belum cukup adaptif dan harmonis dengan rata-rata ketercapaian nilai pengukuran reformasi hukum sebesar 81%. Selanjutnya, walaupun dari hasil evaluasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mencapai level 3 (Proaktif), namun kepatuhan terhadap pemanfaatan SPSE dan pemenuhan kompetensi SDM masih menjadi permasalahan yang berkelanjutan. Adapun Pemanfaatan SPSE secara optimal, akan meningkatkan keterlibatan UMKM dalam belanja pengadaan pemerintah, sehingga turut mendorong pergerakan perekonomian di Jawa Barat.

Secara internal, tata kelola pemerintahan di lingkungan Setda masih menyisakan ruang perbaikan. Implementasi reformasi birokrasi belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja dan belum semua komponen tata kelola dibangun secara menyeluruh. Pembangunan Zona Integritas juga belum menunjukkan akselerasi signifikan, yang berdampak pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani.

Lebih lanjut, terdapat sejumlah area strategis yang perlu diperkuat agar Setda dapat berperan lebih optimal dalam mendukung efektivitas pembangunan di Jawa Barat diantaranya transformasi digital menjadi



E1FA443D9A



salah satu pendorong utama dalam modernisasi tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Setda perlu terus diarahkan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas proses kerja, serta menciptakan integrasi sistem kerja yang ada. Pengembangan sistem yang terstruktur dan saling terintegrasi akan mempercepat proses pengambilan keputusan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Selain aspek digitalisasi, penguatan kinerja organisasi juga sangat bergantung pada bagaimana sumber daya internal dikelola secara strategis. Perencanaan dan pemanfaatan sumber daya manusia serta anggaran perlu diselaraskan dengan arah pembangunan dan prioritas organisasi. Penataan ini tidak hanya mencakup efisiensi alokasi, tetapi juga bagaimana setiap elemen sumber daya dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan kelembagaan.

Dalam kerangka tersebut, peningkatan kapasitas aparatur menjadi faktor krusial. Kompetensi sumber daya manusia perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan dan merata, agar sejalan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Aparatur yang memiliki kompetensi yang relevan dan adaptif akan mampu menghadirkan layanan yang lebih responsif, inovatif, dan berkualitas tinggi.

Lebih jauh, dinamika kebijakan nasional, tantangan global, serta isu-isu strategis seperti perubahan iklim dan disrupsi teknologi menuntut kemampuan organisasi untuk bersikap lebih antisipatif dan adaptif. Setda perlu membangun kapasitas kelembagaan yang tangguh, baik dalam mengantisipasi perubahan maupun dalam merespons secara cepat dan tepat. Pendekatan ini akan memperkuat posisi Setda sebagai institusi yang mampu menjadi motor penggerak dalam setiap fase pembangunan daerah.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis dalam Renstra adalah masalah atau tantangan penting yang harus menjadi fokus perhatian dan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu ini memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis dalam Renstra memiliki karakteristik sebagai berikut:

- **Penting:** Isu ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
- **Mendasar:** Isu ini merupakan akar masalah atau tantangan yang mendasari permasalahan lain.
- **Mendesak:** Isu ini membutuhkan penanganan segera karena dampaknya yang serius.



E1FA443D9A



- Menentukan Tujuan: Isu ini harus diatasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan. Isu strategis memiliki karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, serta berdampak jangka menengah dan panjang bagi daerah. Dalam menyusun isu strategis, Setda mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah, baik pada skala global, nasional, maupun provinsi. Penyusunan ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas Tahun 2045 serta Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam konteks global, beberapa tantangan utama yang harus menjadi perhatian dalam kebijakan daerah meliputi perubahan iklim yang memerlukan adaptasi dan mitigasi melalui kebijakan pembangunan rendah karbon, dinamika geopolitik dan geoekonomi yang menuntut kemandirian serta ketahanan rantai pasokan dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta perkembangan demografi global yang menuntut penyediaan akses pelayanan dasar yang merata, termasuk air bersih, sanitasi, listrik, serta jaminan sosial. Selain itu, disrupsi teknologi juga menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan, di mana kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi regulasi serta partisipasi publik melalui digitalisasi layanan. Urbanisasi yang terus berkembang juga menjadi perhatian, di mana perencanaan tata ruang yang lebih berkelanjutan dibutuhkan guna mengurangi konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan komersial.

Lebih jauh mengenai disrupsi teknologi dalam tata kelola pemerintahan, GDRBN 2025-2045 menyoroti tiga studi tentang pemerintahan global yaitu *the Future Government 2030+*, *Government Trends 2024*, dan *Government in 2071*. Dari ekstraksi tiga studi tersebut dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan menjadi fokus dalam mendorong pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan inovatif. Partisipasi warga dalam proses pembuatan kebijakan akan menjadi kunci legitimasi pemerintah. Maka, pemanfaatan teknologi berbasis AI dengan pendekatan yang berpusat kepada manusia diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada tingkat nasional, berbagai kebijakan strategis turut mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dapat meningkatkan potensi ekonomi dan konektivitas Jawa Barat dalam mendukung pusat pertumbuhan baru, serta bonus demografi yang menuntut peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja guna mengoptimalkan manfaat dari



E1FA443D9A



struktur usia penduduk. Ekonomi hijau dan biru juga menjadi perhatian utama dengan mendorong pembangunan rendah karbon serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Penguatan konektivitas dan infrastruktur dasar menjadi prioritas guna memperkuat daya saing wilayah, sementara ketahanan bencana dan daya dukung lingkungan menuntut kebijakan yang lebih adaptif terhadap pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim. Dalam aspek desentralisasi dan otonomi daerah, penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas belanja daerah.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, tantangan utama yang harus dihadapi meliputi pembangunan inklusif berbasis *Green & Blue Economy* yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang merata. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia menjadi agenda penting dalam mendorong pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, serta penguatan karakter sosial budaya. Pengurangan kesenjangan infrastruktur dan pelayanan dasar menjadi prioritas untuk memastikan percepatan pembangunan di wilayah selatan Jawa Barat guna mendorong pemerataan ekonomi. Keberlanjutan daya dukung lingkungan juga menjadi perhatian dengan implementasi teknologi ramah lingkungan serta ekonomi sirkular dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, kolaboratif, dan partisipatif diperlukan sebagai fondasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan koordinasi kebijakan daerah, Setda menghadapi tantangan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Beberapa isu utama yang menjadi fokus dalam periode perencanaan ke depan mencakup optimalisasi perumusan dan implementasi kebijakan daerah dengan pendekatan berbasis bukti dan partisipatif serta monitoring dan evaluasi kebijakan yang lebih ketat guna memastikan efektivitas dan dampaknya. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan berkelanjutan menjadi agenda penting untuk memastikan sinergi antar pemangku kepentingan guna mendukung integrasi kebijakan yang lebih efektif. Reformasi birokrasi perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil.

Dalam mengantisipasi dinamika kebijakan pusat dan perubahan global, peningkatan kapasitas analisis kebijakan dan pemanfaatan *big data* menjadi strategi utama guna mengantisipasi perubahan regulasi serta dinamika ekonomi dan politik global. Penguatan budaya kerja yang adaptif dan profesional juga perlu dilakukan melalui implementasi nilai-nilai kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Selain itu, peningkatan kompetensi dan pemerataan sumber daya manusia di lingkungan Setda menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan



E1FA443D9A



redistribusi pegawai yang lebih efektif sesuai kebutuhan organisasi. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kinerja juga harus dioptimalkan melalui digitalisasi layanan dan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan serta koordinasi lintas sektor. Dalam Renstra, isu strategis ini dianalisis secara mendalam untuk menentukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk menanganinya. Selain itu, Renstra juga merumuskan rencana program dan kegiatan yang terukur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2.10. Isu Strategis Sekretariat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Inovasi pemerintahan dan pelayanan publik termasuk yang terbaik	Struktur dan proses organisasi masih memiliki kelemahan	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) masih belum mencapai target	Transformasi digital dalam sektor publik	Shifting generation dan pergeseran generasi ASN	Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan public yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, dan berintegritas didukung oleh transformasi digital, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan peningkatan kualitas kebijakan serta regulasi daerah yang adaptif
	Pelaporan kinerja belum cukup dimanfaatkan dalam perencanaan	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha masih belum mencapai target	Pemerintahan terbuka, partisipatif, dan inovatif	Transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi		
	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih memerlukan perbaikan			Desentralisasi dan otonomi daerah		
	Kualitas kebijakan Setda masih perlu ditingkatkan			Perubahan iklim pemerintahan	Masih terbatasnya kolaborasi intensif antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta	
	Kualitas regulasi daerah masih belum cukup adaptif dan harmonis			Budaya birokrasi yang lemah		



Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	Kepatuhan terhadap pemanfaatan SPSE dan kompetensi SDM PBJ belum memenuhi			Relasi politik dan birokrasi di masa mendatang		
	Koordinasi lintas sektor serta dengan perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan					
	Tata kelola internal belum optimal					



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Gambar 3.1. Kerangka Penjabaran Sasaran Renstra

PN2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PN4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas		
SU1: Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan	SU1: Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata		
IK: Asia Power Index (Diplomatic Influence)	IK: Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		
SU5: Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	M1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		
IK: Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global	SB4: Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan		
	IK: Rata-Rata Lama Sekolah Di Atas 15 Tahun		
	SR1: Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi		
	IK1: Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi		
PN7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			
SU1: Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional	SU2: Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	SU4: Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai Agen Pembangunan	SU6: Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
IK: Indeks Pembangunan Hukum	IK: Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	IK: Return on Asset (RoA) BUMN	IK: Tingkat Inflasi
IK: Indeks Materi Hukum	IK: Indeks Pelayanan Publik	M2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	
M4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>			
SB3: Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			
IK: Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB General)			
SR4: Regulasi Daerah Adaptif	SR5: Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	SR9: Kelembagaan Agile	
IK4: Indeks Reformasi Hukum	IK5: Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	IK9: Nilai Evaluasi Kelembagaan	
	SR6: Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	SR10: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	
	IK6: Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja > 0%	IK10: Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	
	SR7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	SR11: Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	
	IK7: Indeks Tata Kelola Pengadaan	IK11: Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	
	SR8: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	SR12: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	
	IK8: Indeks Pelayanan Publik	IK12: Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	

Keterangan:

- PN : Prioritas Nasional
- SU : Sasaran Utama
- M : Misi RPJMD
- SB : Sasaran Pembangunan RPJMD
- SR : Sasaran Renstra
- IK : Indikator Kinerja
- : Diturunkan langsung
- : Diturunkan di pada level program/outcome
- : Diturunkan di pada level kegiatan/immediate outcome
- : Diturunkan pada level sub kegiatan/output
- : Diturunkan dalam aktivitas (cross cutting)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E1FA443D9A>



3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil kinerja pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran, Setda mempertimbangkan isu strategis daerah, hasil evaluasi kinerja, serta mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja Setda selaras dengan arah pembangunan daerah dan dapat terukur, realistis, serta menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN mencantumkan lima misi/sasaran pembangunan nasional yaitu (1) meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; (2) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (3) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission. Lima sasaran pembangunan nasional ini dijabarkan ke dalam delapan arah pembangunan atau prioritas nasional dan disebut sebagai Asta Cita yang pencapaiannya difokuskan pada tiga strategi utama. Tiga strategi tersebut menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional yang terdiri dari penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, serta pencapaian pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

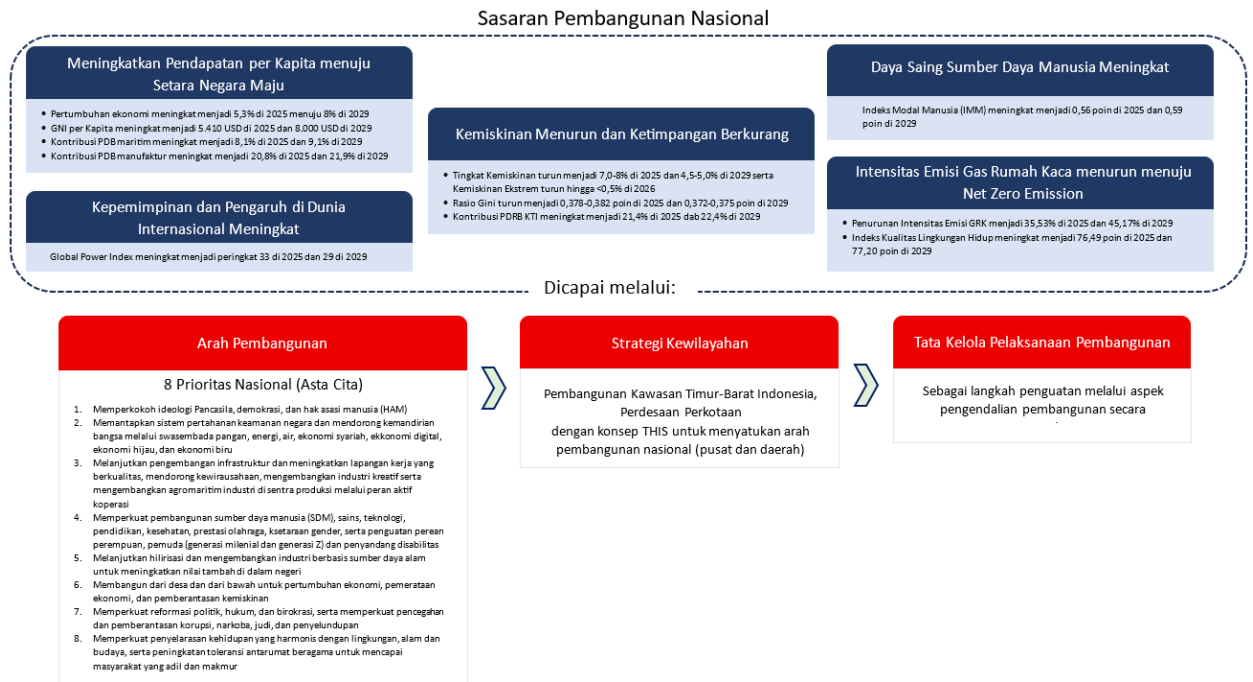
Pelaksanaan strategi utama ini diterapkan dalam strategi kewilayahan yang menggunakan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Hal ini bermakna bahwa terdapat rencana intervensi pembangunan masing-masing daerah dan diperuntukkan menjadi acuan bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, integrasi perencanaan pembangunan tidak hanya meliputi kesesuaian rencana namun juga pemastian pelaksanaan amanat pusat oleh daerah dengan memperhatikan potensi dan karakteristik daerah. Tentunya tetap dalam koridor tahapan pembangunan sesuai RPJPN 2025-2045 yang menekankan pada tiga transformasi dan dua landasan transformasi.



E1FA443D9A



Gambar 3.2. Kerangka Pikir RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Merujuk kepada tugas dan fungsi, terdapat tiga dari delapan prioritas nasional (Asta Cita) yang diamanatkan didukung langsung oleh kinerja Setda. Artinya Setda menentukan dan menempatkan sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta target berdasarkan prioritas nasional tersebut. Asta Cita pertama yang diamanatkan kepada Setda adalah Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu 'Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru'. Pada prioritas ini, Setda diamanatkan mendukung dua sasaran yang berkaitan dengan pengaruh diplomatik dan penyelenggaraan ekonomi syariah. Selanjutnya adalah PN4 yaitu 'Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas'. Terdapat satu sasaran yang diamanatkan kepada Setda yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Terakhir adalah PN7 yaitu 'Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan'. Pada PN ini terdapat empat sasaran utama yang diamanatkan yaitu berkaitan dengan supremasi hukum, birokrasi pemerintahan, tata kelola BUMD, dan pengendalian inflasi.



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E1FA443D9A>



Tabel 3.1. Acuan Kinerja Setda berdasarkan Prioritas Nasional dan Indikator Utama Pembangunan (IUP)

PN2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
Sasaran Utama 1: Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan			
Indikator Kinerja	Satuan	2025	2029
Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	Poin	65,7	66,1
Sasaran Utama 5: Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan			
Indikator Kinerja	Satuan	2025	2029
Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global	Peringkat	3	1
PN4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas			
Sasaran Utama 1: Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata			
Indikator Kinerja	Satuan	2025	2029
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	11,11	12,68
PN7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			
Sasaran Utama 1: Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional			
Indikator Kinerja	Satuan	2025	2029
Indeks Pembangunan Hukum	Poin	0,69	0,73
Indeks Materi Hukum	Poin	0,51	0,55
Sasaran Utama 2: Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			
Indikator Kinerja	Satuan	2025	2029
Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Poin	71,38	77,26
Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,68	3,80
Sasaran Utama 4: Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai Agen Pembangunan			
Indikator Kinerja	Satuan	2025	2029
Return on Asset (RoA) BUMN	Persen	3,21	3,42
Sasaran Utama 6: Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
Indikator Kinerja	Satuan	2025	2029
Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ± 1,0	2,5 ± 1,0

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Selanjutnya pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dimuat visi pembangunan daerah yaitu 'Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata' dengan tema pembangunan 'Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola'. Pernyataan visi tersebut mengandung makna tata kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, serta antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Lebih jauh



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



pernyataan visi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pembangunan untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa, memperhatikan unsur mikro lokal sebagai asal muasal tradisi dan unsur makro sebagai potensi pengungkit pertumbuhan wilayah yang unggul. Visi ini sejalan dengan strategi kewilayahan sebagaimana dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Pencapaian ‘Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata’ diharapkan terjadi melalui pencapaian empat misi yaitu:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul.
- 2) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif.
- 3) Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.
- 4) Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

Dari empat misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, Setda mendukung kepada kinerja pada tiga misi yaitu:

1) Misi Pertama: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul

Misi pembangunan yang pertama ini merujuk kepada konsep bahwa perwujudan masyarakat yang sejahtera berawal mula dari kondisi masyarakat sebagai sumber daya manusia. Jawa Barat yang Istimewa merupakan Jawa Barat yang memiliki manusia bermoral baik dan memiliki nilai *cageur* (sehat), *bageur* (berkarakter), *pinter* (pintar), dan *singer* (kreatif). Kondisi ini memungkinkan SDM Jawa Barat sebagai SDM yang berkualitas, mampu bersaing, dan menciptakan kesejahteraan.

Untuk itu, **tujuan** pembangunan dalam misi ini adalah **‘Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer’** dengan indikator **Indeks Modal Manusia**. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam lima sasaran dan kinerja Setda mendukung kepada ketercapaian **sasaran** ke empat yaitu **‘Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan’** dengan indikator **Rata-Rata Lama Sekolah Di Atas 15 Tahun**. Tujuan dan sasaran pembangunan ini menginginkan agar SDM Jawa Barat mengenyam pendidikan paling rendah, diploma. Kondisi ini untuk membuka peluang terbuka dalam dunia kerja.

Dalam Renstra Setda, sasaran pembangunan Jawa Barat menjadi tujuan kinerja Setda dan dijabarkan ke dalam **sasaran Renstra ‘Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi’** dengan indikator **Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**. Sasaran ditetapkan untuk mendukung perwujudan kondisi SDM Jawa Barat memiliki



E1FA443D9A



kualifikasi minimal diploma. Disamping itu, penentuan sasaran ini sebagai implementasi dari amanat PN4.

Indikator 'Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi' merujuk kepada persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memiliki bukti kelulusan berupa ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Ruang lingkup 'pendidikan tinggi' mencakup diploma I s.d. IV, sarjana, magister, dan doktor. Perhitungan indikator ini menggambarkan tingkat kualifikasi pendidikan tinggi dalam populasi dewasa dan digunakan untuk menilai ketersediaan SDM yang berpendidikan tinggi.

Formulasi perhitungan indikator kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki Ijazah/STTB Perguruan Tinggi pada periode tahun - T}}{\text{Jumlah penduduk umur 15 tahun pada tahun-T}} \times 100\%$$

Sumber data: Susenas BPS

Merujuk kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, urusan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dibutuhkan kolaborasi yang semakin efektif. Sehubungan dengan pendidikan tinggi bukan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan, maka Setda yang mengambil peran sesuai arahan pemerintah pusat.

2) Misi Kedua: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif

Misi pembangunan yang kedua merujuk kepada konsep bahwa aktivitas ekonomi dan penerapan teknologi selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Bahwa pembangunan harus dapat melepas keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan eksploitasi sumber daya alam secara langsung. Dengan demikian, fokus pembangunan pada misi ini adalah pada dua sisi yaitu peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan (SDA).

Tujuan untuk misi kedua adalah '**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi**'. Perwujudan kondisi ini diukur melalui ketercapaian enam indikator yaitu (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi; (2) Kontribusi PDRB Provinsi; (3) Indeks Ekonomi Hijau Daerah; (4) Indeks Ekonomi Biro Indonesia; (5) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan (6)



E1FA443D9A



PDRB per Kapita. Dari keenam indikator tersebut, kinerja Setda mendukung kepada capaian **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**. Indikator ini menggambarkan seberapa besar peningkatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu wilayah.

Tujuan pembangunan di atas, dijabarkan ke dalam enam sasaran. **Sasaran** kelima yaitu **'Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro'** diamanatkan untuk didukung secara langsung oleh Setda dengan fokus kepada indikator **'Tingkat Inflasi'** dan **'Rasio Kapasitas Fiskal Daerah'**. Indikator pertama mencerminkan kestabilan harga yang jika terkendali akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Indikator ini juga merupakan salah satu amanat IUP. Sementara indikator kedua menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri. Kemampuan ini akan memberikan daerah untuk meningkatkan belanja pembangunan, mendukung iklim investasi, dan membiayai program inovatif yang kesemuanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Amanat dukungan kinerja Setda terhadap dua indikator tersebut berkaitan dengan tugas Setda dalam melakukan koordinasi lintas sektor serta dalam melakukan pembinaan terhadap BUMD.

Untuk mendukung kinerja pengendalian 'Tingkat Inflasi' Setda menetapkan **sasaran Renstra 'Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat'** dengan indikator ketercapaian **'Tingkat Inflasi'**. Pengukuran ini beranjak dari premis bahwa saat terjadi instabilitas harga barang, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus mengeluarkan kebijakan yang dapat mengembalikan keseimbangan harga. Namun, kebijakan tersebut harus diimplementasi baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terutama daerah yang mengalami instabilitas. Adapun kebijakan yang ditetapkan merupakan rekomendasi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang beranggotakan tidak hanya Setda dan dinas terkait namun juga ahli ekonomi Jawa Barat dan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat.

Formulasi perhitungan indikator kinerja:

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:



E1FA443D9A



IHK : Indeks Harga Konsumen
 t : Tahun perhitungan
 t-1 : Tahun sebelum tahun perhitungan

Sumber data: BPS

Selanjutnya untuk mendukung ketercapaian kinerja 'Rasio Kapasitas Fiskal Daerah', Setda menetapkan **sasaran Renstra 'Meningkatnya Kinerja BUMD'** dengan indikator '**Persentase BUMD Sehat**'. Konsistensi BUMD dalam menghasilkan laba, berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui kontribusi deviden yang telah ditetapkan. Kinerja operasional BUMD menandakan tingkat produktivitasnya. Oleh karena itu, BUMD yang sehat tidak hanya dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah namun secara langsung dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD serta meningkatkan aset daerah. Dengan demikian berkontribusi terhadap kapasitas daerah dalam mengelola keuangannya sendiri.

Kondisi BUMD sehat ditargetkan karena BUMD yang sehat akan mampu berkontribusi pada tingkat kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, kesehatan BUMD mencakup beberapa aspek yaitu kinerja keuangan, kinerja operasional, kinerja pelayanan, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan hukum. BUMD yang sehat merupakan perusahaan yang efisien, akuntabel, transparan, konsisten menghasilkan laba, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Formulasi perhitungan indikator kinerja:

$$\frac{\Sigma \text{BUMD Jawa Barat yang Sehat}}{\Sigma \text{BUMD yang Dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat}} \times 100\%$$

Sumber data: Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan

3) Misi Keempat: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*

Merujuk kepada *core* tugas pokok dan fungsi, Setda menunjang perwujudan kondisi pada misi ke 4. Terdapat dua **tujuan**



E1FA443D9A



pembangunan dalam misi 4 yaitu (1) Terwujudnya masyarakat mandiri dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi yang diukur oleh ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah serta (2) **Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan yang Diukur** dengan **pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi**. Dari kedua tujuan tersebut, kinerja Setda menunjang secara signifikan pada pencapaian tujuan ke dua. Selanjutnya, tujuan ini dijabarkan ke dalam **sasaran** pembangunan yaitu **'Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif'** dengan tolok ukur keberhasilan **Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB General)**.

Pengukuran terhadap ketercapaian RB general beranjak dari kebutuhan penyediaan kondisi yang dapat mendukung penyelenggaraan RB tematik berdampak. Beberapa kondisi yang harus diwujudkan dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Setda adalah kebijakan yang adaptif dan harmonis, struktur yang tangkas, organisasi berbudaya dan akuntabel, proses kerja yang dinamis, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi-kondisi tersebut menjadi prasyarat yang dapat mendukung efektivitas RB tematik.

Untuk mewujudkan kebijakan yang adaptif dan harmonis, Setda menetapkan dua **sasaran Renstra** yaitu **'Regulasi Daerah Adaptif'** dengan indikator **'Indeks Reformasi Hukum'** dan **'Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan'** dengan indikator **'Nilai Kualitas Kebijakan Daerah'**. Sasaran 'Regulasi Daerah Adaptif' merujuk pada kemampuan regulasi daerah (perda/pergub) dalam merelasikan diri terhadap perubahan kondisi yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian tidak ada pelayanan publik yang terhambat oleh regulasi yang irelevan, bertentangan dengan regulasi lain baik secara vertikal maupun horizontal, maupun regulasi yang tidak solutif.

Adapun pengukuran kinerja yang digunakan yaitu Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan penilaian hasil evaluasi penyelenggaraan reformasi hukum pada pemerintah daerah oleh Kementerian Hukum RI. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan harmonisasi regulasi, re-regulasi, kompetensi SDM, serta pengelolaan informasi produk hukum. Selain memberikan penilaian, hasil evaluasi juga memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi hukum pada pemerintah daerah.

Formulasi perhitungan indikator kinerja:



E1FA443D9A

$$f(x) = X_0 + (X_{max} - X_0) \times 80\%$$

Keterangan:

F(x)	:	Nilai akhir IRH
X ₀	:	Nilai awal instansi
X _{max}	:	Nilai maksimum tujuan
Koefisien pengali	:	0,8 (80%)

Sumber data: Kementerian Hukum

Sasaran 'Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan' ditetapkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memberi pengaruh positif terhadap kondisi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan harus dipastikan berkualitas yang mengacu kepada perumusan kebijakan yang berorientasi bukti, berorientasi data, dan memiliki dampak. Indikator 'Nilai Kualitas Kebijakan Daerah' merujuk kepada hasil evaluasi terhadap kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh Setda yang telah diimplementasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan menjadi media efektif dalam pembangunan dan dengan demikian berdampak positif kepada masyarakat.

Formulasi perhitungan indikator kinerja:

Self assessment terhadap:

Perencanaan Kebijakan (bobot 45%) + Implementasi Kebijakan (bobot 55%)

Sumber data:

- (1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- (2) Biro Kesejahteraan Rakyat
- (3) Biro Perekonomian
- (4) Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan

Selanjutnya, untuk mewujudkan struktur yang tangkas, Setda menetapkan **sasaran Renstra 'Kelembagaan Agile'** dengan indikator '**Nilai Evaluasi Kelembagaan**'. Evaluasi kelembagaan dilakukan oleh KemenPANRB paling singkat tiga tahun sekali untuk melihat ketepatan fungsi, ukuran, dan adaptabilitas lembaga pemerintah daerah, serta ketepatan proses dan tingkat dukungan terhadap kinerja organisasi. Nilai Evaluasi Kelembagaan oleh karenanya mencerminkan tingkat ketangkasan Pemda Prov Jabar.



E1FA443D9A



Formulasi perhitungan indikator kinerja:

$$IEK = (Bobot_1 \times Indikator_{Struktur}) + (Bobot_2 \times Indikator_{Proses})$$

Sumber data: Kementerian PAN dan RB

Selanjutnya untuk mewujudkan Pemda Prov Jabar yang berbudaya dan akuntabel, ditetapkan **lima sasaran Renstra**. Sasaran pertama adalah **'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah'** dengan indikator **'Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A'**. Sasaran ini direpresentasikan oleh tingkat kualitas tata kelola perangkat daerah yang dapat dilihat melalui IRB yang dimiliki oleh masing-masing. Proposisi yang diangkat adalah perangkat daerah dengan tata kelola yang berkualitas memiliki budaya akuntabel, adaptif, dan kolaboratif serta merupakan unit yang kompeten, harmonis, loyal, dan berorientasi pelayanan. Untuk ini dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi pada perangkat daerah oleh tim evaluator yang difasilitasi oleh Biro Organisasi.

Formulasi perhitungan indikator kinerja:

$$\frac{\Sigma \text{Perangkat Daerah dengan Nilai IRB Kategori A}}{\Sigma \text{Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Sumber data: Biro Organisasi

Sasaran kedua adalah **'Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan'** dengan indikator **'Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan'**. Sasaran ini berfokus kepada kualitas pelaporan kinerja yang memberikan evaluasi dan informasi yang dapat berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Fokus pada dimensi pelaporan dalam ruang lingkup SAKIP dilatarbelakangi oleh urgensi kedalaman faktor pendorong dan penghambat kinerja serta konsistensi tindak lanjut dari hasil evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Adapun indikator kinerja yang menjadi tolok ukur ketercapaian kondisi sasaran didapatkan dari hasil penilaian evaluasi terhadap implementasi SAKIP yang dilakukan oleh KemenPANRB.



E1FA443D9A



Formulasi perhitungan indikator kinerja:

Nilai Dimensi Pelaporan = Skor Total Sub komponen Pelaporan

Sumber data: Kementerian PAN dan RB

Sasaran ketiga adalah **'Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target'** dengan indikator **'Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$ '**. Sasaran ini berfokus dalam memastikan bahwa perangkat daerah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Premis yang dibangun adalah bahwa semakin tinggi capaian terhadap target, semakin tinggi pula kontribusi nyata yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumber daya terhadap pembangunan. Dalam implementasi SAKIP, kinerja akuntabel saat target tercapai secara konsisten. Oleh sebab itu, ketercapaian sasaran diukur melalui deviasi kinerja yang dialami oleh perangkat daerah.

Formulasi perhitungan indikator kinerja:

$$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja} \geq 0\%}{\sum \text{Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Sumber data: Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan

Sasaran keempat adalah **'Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi'** dengan indikator **'Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi'**. Fokus pada sasaran ini senada dengan sasaran sebelumnya namun mengarah kepada ketercapaian kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sebagaimana amanat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperjelas dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, masing-masing pemerintah daerah telah diperjelas kewenangan dan urusan yang ditangani serta pengukuran kinerjanya. Sasaran ini ditetapkan untuk memastikan perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja:



E1FA443D9A



Skor Kinerja Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah = ((Capaian Kinerja Makro + Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan) x 0,75) + (Perubahan Kinerja Makro x 0,25)

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri

Sasaran kelima berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, Setda menetapkan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”** dengan tolok ukur kinerja berupa **“Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)”**.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses yang mendukung penyelenggaraan pembangunan secara langsung. Selain memenuhi kebutuhan operasional pembangunan, proses pengadaan barang dan jasa juga mendorong percepatan pembangunan melalui mekanisme yang lebih efisien. Di sisi lain, pengadaan barang dan jasa turut menjadi sarana pengembangan UMKM dengan membuka akses pasar bagi penyedia lokal. Dengan posisi strategis tersebut, pengadaan barang dan jasa harus menjamin efektivitas, efisien, dan transparansi. Karena itu, peningkatan kualitas tata kelola melalui capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) menjadi kondisi yang perlu diwujudkan. Pengukuran ITKP dilakukan secara nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) setiap tahun, berdasarkan dimensi-dimensi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021.

Formulasi perhitungan indikator kinerja:

Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ + Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ

Sumber data: LKPP

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, Setda menetapkan **sasaran kinerja ‘Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat’** dengan indikator kinerja **‘Indeks Pelayanan Publik’**. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan penerapan nyata dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terdapat dua dimensi dari penyelenggaraan pelayanan publik yaitu pelayanan publik transformasional dan transaksional. Dimensi pertama mencakup penyelenggaraan



E1FA443D9A



elayanan publik yang memberikan pengaruh memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan bersifat lebih makro. Cakupan ini berfokus pada outcome seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan hidup yang dalam perspektif kinerja pembangunan telah diukur dalam indikator kinerja pembangunan.

Dimensi transaksional atau dimensi kedua mencakup proses pelayanan publik yang melibatkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Dikarenakan sifatnya yang lebih mikro, hasil dari pelayanan publik pada dimensi ini dapat langsung terlihat. Tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan dengan demikian menjadi tolok ukur yang dapat menggambarkan kualitas dari pelayanan publik transaksional.

Untuk itu, agar kualitas pelayanan publik dipastikan terjaga, maka KemenPANRB melakukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran Indeks Pelayanan Publik. Fokus dari pengukuran ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik pada unit layanan. Adapun ruang lingkup penilaian mencakup kepatuhan terhadap standar pelayanan, profesionalisme SDM, kualitas sarana dan prasarana, sistem informasi, mekanisme pengaduan dan konsultasi, serta inovasi.

Formulasi perhitungan indikator kinerja:

$$\text{Indeks Pelayanan Publik (IPP)} = (0,75 \times \text{Nilai } F - 02) + (0,25 \times \text{Nilai } F - 03)$$

Keterangan:

F-01: Formulir penilaian yang diisi oleh unit lokus (*self-assessment* dan tidak dibobot)

F-02: Formulir penilaian yang diisi oleh evaluator (bobot 75%)

F-03: Formulir penilaian yang diisi oleh pengguna layanan (bobot 25%)

Sumber data: Kementerian PAN dan RB



E1FA443D9A



Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra (SR)		Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,81	9,64	9,75	9,86	9,97	10,08	10,20
Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	2	Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	Persen	1,64	3,3 – 3,8	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
		3	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	Persen	N/A	78,37	81,08	83,78	86,48	89,18	91,89
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	4	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	Poin	89,30	89,70	90,23	90,75	91,28	91,80	92,33
		5	Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	75,90	76,66	77,43	78,20	78,98	79,77	80,57
		6	Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja \geq 0%	Persen	63,04	63,28	63,51	63,75	64,98	64,22	64,45
		7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	90,29	90,30	90,31	90,32	90,33	90,34	90,35
		8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,76	4,76	4,77	4,77	4,78	4,78	4,79
		9	Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Poin	68,450	68,450	73,093	73,093	73,093	79,598	79,598
		10	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Persen	87	89	92	95	97	100	100
		11	Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Poin	13,55	13,58	13,61	13,65	13,68	13,71	13,74
		12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori	N/A	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi



E1FA443D9A

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi merupakan bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah, yang dijabarkan dari visi, misi, dan tujuan pembangunan. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman umum yang memuat prioritas pembangunan, sedangkan strategi memuat pendekatan atau cara yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien. Penyusunan arah kebijakan dan strategi dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan, serta harus memperhatikan isu-isu strategis, potensi daerah, dan tantangan pembangunan yang dihadapi, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Arah kebijakan dan strategi Setda mempertimbangkan arah dan kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyelarasan tidak hanya terjadi pada puncak kinerja namun mengalir terus hingga strategi dan pelaksanaan operasional aktivitas.

Berfokus pada sasaran Renstra Setda, terdapat enam arah kebijakan dan 17 strategi pembangunan pada RPJMD yang perlu menjadi pedoman. Sasaran Pembangunan (SB) 4 pada Misi 1 yang dijabarkan pada SR1 'Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi' memiliki dua arah kebijakan dan tiga strategi. Selaras dengan arah kebijakan dan strategi pada RPJMD, arah kebijakan Renstra untuk SR1 adalah peningkatan akses dan keterjangkauan pendidikan tinggi. Hal ini untuk menciptakan peluang yang lebih luas bagi masyarakat minoritas. Adapun strategi yang mendukung arah kebijakan ini adalah penyediaan kebijakan yang mendukung peningkatan akses dan keterjangkauan pendidikan tinggi serta penyelenggaraan program afirmasi pendidikan tinggi. Kondisi ini perlu didukung oleh kolaborasi antara provinsi dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta dunia usaha yang optimal. Selain itu, untuk memastikan kebijakan berdampak efektif, dukungan data yang akurat sangat penting.

Selanjutnya untuk Misi 2 pada SB5 yang dijabarkan dalam SR2 'Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat' terdapat dua arah kebijakan dan sepuluh strategi. Berpedoman pada arah kebijakan dan strategi tersebut, arah kebijakan Renstra yang mendukung pengendalian inflasi adalah optimalisasi upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Jawa Barat dengan strategi meningkatkan kualitas koordinasi dalam pelaksanaan upaya pengendalian serta meningkatkan kualitas rekomendasi upaya pengendalian inflasi. Sementara arah kebijakan untuk peningkatan kinerja BUMD pada SR3 adalah peningkatan kesehatan BUMD dengan strategi antara lain peningkatan daya saing BUMD, mendorong penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMD, dan mendorong optimalisasi pemanfaatan aset,

Kemudian untuk Misi 4 pada SB2 yang dijabarkan dalam sembilan SR terdapat dua arah kebijakan dan empat strategi. Satu arah kebijakan



E1FA443D9A



menjadi pedoman untuk arah kebijakan pada delapan SR sementara satu arah kebijakan lainnya menjadi pedoman untuk arah kebijakan pada SR9. Untuk SR4 yaitu 'Regulasi Daerah Adaptif' ditetapkan arah kebijakan peningkatan harmonisasi regulasi daerah dengan strategi antara lain optimalisasi basis data dan analisis regulasi serta peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi.

Selanjutnya, untuk SR5 yaitu 'Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan' ditetapkan arah kebijakan peningkatan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat. Arah kebijakan ini dijabarkan dalam strategi antara lain peningkatan kolaborasi dalam perumusan kebijakan, peningkatan integrasi proses bisnis, serta peningkatan pemanfaatan data dan fakta dalam pengambilan keputusan. Untuk SR6 yaitu 'Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target' arah kebijakan yang ditetapkan adalah optimalisasi pengendalian kinerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini dijabarkan dalam strategi peningkatan kualitas penyampaian laporan kinerja perangkat daerah serta peningkatan kualitas analisis kinerja fisik dan anggaran perangkat daerah.

Selanjutnya arah kebijakan untuk SR7 yaitu 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa' berfokus pada optimalisasi proses pengadaan yang transparan, efisien, dan efektif. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui tiga strategi utama, yaitu: peningkatan kapasitas SDM, peningkatan pemanfaatan SPSE, serta optimalisasi pengendalian proses pengadaan barang dan jasa.

Kemudian arah kebijakan untuk SR9 yaitu 'Kelembagaan Agile' adalah membangun kelembagaan yang adaptif dan berorientasi hasil. Arah kebijakan ini dijabarkan ke dalam strategi penataan struktur dan fungsi perangkat daerah serta penataan proses bisnis yang mendukung kinerja. Untuk arah kebijakan SR10 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah' adalah *continuous improvement* reformasi birokrasi. Arah kebijakan ini difokuskan pada perbaikan tata kelola secara berkelanjutan baik pada level pemerintah provinsi maupun perangkat daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa instansi tetap mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang telah dibangun. Oleh karena itu, strategi yang ditetapkan adalah optimalisasi sistem pengendalian dan evaluasi reformasi birokrasi terintegrasi, integrasi kebijakan reformasi birokrasi, serta peningkatan pelibatan seluruh sektor dalam pelaksanaan evaluasi dan integrasi data.

Untuk arah kebijakan pada SR11 yaitu 'Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan' adalah optimalisasi pemanfaatan sistem pelaporan yang terintegrasi, analitis dan adaptif untuk mendukung akselerasi pembangunan. Adapun strategi yang dibangun adalah peningkatan kapasitas analisis dan kualitas laporan serta penguatan sistem pengumpulan data dan keterpaduan informasi.



E1FA443D9A



Sedangkan arah kebijakan untuk SR12 yaitu 'Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi' adalah meningkatkan ketercapaian indikator kinerja kunci. Arah kebijakan ini dijabarkan ke dalam strategi peningkatan efektivitas penataan daerah, efektivitas pelaksanaan GWPP, efektivitas penyelenggaraan kerja sama, serta meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan. Disamping itu, strategi juga dijabarkan pada meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga lebih akuntabel dan transparan.



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Tabel 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi RPJMD	Sasaran Strategis Rensra (SR)	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi
1	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global • Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>science, technology, engineering, arts, and mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jejaring, kemitraan, dan kerja sama internasional untuk memperluas peluang beasiswa pendidikan di luar negeri • Memberikan dukungan penguatan hub pendidikan global • Mengembangkan kurikulum STEAM berbasis vokasi dan keunggulan wilayah bertaraf global 	SR1	Peningkatan akses dan keterjangkauan pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan kebijakan yang mendukung peningkatan akses dan keterjangkauan pendidikan tinggi • Penyelenggaraan program afirmasi pendidikan tinggi • Penguatan ekosistem kemitraan dengan memantapkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi dan dunia usaha untuk mendukung <i>link and match</i> • Penyediaan informasi terhadap keterjangkauan pendidikan tinggi bagi masyarakat
2	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro	Penguatan pengendalian inflasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengaturan harga, pengendalian biaya produksi, dan peningkatan efisiensi produksi • Penguatan tata kelola pengendalian inflasi daerah untuk stabilitasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok penting 	SR2	Optimalisasi upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam pelaksanaan upaya pengendalian inflasi dengan stakeholder internal maupun eksternal • Meningkatkan kualitas rekomendasi upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Jawa Barat
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRB), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (a.l. pinjaman daerah, KPBU, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah • Mengoptimalkan potensi CSR, KPBU, ekonomi dan keuangan syariah • Meningkatkan kapasitas belanja daerah • Mengoptimalkan pendapatan transfer daerah • Mengoptimalkan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas nasional, 	SR3	Peningkatan kesehatan BUMD	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan daya saing BUMD • Mendorong optimalisasi pemanfaatan aset BUMD • Mendorong penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> dalam pengelolaan BUMD • Optimalisasi evaluasi kinerja BUMD • Optimalisasi pembinaan BUMD



E1FA443D9A

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi RPJMD	Sasaran Strategis Rensra (SR)	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi
		daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional	provinsi, kabupaten/kota, dan swasta <ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi dan pengembangan BUMD • Optimalisasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis desa dan kelurahan • Peningkatan pendapatan asli daerah serta pemanfaatan potensi sumber pembiayaan alternatif dan kreatif 			
3	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan instrument regulasi daerah yang efektif, efisien, dan selaras dengan regulasi nasional dan prinsip <i>good governance</i> 	SR4	Peningkatan harmonisasi regulasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi basis data dan analisis regulasi • Penguatan kapasitas SDM • Penguatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga • Peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik selaras dengan prinsip <i>good and clean governance</i> 	SR5	Peningkatan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kolaborasi dalam perumusan kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat • Meningkatkan integrasi proses bisnis perumusan dan implementasi kebijakan antar biro serta antara biro dan perangkat daerah • Meningkatkan pemanfaatan data dan fakta dalam pengambilan keputusan • Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam implementasi kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat
				SR6	Optimalisasi pengendalian kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penyampaian laporan kinerja perangkat daerah



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi RPJMD	Sasaran Strategis Rensra (SR)	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi
						<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas analisis kinerja fisik dan anggaran perangkat daerah
				SR7	Optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM • Peningkatan pemanfaatan SPSE • Optimalisasi pengendalian proses pengadaan barang dan jasa
				SR8	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan perangkat daerah • Penataan proses bisnis pelayanan public • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan publik pemerintah daerah provinsi
				SR10	<i>Continuous improvement</i> reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi sistem pengendalian dan evaluasi reformasi birokrasi terintegrasi • Integrasi kebijakan reformasi birokrasi • Peningkatan pelibatan seluruh sektor dalam pelaksanaan evaluasi dan integrasi data.
				SR11	Optimalisasi pemanfaatan sistem pelaporan yang terintegrasi, analitis, dan adaptif untuk mendukung akselerasi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas analisis dan kualitas laporan • Penguatan sistem pengumpulan data dan keterpaduan informasi
				SR12	Peningkatan ketercapaian indikator kinerja kunci	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah • Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan GWPP



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi RPJMD	Sasaran Strategis Rensra (SR)	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi
						<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan • Meningkatkan efektivitas kerja sama daerah
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kelembagaan dan penataan aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah • Meningkatkan kapasitas aparatur daerah melalui penguatan kompetensi SDM serta peningkatan etos kerja dan integritas 	SR9	Perwujudan kelembagaan yang <i>agile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan fleksibilitas dalam struktur kerja • Penguatan kejelasan tugas dan fungsi antar unit • Penciptaan prosedur kerja yang efisien dan terdigitalisasi
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui desain kebijakan penataan desa (pemekaran desa)	SR12	Penguatan fasilitasi kebijakan penataan desa berbasis karakteristik wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas fasilitasi penataan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan wilayah • Meningkatkan kualitas koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi kebijakan penataan desa • Menyusun dan memperbarui data serta analisis wilayah administratif sebagai dasar kebijakan penataan desa • Memastikan bahwa kebijakan penataan desa mendukung efektivitas pelaksanaan pelayanan publik di daerah



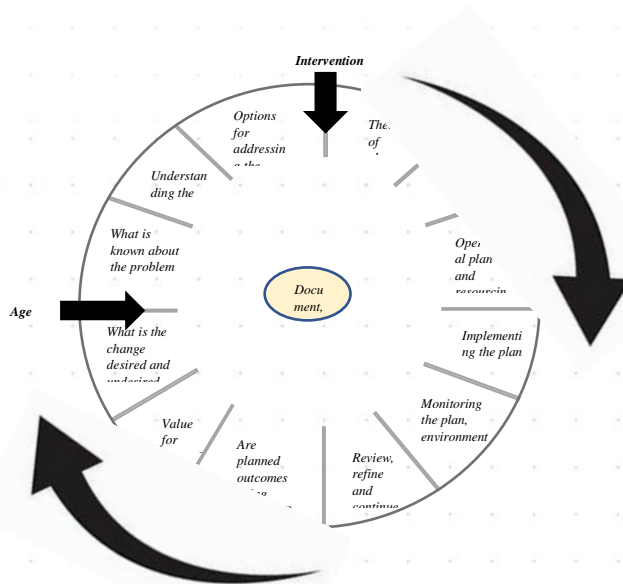
E1FA443D9A



3.3. Penahapan Renstra Setda

Arah kebijakan dan strategi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas Renstra Setda. Merujuk kepada *core* tugas pokok dan fungsi, evaluasi dan perumusan kebijakan daerah serta koordinasi kinerja lintas sektor. Tugas ini merupakan proses berkelanjutan yang tidak terputus. Evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan akan memberikan informasi sejauh mana kebijakan memiliki dampak dalam mengubah kondisi masyarakat. Hasil evaluasi dengan demikian akan menentukan kontinuitas kebijakan yaitu pelanjutan, penghentian, atau perbaikan.

Pelanjutan kebijakan bermakna meneruskan implementasi kebijakan sebagaimana rencana awal. Penghentian berarti kebijakan dihapuskan dan ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan baru yang akan lebih tepat sasaran berdasarkan hasil evaluasi. Sementara perbaikan kebijakan bermakna pelanjutan implementasi kebijakan dengan penyesuaian di beberapa ketentuan yang dianggap sudah tidak relevan. Penetapan kontinuitas kebijakan ini akan terus kembali dievaluasi untuk diperoleh efektivitas dampaknya kepada masyarakat.



Gambar 3.3. Siklus Kebijakan Berbasis Bukti

Dengan demikian, penahapan pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Renstra Setda berfokus pada siklus kebijakan publik dengan penguatan kepada prinsip berbasis bukti dan data akurat. Pada tahun pertama dan kedua perencanaan, tahapan difokuskan pada evaluasi kondisi sebagai data dasar yang diperlukan untuk menetapkan rencana aksi pada tahun ketiga hingga

kelima. Pada tahun-tahun selanjutnya monitoring implementasi kebijakan, re-regulasi, serta penguatan koordinasi akan menjadi fokus kinerja dengan mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Aktivitas yang dilakukan dalam setiap penahapan Renstra Setda tahun 2025-2029 mendukung terhadap pelaksanaan penahapan RPJMD tahun 2025-2029. Sebab setiap aktivitas pada tahapan RPJMD membutuhkan dukungan rumusan kebijakan dan evaluasi



E1FA443D9A



implementasi kebijakan yang dapat menyediakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, penahapan Renstra Setda tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang dilaksanakan dalam RPJMD.

Gambar 3.4. Penahapan Renstra Setda



3.4. Manajemen Risiko Renstra Setda

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan pengelolaan risiko yang terarah dan terukur. Manajemen risiko berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini.

Pendekatan manajemen risiko yang diterapkan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berorientasi pada hasil. Melalui penerapan manajemen risiko, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melakukan antisipasi dini terhadap berbagai ketidakpastian, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, sehingga langkah mitigasi dan pengendalian dapat disiapkan secara sistematis.

Proses manajemen risiko dalam Renstra ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:



E1FA443D9A

1. Identifikasi risiko, yaitu menguraikan berbagai kemungkinan kejadian atau kondisi yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja;
2. Analisis penyebab risiko, yaitu memahami akar permasalahan yang menimbulkan potensi risiko, baik dari aspek *man, method, machine*, maupun *material*;
3. Penilaian dampak risiko, yaitu menilai sejauh mana risiko tersebut dapat memengaruhi capaian sasaran, baik dari sisi kinerja, keuangan, maupun reputasi kelembagaan;
4. Penyusunan rencana pengendalian risiko, yaitu merumuskan langkah-langkah strategis dan operasional dalam mencegah, mengurangi, atau menanggulangi dampak risiko yang mungkin terjadi.

Manajemen risiko dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai *early warning system* untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Melalui penerapan sistem manajemen risiko yang baik, Sekretariat Daerah diharapkan mampu memastikan tercapainya seluruh sasaran strategis Sekretariat Daerah serta mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029.

Selanjutnya, identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh sasaran strategis Sekretariat Daerah beserta indikator kinerjanya untuk memetakan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran tersebut, termasuk uraian penyebab, dampak, dan rencana pengendaliannya. Rincian hasil identifikasi risiko tersebut disajikan pada tabel berikut.



E1FA443D9A



Tabel 3.4. Manajemen Risiko Renstra Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Uraian Risiko	Sebab Risiko	Dampak Risiko	Rencana Pengendalian Risiko
1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Rendahnya kemampuan finansial calon mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan; - Biaya kuliah tinggi. 	Banyak calon mahasiswa tidak melanjutkan ke jenjang tinggi sehingga Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi stagnan atau tidak tumbuh sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> - Menginisiasi program beasiswa/bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa kurang mampu dan berprestasi; - Kerja sama dengan perguruan tinggi dan sektor swasta untuk subsidi biaya pendidikan - Optimalisasi CSR pendidikan.
			Tingginya angka putus studi / dropout	Biaya hidup dan operasional mahasiswa tinggi;	Proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi tidak tumbuh sesuai target	<ul style="list-style-type: none"> - Menginisiasi program beasiswa/bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa kurang mampu dan berprestasi; - Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk sistem deteksi dini risiko putus studi
2	Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	Fluktuasi harga pangan pokok tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem atau gagal panen; - Rantai distribusi panjang dan tidak efisien; - Spekulasi harga di tingkat distributor/pedagang besar; - Lemahnya koordinasi antarinstansi pengendali inflasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Inflasi daerah melonjak; - Daya beli masyarakat menurun; - Meningkatnya kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan TPID dan koordinasi lintas sektor; - Pemantauan harga dan stok komoditas utama secara digital.
3	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	Tata kelola dan transparansi lemah	<ul style="list-style-type: none"> - Intervensi politik dalam pengambilan keputusan bisnis; - Audit internal/eksternal tidak optimal 	Kecurangan, kerugian keuangan, reputasi buruk	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan <i>good corporate governance</i>; - Audit rutin dan publikasi laporan keuangan.
			Modal / pembiayaan tidak mencukupi	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi rendah; - Keterbatasan penyertaan modal daerah; 	Kinerja dan ekspansi BUMD terhambat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana kebutuhan modal dan reinvestasi jangka menengah;



E1FA443D9A

No	Sasaran Strategis	Indikator	Uraian Risiko	Sebab Risiko	Dampak Risiko	Rencana Pengendalian Risiko
				- Lemahnya kemitraan dengan swasta		- Skema <i>public-private partnership</i> (PPP); - Akses pendanaan alternatif (<i>bond</i> , dana bergulir).
4	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	Banyak regulasi belum diperbarui	Tidak ada evaluasi regulasi berkala	Regulasi tumpang tindih yang menyebabkan kebijakan daerah tidak sinkron	Peninjauan regulasi berkala
			Proses penyusunan produk hukum lambat	Prosedur birokratis panjang	Keterlambatan adaptasi terhadap kebijakan baru	Reformasi proses legislasi (digitalisasi dan percepatan konsultasi publik)
5	Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Kebijakan tidak evidence-based	Minimnya data dan riset dalam perumusan kebijakan	Kebijakan tidak tepat sasaran dan berdampak rendah	- Penguatan riset dan analisis kebijakan; - Penggunaan <i>data-driven policy making</i> .
			Kapasitas penyusun kebijakan rendah	SDM minim keahlian dalam menganalisis kebijakan	Kualitas rancangan kebijakan buruk	- Mendorong dan memfasilitasi pelatihan teknis Kebijakan Publik; - Melaksanakan kerja sama dengan universitas, lembaga penelitian, atau <i>think tank</i> dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan daerah.
			Kebijakan tidak dievaluasi dan diperbaiki	Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi kebijakan	Kebijakan tidak tepat sasaran	Penerapan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan
6	Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja ≥ 0 %	Deviasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tinggi	- Lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; - Kurangnya perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;	Terhambatnya atau tidak tercapainya tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah	Penyusunan dan penerapan kebijakan/sistem monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



No	Sasaran Strategis	Indikator	Uraian Risiko	Sebab Risiko	Dampak Risiko	Rencana Pengendalian Risiko
				- Tidak Tersedianya jadwal monitoring dan evaluasi kinerja yang baku, baik internal Perangkat Daerah maupun lingkup Pemerintah Daerah.		
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Rendahnya kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pelatihan teknis dan pembinaan karier bagi JF PPBJ; - Kurangnya sertifikasi JF PPBJ; - Tidak adanya rencana pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi kurang sesuai; - Penurunan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan kompetensi JF PPBJ secara tahunan; - Mendorong dan memfasilitasi sertifikasi kompetensi PBJ bagi seluruh JF PPBJ; - Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan teknis JF PPBJ.
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	Tidak tercapainya target atau menurunnya nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelayanan (SP) dan SOP tidak terimplementasi secara konsisten di seluruh unit layanan Perangkat Daerah (PD); - Kompetensi dan perilaku (hospitality) aparatur di lini depan (frontline) belum merata; - Kualitas sarana prasarana fisik maupun digital (aplikasi layanan) belum optimal atau tidak ramah pengguna; - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) belum dikelola secara responsif oleh semua PD; - Rendahnya partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat; - Gagal mencapai target kinerja dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD); - Potensi munculnya keluhan massal atau citra negatif di media sosial dan media massa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan standardisasi dan digitalisasi proses bisnis layanan di seluruh PD; - Mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu portal/aplikasi terpadu (Jabar Super Apps); - Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik melalui aplikasi SKM jabar terintegrasi; - Melakukan Penilaian Mandiri Indeks Pelayanan Publik seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi SURABI; - Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan transparan melalui SP4N-LAPOR!; - Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil SKM, dan penilaian IPP Seluruh Perangkat



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



No	Sasaran Strategis	Indikator	Uraian Risiko	Sebab Risiko	Dampak Risiko	Rencana Pengendalian Risiko
				masyarakat dalam memberikan masukan atau survei kepuasan.		Daerah.
9	Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Rendahnya Nilai Evaluasi Kelembagaan yang mencerminkan struktur organisasi yang kaku, lambat, dan tidak adaptif.	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi masih bersifat hierarkis dan sektoral (ego sektoral); - Alur kerja dan proses pengambilan keputusan yang panjang dan birokratis; - Pendelegasian wewenang tidak berjalan efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemborosan sumber daya (anggaran, waktu, SDM) karena proses yang tidak efisien; - Lambatnya respons pemerintah dalam menghadapi isu strategis, krisis, atau kebutuhan masyarakat yang dinamis; - Program dan kegiatan tidak berjalan optimal karena koordinasi yang lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi kelembagaan secara berkala untuk memetakan struktur mana yang efisien dan mana yang tidak; - Mendorong pembentukan tim kerja lintas fungsi (<i>cross-functional teams</i>) untuk menangani isu strategis; - Melakukan pemetaan dan analisis proses bisnis (business process mapping) secara rutin; - Melakukan kajian penyesuaian struktur organisasi (SOTK) berdasarkan hasil evaluasi.
10	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Tidak tercapainya target persentase PD yang meraih predikat IRB Kategori A.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya komitmen dan pemahaman dari pimpinan PD mengenai substansi RB; - Pelaksanaan RB masih dianggap sebatas pemenuhan dokumen administratif (evidence), bukan perubahan nyata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gagal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel secara merata; - Mendapat catatan atau penilaian yang kurang memuaskan dari KemenPAN-RB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Internalisasi dan sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya RB oleh Sekda kepada seluruh Kepala PD; - Melakukan evaluasi mandiri (self-assessment) secara berkala oleh setiap PD; - Membangun SURABI yang memiliki dashboard monitoring kemajuan RB yang dapat dipantau secara real-time; - Memberikan asistensi khusus bagi PD yang progresnya lambat.
11	Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Rendahnya Nilai SAKIP pada dimensi pelaporan, yang menunjukkan laporan kinerja belum mampu menjelaskan keberhasilan/kegagalan secara akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> - Data capaian kinerja tidak akurat, tidak valid, atau tidak tersedia tepat waktu; - Laporan Kinerja (LKj) hanya bersifat deskriptif (menyajikan data) dan minim analisis mendalam tentang penyebab 	<ul style="list-style-type: none"> - Sulitnya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran terhadap hasil pembangunan yang dicapai; - Kebijakan dan perencanaan di tahun berikutnya tidak 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun aplikasi JAPATI (Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi) yang merupakan sistem manajemen data kinerja yang terintegrasi; - Memastikan adanya keselarasan (cascading) dari IKU Provinsi hingga ke level individu;



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



No	Sasaran Strategis	Indikator	Uraian Risiko	Sebab Risiko	Dampak Risiko	Rencana Pengendalian Risiko
				<ul style="list-style-type: none"> keberhasilan/kegagalan; Belum adanya hubungan sebab-akibat (causality) yang jelas antara program/kegiatan yang dilaksanakan dengan capaian kinerja; Kapasitas aparatur dalam menyusun laporan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). 	<ul style="list-style-type: none"> didasarkan pada bukti kinerja (evidence-based policy); Terjadinya alokasi anggaran pada program/kegiatan yang tidak efektif dan tidak berdampak; Mendapatkan Nilai SAKIP yang rendah dari KemenPAN-RB, yang berdampak pada citra Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reviu secara berjenjang dan periodik melalui aplikasi JAPATI; Memberikan feedback konstruktif dan meminta perbaikan atas laporan kinerja yang belum berkualitas; Menggunakan hasil evaluasi laporan kinerja sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun berikutnya.
12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan rendah / tidak mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> Data eviden dalam LPPD tidak disertai rincian atau bukti pendukung yang memadai, sehingga capaian sulit diverifikasi Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil EPPD tahun sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> Menurunya skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tidak terjadi perbaikan berkelanjutan sehingga skor kinerja stagnan atau menurun dari tahun ke tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan standar penyusunan eviden LPPD beserta lampiran data dukung Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil EPPD secara berkala



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Gambar 4.1. Kerangka Penjabaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

<p>SR1: Meningkatnya Proporsi Penduduk Jawa Barat yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi</p> <p>IK1: Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi</p> <p>Program Kesejahteraan Rakyat</p> <p>1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan Rp358.180.000.000,00</p> <p>Pelaksana: Biro Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>SR2: Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat</p> <p>IK2: Tingkat Inflasi</p> <p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan Rp6.349.242.540,00</p> <p>Pelaksana: Biro Perekonomian</p>	<p>SR3: Meningkatnya Kinerja BUMD</p> <p>IK3: % BUMD Sehat</p> <p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan Rp3.013.000.000,00</p> <p>Pelaksana: Biro BIA, Investasi, dan Adbang</p>
<p>SR4: Regulasi Daerah Adaptif</p> <p>IK4: Indeks Reformasi Hukum</p> <p>Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum</p> <p>2 Kegiatan 6 Sub Kegiatan Rp14.558.524.369,00</p> <p>Pelaksana: Biro Hukum dan HAM</p>	<p>SR5: Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan</p> <p>IK5: Nilai Kualitas Kebijakan Daerah</p> <p>1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2. Program Kesejahteraan Rakyat 3. Program Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>8 Kegiatan 18 Sub Kegiatan Rp512.519.541.936,00</p> <p>Pelaksana: 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2. Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Biro Perekonomian 4. Biro BIA, Investasi, dan Adbang</p>	<p>SR6: Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target</p> <p>IK6: % Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja \geq 0%</p> <p>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</p> <p>1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan Rp2.637.034.875,00</p> <p>Pelaksana: Biro BIA, Investasi, dan Adbang</p>
<p>SR7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>IK7: Indeks Tata Kelola Pengadaan</p> <p>Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3 Kegiatan 9 Sub Kegiatan Rp16.600.486.076,00</p> <p>Pelaksana: Biro Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>SR8: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat</p> <p>IK8: Indeks Pelayanan Publik</p> <p>Program Penataan Organisasi</p> <p>1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan Rp1.473.278.162,00</p> <p>Pelaksana: Biro Organisasi</p>	<p>SR9: Kelembagaan Agile</p> <p>IK9: Nilai Evaluasi Kelembagaan</p> <p>Program Penataan Organisasi</p> <p>2 Kegiatan 4 Sub Kegiatan Rp7.949.881.934,00</p> <p>Pelaksana: Biro Organisasi</p>
<p>SR10: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah</p> <p>IK10: % Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A</p> <p>Program Penataan Organisasi</p> <p>1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan Rp2.710.963.366,00</p> <p>Pelaksana: Biro Organisasi</p>	<p>SR11: Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan</p> <p>IK11: Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan</p> <p>Program Penataan Organisasi</p> <p>1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan Rp1.690.437.053,00</p> <p>Pelaksana: Biro Organisasi</p>	<p>SR12: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>IK21: Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</p> <p>3 Kegiatan 9 Sub Kegiatan Rp41.931.905.474,00</p> <p>Pelaksana: Biro Organisasi</p>
Ketercapaian sasaran strategis didukung oleh tata kelola yang berkualitas		
<p>Meningkatnya Kualitas Layanan Pimpinan</p> <p>% Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>3 Kegiatan 9 Sub Kegiatan Rp226.634.840.864,00</p> <p>Pelaksana: Biro Administrasi Pimpinan</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah</p> <p>Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>3 Kegiatan 9 Sub Kegiatan Rp2.414.922.821.954,00</p> <p>Pelaksana: Biro Umum</p>	<p>Meningkatnya Praktik Baik Lingkup Biro</p> <p>% Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>4 Kegiatan 9 Sub Kegiatan Rp230.335.100.870,00</p> <p>Pelaksana: semua biro</p>



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E1FA443D9A>



4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan

Perwujudan tujuan dan sasaran strategis pembangunan akan dicapai melalui pelaksanaan kinerja operasional yang dituangkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan. Ketercapaian kinerja operasional ini secara bertingkat akan mendukung ketercapaian *output*, *immediate outcome*, *intermediate outcome*, dan *ultimate outcome* yang akan berkontribusi terhadap ketercapaian *outcome* pembangunan sebagaimana diukur dalam target sasaran pembangunan. Pada akhirnya berkontribusi dalam memberikan *impact* kepada masyarakat. Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup urusan penunjang pemerintahan daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja *outcome* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penerapan penjabaran kinerja dalam struktur pada Setda diterjemahkan ke dalam lima jenjang yang ditempatkan pada level sekretaris daerah (*ultimate outcome*), asisten, kepala biro (*intermediate outcome/program*), bagian/jabatan fungsional madya (*immediate outcome/kegiatan*), dan jabatan fungsional muda/ketua tim (*output/sub kegiatan*). Penjabaran sesuai struktur ini kemudian diintegrasikan dalam tingkatan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Merujuk aturan tersebut, Setda memiliki delapan program yang terdiri dari tujuh program utama dan satu program pendukung, 29 kegiatan dan 93 sub kegiatan.

Kesuksesan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan direncanakan melalui pemanfaatan sumber daya. Penetapan alokasi sumber daya baik manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran



E1FA443D9A



didasarkan kepada indikasi aktivitas yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dalam menjamin ketercapaian target tujuan dan sasaran. Pengalokasian sumber daya manusia diperlihatkan dalam penjenjangan kinerja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang didukung oleh indikasi anggaran pada setiap level. Dari hasil evaluasi pemanfaatan anggaran dan indikasi rencana aksi yang diperlukan untuk lima tahun ke depan Setda mengindikasikan kebutuhan anggaran secara total dalam lima tahun sebesar Rp3.841.507.059.373,00. Selanjutnya untuk memastikan akuntabilitas kinerja, ketercapaian target dalam dokumen ini dipantau dalam aplikasi Japati.

Penjabaran operasional untuk ketercapaian SR1: 'Meningkatnya Proporsi Penduduk Jawa Barat yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi' adalah meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketercapaian target kinerja diperoleh melalui pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat dengan indikator 'persentase partisipasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang melanjutkan ke pendidikan tinggi'. Penciptaan kondisi ini akan dicapai melalui penyediaan dan implementasi kebijakan program afirmasi pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat jenius dan kurang mampu. Upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa kebijakan program afirmasi pendidikan tinggi dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat dengan didukung oleh data valid.

Penjabaran operasional untuk SR2: 'Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat' pada level program adalah memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi responsive terhadap isu peningkatan harga barang di masyarakat. Dengan demikian kebijakan dapat secara efektif mengendalikan inflasi. Ketercapaian target kinerja diperoleh melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator 'persentase kebijakan pengendalian inflasi yang diimplementasi'. Pihak yang melakukan implementasi kebijakan dalam hal ini adalah perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa kebijakan pengendalian inflasi dirumuskan secara tepat dengan didukung oleh data dan analisa yang mendalam.

Selanjutnya penjabaran operasional untuk SR3: 'Meningkatnya Kinerja BUMD' pada level program adalah meningkatkan kualitas tata kelola keuangan BUMD. Fokus pada tata kelola keuangan BUMD beranjak dari kinerja keuangan sebagai salah satu aspek yang mendukung Tingkat kesehatan BUMD. Selain itu penjabaran operasional yang berfokus kepada tata kelola keuangan BUMD sejalan dengan amanat RPJMN atas pengukuran *Return on Asset* (RoA) BUMD sehingga selaras dengan dengan pengukuran RoA BUMN pada PN7. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja operasional ini diukur dengan RoA BUMD dan



E1FA443D9A



dicapai melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan. Adapun upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa aset BUMD dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi yang akan menghasilkan rekomendasi yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BUMD melalui penetapan kebijakan daerah.

Selanjutnya penjabaran operasional untuk ketercapaian SR4: 'Regulasi yang Adaptif' adalah pemastian regulasi daerah Jawa Barat adaptif. Perwujudan kondisi tersebut untuk memastikan bahwa regulasi Jawa Barat dapat adaptif terhadap perubahan sehingga efektif sebagai solusi bagi permasalahan masyarakat. Ketercapaian target kinerja diperoleh melalui pelaksanaan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan indikator 'Indeks Reformasi Hukum'. Adapun upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah peningkatan kualitas harmonisasi kebijakan serta deregulasi daerah. Harmonisasi kebijakan mengarah kepada kesesuaian kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan pusat maupun kebijakan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan. Hal ini untuk mencegah adanya tumpang tindih kebijakan maupun kebijakan yang saling bertentangan. Sementara itu, deregulasi kebijakan mengarah kepada pembaharuan terhadap regulasi yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Disamping harmonisasi dan deregulasi kebijakan, terdapat pula indikator 'Indeks Kepatuhan Daerah' yang menjadi salah satu indikator pada level *immediate outcome*. Pengukuran indikator ini merujuk kepada amanat RPJPD Tahun 2025-2045 yang menjadikan indikator ini sebagai indikator *proxy* dari 'Indeks Pembangunan Hukum'. Secara umum, indikator ini digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan berkualitas baik, tepat sasaran, dapat diimplementasikan secara efektif, dan dengan demikian memiliki dampak terhadap masyarakat.

Penjabaran operasional untuk SR5: 'Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan' adalah peningkatan kualitas kebijakan khususnya yang disusun oleh Setda. Fokus kinerja diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan perumusan kebijakan untuk memastikan kebijakan disusun berbasis data, bukti, dan melibatkan *stakeholder* terkait. Fokus ke dua adalah pada kualitas evaluasi implementasi kebijakan untuk memastikan kebijakan diimplementasi secara tepat dan memiliki dampak sesuai yang diharapkan. Fokus ke dua ini merupakan pelaksanaan fungsi Setda dalam melakukan pengendalian implementasi kebijakan.

Ketercapaian target kinerja dilaksanakan melalui tiga program yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator 'Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi



E1FA443D9A



Daerah' serta 'Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah'. Kedua adalah Program Kesejahteraan Rakyat dengan indikator 'Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat' serta 'Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat'. Ketiga adalah Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator 'Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah', 'Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah', 'Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah' serta 'Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah'. Adapun upaya yang dilaksanakan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa kebijakan berbasis data, bukti, dan pelibatan *stakeholder* melalui salah satunya penyusunan naskah akademik serta laporan evaluasi dampak kebijakan.

Ketercapaian SR5 pada pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator 'Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah' terdapat amanat RPJMN yang dilaksanakan. PN2 pada SU5 yaitu 'Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan' dengan indikator 'Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global' menginginkan semua daerah untuk turut mendukung program peningkatan UMKM bersertifikasi halal. Untuk itu, sebagai bagian dari pengendalian regulasi ekonomi syariah Provinsi Jawa Barat dilakukan pengendalian terhadap pemastian jumlah produk bersertifikasi halal di Provinsi Jawa Barat. Untuk ketercapaian output ini, dilakukan koordinasi intensif dengan tiga unit kerja yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan disamping kolaborasi bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1. Target 'Jumlah Produk Tersertifikasi Halal'

Tahun	2026	2027	2028	2029
Target (produk)	880	949	969	968

Sumber: Biro Perekonomian, Agustus 2025

Kemudian, penjabaran operasional untuk ketercapaian SR6: 'Kinerja Perangkat Daerah mencapai Target' adalah pemastian bahwa kinerja perangkat daerah berjalan sesuai perencanaan. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator 'persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi akselerasi kinerja'. Adapun Upaya yang dilaksanakan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah pengendalian terhadap kinerja perangkat daerah untuk memastikan implementasi sesuai dengan rencana yang ditunjukkan melalui deviasi



E1FA443D9A



kinerja yang diperoleh setiap bulan. Pengendalian terhadap progres kinerja akan dilengkapi dengan rekomendasi terhadap akselerasi yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah dan diharapkan dalam mendorong pencapaian sasaran.

Kemudian penjabaran operasional untuk ketercapaian SR7: 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa' adalah meningkatkan kapabilitas tata kelola UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa). Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator 'Tingkat Kematangan UKPBJ'. Adapun upaya yang akan dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan antara lain adalah dengan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa terutama dalam pemanfaatan SPSE, meningkatkan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Penjabaran operasional untuk SR8: 'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat' adalah pemastian bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah memenuhi ekspektasi masyarakat. Target kinerja dicapai melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator 'persentase perangkat daerah provinsi dengan nilai IKM minimal Sangat Baik'. Upaya yang dilaksanakan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah memastikan bahwa perangkat daerah memenuhi standar pelayanan dan di dalamnya terdapat pemanfaatan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat yang terintegrasi sebagai salah satu akses partisipasi publik dalam peningkatan kualitas layanan. Selain itu juga memastikan bahwa perangkat daerah Provinsi Jawa Barat menerapkan hasil pembinaan pelayanan publik secara tepat yang akan berdampak kepada kepuasan pengguna layanan mereka.

Kemudian penjabaran operasional untuk SR9: 'Kelembagaan Agile' adalah pemastian bahwa kelembagaan Provinsi Jawa Barat tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Perwujudan kondisi ini untuk mendukung peningkatan efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator 'Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur' dan 'Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Proses'. Adapun upaya yang dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah penataan struktur organisasi, penataan proses bisnis, serta penyediaan jabatan yang dapat mendorong pembentukan organisasi berbasis kinerja.

Penjabaran operasional pada SR10: 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah' adalah meningkatkan kualitas tata kelola reformasi birokrasi. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan



E1FA443D9A



Program Penataan Organisasi dengan indikator ‘persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi’. Adapun upaya yang dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah memastikan perangkat daerah menerapkan kebijakan rekomendasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi. Disamping itu, fokus juga akan diarahkan kepada memastikan kebijakan budaya kerja diimplementasi secara efektif oleh perangkat daerah.

Pada SR11: ‘Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan’ dijabarkan secara operasional dengan memastikan pelaporan kinerja berkualitas dan bermanfaat. Selain itu, memastikan agar perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja terintegrasi. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator ‘Nilai Pemenuhan, Kualitas, dan Kebermanfaatan Pelaporan Kinerja’ serta ‘Persentase Tindak Lanjut LHE SAKIP dari KemenPANRB’. Adapun upaya yang dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah memastikan bahwa pelaporan kinerja baik milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun perangkat daerah memenuhi standar tujuh informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya SR12: ‘Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi’ dijabarkan kepada tujuh kinerja level operasional yaitu (1) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, (2) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, (3) meningkatkan kualitas dukungan teknis dan administratif dalam persiapan penataan daerah dan penataan desa, (4) meningkatkan efektivitas pelaksanaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), (5) meningkatkan efektivitas kerja sama daerah, (6) meningkatkan efektivitas kerja sama internasional, serta (7) meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan. Ketercapaian target dilakukan melalui pelaksanaan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator (1) persentase capaian indikator kinerja kunci (IKK) urusan pemerintahan daerah provinsi yang meningkat, (2) persentase kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami peningkatan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah’, (3) persentase dokumen persiapan penataan daerah dan penataan desa yang dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti’, (4) persentase rekomendasi kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP yang terimplementasi, (5) persentase kerja sama daerah yang efektif, (6) persentase kerja sama internasional yang efektif, serta (7) persentase layanan administrasi pemerintahan daerah yang sesuai standar.

Kinerja operasional ‘meningkatkan efektivitas kerja sama internasional’ dengan indikator ‘persentase kerja sama internasional yang efektif’



E1FA443D9A



selain merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas dan fungsi juga sebagai aplikasi dari amanat RPJMN. PN2 pada SU1: 'Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan' dengan indikator '*Asia Power Index (Diplomatic Influence)*' menginginkan adanya peran pemerintah daerah dalam perwujudannya. Maka, kinerja ini juga menjadi salah satu amanat IUP.

Untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas kinerja dalam pencapaian sasaran Renstra, ditetapkan pula kinerja pendukung. Sebagai pelaksanaan salah satu fungsi pelayanan internal ditetapkan sasaran 'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan' dengan indikator 'Persentase Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi'. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pada level kegiatan dan sub kegiatan upaya yang dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan rumah tangga pimpinan, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi pimpinan, serta meningkatkan kualitas layanan keprotokolan.

Fungsi pelayanan internal Setda yang ke dua dijabarkan dalam sasaran 'Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah'. Sasaran ini berfokus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas pada lingkup Setda dengan indikator 'Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah'. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi dan realisasi ketercapaian diperoleh melalui evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan demikian, Setda juga merupakan unit kerja yang harus melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi dan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi yang diberikan.

Unit kerja yang menjadi koordinator utama dalam pencapaian sasaran reformasi birokrasi internal Setda adalah Biro Umum dan didukung oleh kinerja internal delapan biro lain. Dengan itu, masing-masing biro memiliki sasaran kinerja internal yang tidak hanya mendorong peningkatan tata kelola lingkup biro itu sendiri namun juga berkontribusi terhadap perwujudan tata kelola Setda yang berkualitas. 'Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro' dengan indikator 'persentase capaian kinerja intervensi reformasi birokrasi Setda lingkup biro' merupakan sasaran yang ditetapkan dan diamanatkan untuk dicapai oleh seluruh biro. Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan tata kelola biro akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan tata kelola Setda sehingga kolaborasi, komunikasi, dan integrasi harus terus ditingkatkan.

Selanjutnya untuk rencana alokasi anggaran, rata-rata anggaran yang akan dibutuhkan setiap tahun adalah Rp640 miliar. Adapun komposisi antara anggaran teknis dan penunjang adalah 25,25% dan 74,76%.



E1FA443D9A



Jika dilihat dari total keseluruhan pagu, anggaran teknis sebesar Rp969.614.295.785,00 sementara anggaran penunjang termasuk fasilitasi pimpinan adalah sebesar Rp2.871.892.763.688,00.

Tabel 4.2. Pagu Anggaran Sekretariat Daerah per Sasaran Renstra

Total Pagu	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		757,529,597	569,975,460	590,170,279	615,591,499	641,201,328
Teknis	223,776,422	120,682,311	131,891,267	148,146,908	164,407,844	180,709,543
SR1	8,180,000	50,000,000	60,000,000	70,000,000	80,000,000	90,000,000
SR2	785,543	1,004,180	1,058,460	1,112,740	1,167,020	1,221,300
SR3	352,100	480,260	506,220	532,180	558,140	584,100
SR4	2,122,061	2,037,061	2,240,767	2,464,844	2,711,329	2,982,461
SR5	201,471,164	55,737,325	56,069,203	61,329,520	66,464,210	71,448,119
SR6	137,035	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
SR7	3,100,486	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
SR8	193,118	121,000	176,250	257,813	322,266	402,832
SR9	316,659	1,105,000	1,256,250	1,382,813	1,728,516	2,160,645
SR10	185,799	242,000	352,500	515,625	628,906	786,133
SR11	123,168	121,000	201,250	326,563	408,203	510,254
SR12	6,809,289	6,634,485	6,830,367	7,024,811	7,219,255	7,413,700
Penunjang	533,753,176	449,293,148	458,279,011	467,444,592	476,793,483	486,329,353

Pada anggaran teknis, alokasi terbesar akan diarahkan kepada ketercapaian target SR5 dengan indikator 'Nilai Kualitas Kebijakan Daerah' sebesar Rp512.519.541.936,00 atau sebanyak 52,86%. Hal ini, disamping bahwa sasaran ini didukung oleh empat biro namun juga bahwa sasaran tersebut merupakan gambaran *core* tugas dan fungsi Setda dalam merumuskan dan mengendalikan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Alokasi terbesar kedua diarahkan pada ketercapaian SR1 dengan indikator 'Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi'. Dari total anggaran teknis, biaya dialokasikan sebesar Rp358.180.000.000,00 atau 36,94%.

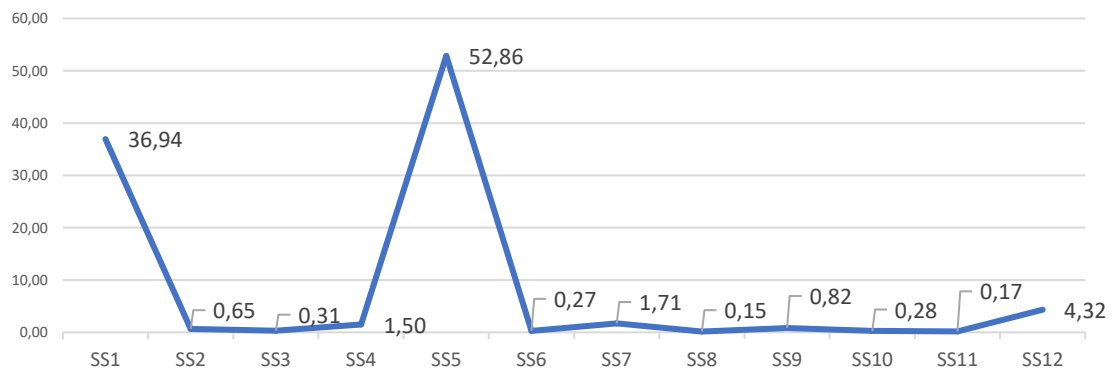
Sementara itu, alokasi anggaran SR2 yang merupakan pendukung terhadap IUP 'Tingkat Inflasi' dialokasikan sebesar Rp6.349.242.540,00 atau 0,65% dari total anggaran teknis. Anggaran pendukung IUP lainnya yaitu SR3 dengan indikator 'Persentase BUMD Sehat' yang ketercapaiannya didukung oleh RoA BUMD adalah sebesar Rp3.013.000.000,00 atau 0,31% dari pagu total anggaran teknis. Sementara itu alokasi anggaran untuk IUP lainnya yaitu 'Indeks Pelayanan Publik' yang menjadi indikator ketercapaian SR8 adalah sebesar Rp1.473.278.162,00 atau 0,15% dari total pagu anggaran teknis.



E1FA443D9A



Gambar 4.2. Komposisi Anggaran per Indikator Kinerja Utama dalam Enam Tahun (%)



Jika dilihat dari masing-masing biro, Biro Umum memiliki rencana alokasi terbesar untuk enam tahun ke depan yaitu sebesar Rp2.426.762.584.203,00 atau 63,17% dari total keseluruhan anggaran. Besarnya alokasi tersebut disebabkan oleh komposisi belanja yang tercakup di dalamnya, terutama belanja pegawai serta belanja pemeliharaan gedung dan sarana prasarana, baik untuk kebutuhan perkantoran maupun untuk mendukung pelayanan publik. Selain mencakup pemeliharaan gedung perkantoran seperti Gedung Sate dan kantor gubernur yang berlokasi di empat wilayah, alokasi anggaran Biro Umum juga digunakan untuk pemeliharaan sejumlah area layanan publik yang memerlukan dukungan berkelanjutan antara lain Masjid Al-Jabbar, Area Gasibu, Area Saparua, dan Area Monumen Perjuangan Jawa Barat. Rencana alokasi terbesar kedua ada pada Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu sebesar Rp908.250.916.825,00 atau 23,64% dari total pagu anggaran hingga tahun 2030. Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan unit yang menjadi koordinator utama dalam pencapaian SR1 yang merupakan IUP.

Tabel 4.3. Rencana Alokasi Anggaran per Biro (dalam Rp000)

Biro	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	8,169,608	8,795,459	9,081,369	9,367,996	9,655,356	9,943,463
Biro Hukum dan HAM	3,529,335	3,434,085	3,665,732	3,918,308	4,193,862	4,494,645
Biro Kesejahteraan Rakyat	217,009,694	112,166,688	122,178,896	137,323,190	152,347,043	167,225,405
Biro Perekonomian	4,726,411	5,483,078	5,718,714	5,955,064	6,192,142	6,429,962
Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	6,079,188	6,843,305	7,096,197	7,350,145	7,605,172	7,861,298
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4,733,656	4,802,872	4,844,930	4,887,829	4,931,585	4,976,217
Biro Organisasi	1,388,570	2,468,081	3,082,913	3,597,408	4,220,778	5,011,409
Biro Administrasi Pimpinan	52,458,754	47,943,262	48,902,128	49,880,170	50,877,773	51,895,329
Biro Umum	459,434,381	378,038,628	385,599,401	393,311,389	401,177,616	409,201,169
Total Pagu Indikatif	757,529,597	569,975,460	590,170,279	615,591,499	641,201,328	667,038,897



E1FA443D9A

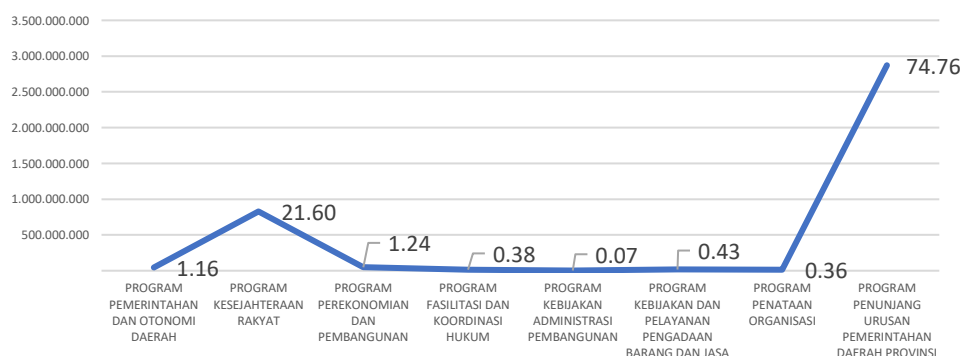


Apabila dilihat dari anggaran program, di antara tujuh program teknis, Program Kesejahteraan Rakyat merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar yaitu Rp829.585.233.325,00 atau 21,60% dari total keseluruhan anggaran. Angka ini memiliki gap yang cukup signifikan jika dibanding program-program lain, Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan dana hibah yang menjadi salah satu mekanisme pembiayaan dalam pencapaian sasaran kinerja yang diampu oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.

Alokasi anggaran untuk program-program lainnya rata-rata sebesar Rp23 miliar. Terbesar kedua adalah Program Perekonomian dan Pembangunan yang digunakan oleh Biro Perekonomian serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan sebesar Rp47.755.652.715,00 atau 1,25% dari seluruh total anggaran. Lalu sebesar 1,16% atau Rp44.652.803.910,00 merupakan rencana alokasi anggaran pada Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Selanjutnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program dengan rencana alokasi anggaran terbesar yaitu Rp2,871,892,763,688,00 atau 74,76% dari total seluruh pagu selama hingga tahun 2030. Program ini merupakan program yang digunakan oleh seluruh biro dalam membiayai pemenuhan kebutuhan internal biro dan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola di masing-masing biro. Di dalamnya pula terdapat anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitasi pimpinan sebesar Rp226.634.840.864,00 atau 7,89% dari seluruh pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini pun merupakan satu-satunya program yang digunakan oleh Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum. Sementara biro lain paling tidak memiliki dua program disamping program ini.

Gambar 4.3. Rencana Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah per Program



E1FA443D9A

Tabel 4.4. Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Kinerja, dan Indikasi Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030

Sasaran RPJMD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						8,169,608	8,795,459	9,081,369	9,367,996	9,655,356	9,943,463								
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General	Persen	86.44	86.45	8,169,608	86.47	8,795,459	86.50	9,081,369	86.54	9,367,996	86.59	9,655,356	86.65	9,943,463			
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	75.90	76.66	343,515	77.43	365,515	78.20	419,633	78.98	475,189	79.77	530,745	80.57	586,300	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	35.29	40.84	216,255	41.67	227,255	42.50	254,314	43.33	282,092	44.16	309,869	44.99	337,647	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Perencanaan Kebijakan Pemerintahan Berkualitas	Persentase Kebijakan Pemerintahan yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	N/A	100	216,255	100	227,255	100	254,314	100	282,092	100	309,869	100	337,647		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	3	3	216,255	3	227,255	3	254,314	3	282,092	3	309,869	3	337,647		
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	27.55	35.31	127,261	35.72	138,261	36.20	165,320	36.62	193,098	37.04	220,875	37.53	248,653	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Berkualitas	Persentase Kebijakan Pemerintahan yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	N/A	100	127,261	100	138,261	100	165,320	100	193,098	100	220,875	100	248,653		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	1	1	127,261	1	138,261	1	165,320	1	193,098	1	220,875	1	248,653		
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori	N/A	Tinggi	7,826,093	Tinggi	8,429,944	Tinggi	8,661,735	Tinggi	8,892,807	Tinggi	9,124,611	Tinggi	9,357,163	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Badan Usaha, Pemerintah dan Lembaga Internasional	Provinsi Jawa Barat
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Meningkatkan	Persen	37.72	42.11	695,716	46.49	706,716	50.88	733,775	55.26	761,553	59.65	789,330	64.04	817,108	Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Penerapan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	100	585,501	100	590,501	100	599,560	100	609,338	100	619,115	100	628,893		
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	2	2	585,501	2	590,501	2	599,560	2	609,338	2	619,115	2	628,893		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tertatanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Penataan Urusan Pemerintahan Provinsi yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	50,000	100	51,000	100	60,000	100	69,000	100	78,000	100	87,000		
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terselenggaranya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	50,000	1	51,000	1	60,000	1	69,000	1	78,000	1	87,000		
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Memenuhi Standar	Kategori Pencapaian SPM Provinsi Jawa Barat	Kategori	Tuntas Paripurna	Tuntas Paripurna	60,215	Tuntas Paripurna	65,215	Tuntas Paripurna	74,215	Tuntas Paripurna	83,215	Tuntas Paripurna	92,215	Tuntas Paripurna	101,215		
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	1	1	60,215	1	65,215	1	74,215	1	83,215	1	92,215	1	101,215		
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang Mengalami Peningkatan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	55.56	59.26	863,137	62.96	874,137	66.67	901,197	70.37	928,974	74.07	956,752	81.48	984,530	Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Penerapan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen	N/A	48.15	257,828	51.85	260,828	55.56	267,887	59.26	275,665	62.96	283,443	66.67	291,220		
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	1	1	257,828	1	260,828	1	267,887	1	275,665	1	283,443	1	291,220		
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Dukungan Pemerintah Provinsi dalam Penataan Urusan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Pemerintah Provinsi dalam Penataan Urusan Kabupaten/Kota Yang Dipertimbangkan Untuk Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	N/A	100	111,560	100	113,560	100	118,560	100	123,560	100	128,560	100	133,560		
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terselenggaranya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	111,560	1	113,560	1	118,560	1	123,560	1	128,560	1	133,560		
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Penerapan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Persen	N/A	100	443,750	100	447,750	100	457,750	100	467,750	100	477,750	100	487,750		
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terselenggaranya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	370,000	1	372,000	1	377,000	1	382,000	1	387,000	1	392,000		
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	1	73,750	1	75,750	1	80,750	1	85,750	1	90,750	1	95,750		
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Memenuhi Standar	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Pencapaian SPM Minimal Kategori "Tuntas Utama"	Persen	100	100	50,000	100	52,000	100	57,000	100	62,000	100	67,000	100	72,000		
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	1	1	50,000	1	52,000	1	57,000	1	62,000	1	67,000	1	72,000		
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dan Administratif dalam Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa yang Dipertimbangkan Untuk Ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	1,013,496	100	1,024,496	100	1,051,555	100	1,079,333	100	1,107,110	100	1,134,888	Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Persiapan Penataan Daerah	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	N/A	100	546,943	100	549,943	100	559,002	100	568,779	100	578,557	100	588,335		
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah	Terselenggaranya Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	Dokumen	1	1	546,943	1	549,943	1	559,002	1	568,779	1	578,557	1	588,335		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/V/E1FA443D9A>

Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kapasitas Daerah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru	Persentase Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru yang Meningkatkan Nilai Kapasitas Daerahnya	Persen	11.11	22.22	50,000	33.33	55,000	44.44	64,000	55.56	73,000	66.67	82,000	77.78	91,000		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Terselenggaranya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1	1	50,000	1	55,000	1	64,000	1	73,000	1	82,000	1	91,000		
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Persiapan Penataan Desa	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Desa yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	N/A	100	416,553	100	419,553	100	428,553	100	437,553	100	446,553	100	455,553		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Terselenggaranya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1	1	416,553	1	419,553	1	428,553	1	437,553	1	446,553	1	455,553		
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP yang Terimplementasi	Persen	N/A	N/A	100	11,690	100	49,749	100	69,749	100	89,749	100	109,749	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat	
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Meningkatnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP	Persen	N/A	N/A	100	11,690	100	49,749	100	69,749	100	89,749	100	109,749			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	1	N/A	1	11,690	1	49,749	1	69,749	1	89,749	1	109,749			
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang Efektif	Persen	N/A	45	872,727	50	883,727	55	910,786	60	938,564	65	955,365	70	994,120	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, DPRD Jabar, Badan Usaha	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerja Sama Dalam Negeri yang Terimplementasi	Persen	N/A	30	488,055	35	493,555	40	507,614	45	522,392	50	531,193	55	550,947		
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terselenggaranya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	6	6	488,055	6	493,555	6	507,614	6	522,392	6	531,193	6	550,947		
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Pihak Ketiga	Persentase Kerja Sama Pihak Ketiga yang Terimplementasi	Persen	N/A	30	384,672	35	390,172	40	403,172	45	416,172	50	424,172	55	443,172		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha / Swasta	Terselenggaranya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha / Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	26	27	384,672	28	390,172	29	403,172	30	416,172	31	424,172	32	443,172		
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Internasional	Persentase Kerja Sama Internasional yang Efektif*	Persen	N/A	45	2,498,789	50	2,514,322	55	2,528,293	60	2,572,404	65	2,607,936	70	2,643,515	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, DPRD Jabar, Badan Usaha, Pemerintah dan Lembaga Internasional	Provinsi Jawa Barat, Luar Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Internasional	Persentase Kerja Sama Internasional yang Terimplementasi	Persen	N/A	30	2,498,789	35	2,514,322	40	2,528,293	45	2,572,404	50	2,607,936	55	2,643,515		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	62	62	2,498,789	63	2,514,322	64	2,528,293	65	2,572,404	66	2,607,936	67	2,643,515		
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Sesuai Standar	Persen	N/A	100	865,424	100	619,397	100	655,012	100	674,234	100	713,012	100	729,790	Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, DPRD Jabar	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pelayanan Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan administrasi Kepala	Persen	100	100	663,607	100	417,580	100	426,945	100	431,917	100	442,195	100	446,973		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/W/E1FA443D9A>

Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi	
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai Standar	Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terlayani sesuai standar																	
	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terselenggaranya Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	1	1	663,607	1	417,580	1	426,945	1	431,917	1	442,195	1	446,973			
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penataan Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Persentase Usulan Penataan Batas Wilayah Administrasi yang ditangani sesuai Ketentuan	Persen	100	100	72,657	100	72,657	100	81,407	100	86,157	100	95,657	100	99,657			
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	1	72,657	1	72,657	1	81,407	1	86,157	1	95,657	1	99,657			
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Usulan Penamaan Rupabumi memenuhi Persyaratan	Persentase Usulan Penamaan Rupabumi yang Memenuhi Persyaratan	Persen	100	100	73,000	100	73,000	100	81,750	100	86,500	100	96,000	100	100,000			
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	1	73,000	1	73,000	1	81,750	1	86,500	1	96,000	1	100,000			
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Pelayanan penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase permohonan penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlayani sesuai standar	Persen	100	100	56,160	100	56,160	100	64,910	100	69,660	100	79,160	100	83,160			
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Terselenggaranya Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	1	1	56,160	1	56,160	1	64,910	1	69,660	1	79,160	1	83,160			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	N/A	100	1,016,804	100	1,795,459	100	1,831,369	100	1,867,996	100	1,905,356	100	1,943,463	Internal Biro	Kota Bandung	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	100	130,620	100	150,000	100	165,000	100	181,500	100	199,650	100	219,615			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor	Data	1	1	130,620	1	150,000	1	165,000	1	181,500	1	199,650	1	219,615			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dipenuhi	Persen	100	100	157,505	100	200,000	100	220,000	100	242,000	100	266,200	100	292,820			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4	142,405	4	150,000	4	165,000	4	181,500	4	199,650	4	219,615			
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	12	15,100	12	50,000	12	55,000	12	60,500	12	66,550	12	73,205			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Belanja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	87.72	88.42	723,680	89.12	1,345,459	89.82	1,336,369	90.52	1,323,496	91.22	1,306,406	91.92	1,284,618			
		Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Berkualitas	IKM Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	89.78	90.28		90.78		91.28		91.78		92.28		92.78				
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Biro	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang	Persen	42.90	50		51		52		53		54		55				



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi	
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Pemerintahan dan Otonomi Daerah	sesuai dengan Perencanaan Pengadaan																	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	45	48		49		51		53		55		57				
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	12	723,680	12	1,345,459	12	1,336,369	12	1,323,496	12	1,306,406	12	1,284,618			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	94,95	95,18	5,000	95,42	50,000	95,66	55,000	95,89	60,500	96,13	66,550	96,37	73,205			
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	1	1	5,000	1	50,000	1	55,000	1	60,500	1	66,550	1	73,205			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SPBE Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	N/A	-		68	50,000	75	55,000	82	60,500	90	66,550	100	73,205			
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	-		5	50,000	6	55,000	6	60,500	7	66,550	8	73,205			
BIRO HUKUM DAN HAM							3,529,335		3,434,085		3,665,732		3,918,308		4,193,862		4,494,645			
	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif	Persentase Capaian RB General	Persen	86,44	86,45	3,529,335	86,47	3,434,085	86,5	3,665,732	86,54	3,918,308	86,59	4,193,862	86,65	4,494,645			
		Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum*)	Poin	89,3	89,7	3,529,335	90,23	3,434,085	90,75	3,665,732	91,28	3,918,308	91,80	4,193,862	92,33	4,494,645	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, DPRD Jabar, Instansi Vertikal, LBH, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya Kualitas Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Deregulasi Kebijakan	Poin	20,2	20,4	506,545	20,61	466,545	20,81	513,200	21,02	564,520	21,23	620,972	21,44	683,069	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, DPRD Jabar, Instansi Vertikal, LBH, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	
		Meningkatnya Harmonisasi Regulasi Daerah	Nilai Harmonisasi Regulasi	Poin	24,1	24,22	1,615,516	24,34	1,570,516	24,46	1,727,567	24,59	1,900,324	24,71	2,090,357	24,83	2,299,392	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, DPRD Jabar, Instansi Vertikal, LBH, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Daerah Sesuai Standar	Indeks Kepatuhan Daerah*)	Poin	N/A	83,50	506,545	84,00	466,545	84,5	513,200	85,51	564,520	85,99	620,972	86,48	683,069			
		Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sesuai standar	Persentase Produk hukum Daerah yang sesuai standar	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100				
	Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Terfasilitasinya Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	N/A	30	506,545	30	466,545	30	513,200	30	564,520	30	620,972	30	683,069			
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Kualitas Layanan Kajian Hukum	Persentase Permohonan Kajian Hukum yang terlayani sesuai Standar	Persen	N/A	100	7,200	100	7,200	100	7,900	100	7,950	100	9,583	100	10,542			



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terfasilitasinya Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	N/A	800	7,200	800	7,200	800	7,900	800	7,950	800	9,583	800	10,542		
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya penyebaran layanan produk hukum dan informasi hukum kepada masyarakat	Persentase produk hukum dan informasi hukum yang disebarluaskan kepada masyarakat	Persen	N/A	100	193,237	100	193,237	100	203,237	100	228,237	100	253237200,00	100	308277584,52		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi hukum	Persentase anggota JDIH yang pengelolaan informasi hukumnya berkategori baik	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100			
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	Dokumen	N/A	120	193,237	120	193,237	120	203,237	120	228,237	120	253,237	120	308277584,52		
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kesesuaian produk hukum Kab/Kota dengan ketentuan PERUU	Persentase produk hukum daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	N/A	100	225,979	100	193237200,00	100	203,237	100	228,237	100	278237200,00	100	330142543,22		
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	N/A	500	225,979	500	193,237	500	203,237	500	228,237	500	278,237	500	330142543,22		
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara	Persentase Perkara yang Tertangani Sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	484,450	100	472191245,98	100	507,143	100	532,143	100	582142728,98	100	667752097,72		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	N/A	15	484,450	15	472191245,98	15	507142728,98	15	532142728,98	15	582142728,98	15	667752097,72		
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat	Persentase Desa/Kelurahan sadar hukum di Jawa Barat yang di bina	Persen	N/A	61,82	704,650	72	704,650	80	806,050	88	903,757	94	967,156	100	982,678		
		Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM (PS HAM) Terimplementasi secara Tepat oleh Perangkat Daerah	Persentase Rencana Aksi Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM (PS HAM) Terimplementasi oleh Perangkat Daerah	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100			
		Meningkatnya Kualitas Penanganan pengaduan dan Perlindungan Hukum	Persentase pengaduan dan perlindungan hukum yang ditangani sesuai ketentuan	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100			
		Meningkatnya layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Persentase permohonan bantuan hukum masyarakat miskin yang terlayani sesuai ketentuan	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	N/A	25	704,650	25	704,650	25	806,050	25	903,757	25	967,156	25	982,678		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Hukum dan HAM	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Hukum dan HAM	Persen	NA	100	1,407,273	100	1,397,024	100	1,424,965	100	1,453,464	100	1,482,533	100	1,512,184	Internal Biro	Kota Bandung
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	572,440	100	564,395	100	576,336	100	575,735	100	583,517	100	584,893		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	N/A	1	572,440	1	564,395	1	576,336	1	575,735	1	583,517	1	584,893		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	60	72,71		75,17	6,000	77,63	6,000	80,09	6,000	82,55	7,500	83,01	8,000		
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A	N/A		10	6,000	10	6,000	10	6,000	10	7,500	10	8,000		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/W/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	332,211	100	359,906	100	375,906	100	384,906	100	398,763	100	415,265		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	12	302,211	12	329,906	12	345,906	12	350,906	12	360,833	12	371,342		
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	5	30,000	5	30,000	5	30,000	5	34,000	5	37,930	5	43,923		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	N/A	99,55	502,623	99,56	465,423	99,57	465,423	99,58	485,423	99,59	490,478	99,6	501,426		
		Layanan Biro Berkualitas	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro	Poin	N/A	87,37		96,1		96,3		96,5		96,7		96,9			
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	N/A	81,33		83,13		84,93		86,73		88,53		90,33			
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	93,29	93,52		93,75		93,98		94,22		94,45		94,68			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	502,623	12	465,423	12	465,423	12	485,423	12	490,478	12	501,426		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Hukum dan HAM	Persen	-	-		68,22	1,300	75,06	1,300	82,59	1,400	90,88	2,275	100	2,600		
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	-		5	1,300	6	1,300	6	1,400	7	2,275	8	2,600		
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							217,009,694		112,166,688		122,178,896		137,323,190		152,347,043		167,225,405		
	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berawawasan	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berawawasan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun*)	Tahun	9.24	9.35	8,180,000	9.43	50,000,000	9.54	60,000,000	9.66	70,000,000	9.79	80,000,000	9.92	90,000,000		
		Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*)	Persen	8.81	9.64	8,180,000	9.75	50,000,000	9.86	60,000,000	9.97	70,000,000	10.08	80,000,000	10.2	90,000,000	Penduduk Jawa Barat Usia 15 s.d 64 Tahun	Provinsi Jawa Barat
	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi	Persentase Partisipasi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang melanjutkan ke pendidikan tinggi	Persen	8.81	9.64	8,180,000	9.75	50,000,000	9.86	60,000,000	9.97	70,000,000	10.08	80,000,000	10.2	90,000,000	Penduduk Jawa Barat Usia 15 s.d 64 Tahun	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Tinggi Diimplementasi	Persentase Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Tinggi yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	8,180,000	100	50,000,000	100	60,000,000	100	70,000,000	100	80,000,000	100	90,000,000		
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	3	3	8,180,000	3	50,000,000	3	60,000,000	3	70,000,000	3	80,000,000	3	90,000,000		
	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General	Persen	86.44	86.45	208,829,694	86.47	62,166,688	86.5	62,178,896	86.54	67,323,190	86.59	72,347,043	86.65	77,225,405		
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	75.90	76.66	195,509,639	77.43	49,456,250	78.20	49,414,250	78.98	54,299,251	79.77	59,058,625	80.57	63,667,219	Perangkat Daerah Provinsi, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat
	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Poin	35.43	35.69	194,297,453	35.95	47,464,034	36.22	47,222,812	36.48	51,888,669	36.74	56,406,985	37.00	60,750,415	Perangkat Daerah Provinsi,	Provinsi Jawa Barat



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

Sasaran RP/JMD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dalam Mendukung Pembangunan																Masyarakat Umum	
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Berkualitas	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	70	71.41	216,624	71.41	691,787	72.82	760,965	74.23	664,091	75.64	730,500	77.05	803,550		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	3	3	81,586	3	220,838	3	242,922	3	178,596	3	196,456	3	216,101		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	5	5	76,514	5	250,000	5	275,000	5	306,765	5	337,442	5	371,186		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	3	3	58,524	3	220,949	3	243,043	3	178,730	3	196,603	3	216,263		
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Berkualitas	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	70	71.41	146,828,779	71.41	25,352,247	72.82	22,899,847	74.23	22,958,979	75.64	24,584,325	77.05	28,585,843		
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	3	3	146,341,782	3	24,402,247	3	21,854,847	3	21,809,479	3	23,319,875	3	27,194,948		
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	5	5	235,808	5	500,000	5	550,000	5	605,000	5	665,500	5	732,050		
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	5	5	251,190	5	450,000	5	495,000	5	544,500	5	598,950	5	658,845		
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kebijakan Keagamaan Berkualitas	Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	70	71.41	47,252,050	71.41	21,420,000	72.82	23,562,000	74.23	28,265,600	75.64	31,092,160	77.05	31,361,022		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	15	3	30,842,635	3	15,780,000	3	17,358,000	3	19,093,800	3	21,003,180	3	23,103,498		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	9	3	16,409,416	3	5,640,000	3	6,204,000	3	9,171,800	3	10,088,980	3	8,257,524		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Poin	43.35	43.46	1,212,185	43.57	1,992,216	43.68	2,191,438	43.78	2,410,582	43.89	2,651,640	44.00	2,916,804	Perangkat Daerah Provinsi, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Terimplementasi secara Tepat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	70	71.41	308,812	71.41	440,000	72.82	484,000	74.23	532,400	75.64	585,640	77.05	644,204		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	3	3	109,013	3	120,000	3	132,000	3	145,200	3	159,720	3	175,692		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	5	5	108,075	5	200,000	5	220,000	5	242,000	5	266,200	5	292,820		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	3	3	91,725	3	120,000	3	132,000	3	145,200	3	159,720	3	175,692		
	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Terimplementasi secara Tepat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	70	71.41	481,141	71.41	972,216	72.82	1,069,438	74.23	1,176,382	75.64	1,294,020	77.05	1,423,422		
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	3	3	206,926	3	402,216	3	442,438	3	486,682	3	535,350	3	588,885		
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	5	5	166,442	5	250,000	5	275,000	5	302,500	5	332,750	5	366,025		
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	5	5	107,773	5	320,000	5	352,000	5	387,200	5	425,920	5	468,512		
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kebijakan Keagamaan Terimplementasi secara tepat	Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	70	71.41	422,233	71.41	580,000	72.82	638,000	74.23	701,800	75.64	771,980	77.05	849,178		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/V/E1FA443D9A>



Sasaran RPJMD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi	
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	15	3	221,303	3	220,000	3	242,000	3	266,200	3	292,820	3	322,102			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	9	3	200,930	3	360,000	3	396,000	3	435,600	3	479,160	3	527,076			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Persen	NA	100	13,320,055	100	12,710,438	100	12,764,646	100	13,023,939	100	13,288,418	100	13,558,187	Internal Biro	Kota Bandung	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	100	24,000	100	71,500	100	78,650	100	86,515	100	95,167	100	104,683			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	1	24,000	1	71,500	1	78,650	1	86,515	1	95,167	1	104,683			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi Umum	Persen	100	100	186,864	100	237,508	100	261,259	100	287,385	100	316,124	100	347,736			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	186,864	12	237,508	12	261,259	12	287,385	12	316,124	12	347,736			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	95.66	95.67	1,623,959	95.68	1,273,946	95.69	1,201,341	95.7	1,341,475	95.71	1,495,622	95.72	1,665,184			
		Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	Poin	77.6	77.667		77.734		77.801		77.868		77.935		78.002				
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	38.97	43.97		48.97		53.97		58.97		63.97		68.97				
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	57	57		57.3		57.6		57.9		58.2		58.5				
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1,623,959	12	1,273,946	12	1,201,341	12	1,341,475	12	1,495,622	12	1,665,184			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	91.62	92.07	514,705	92.53	362,482	92.99	452,910	93.45	532,044	93.91	598,349	94.36	650,125			
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	3	514,705	3	362,482	3	452,910	3	532,044	3	598,349	3	650,125			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Persen	N/A	-		68	54,850	75	60,335	82	66,369	90	73,005	100	80,306			
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	-		5	54,850	6	60,335	6	66,369	7	73,005	8	80,306			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Persen	100	100	10,970,527	100	10,710,152	100	10,710,152	100	10,710,152	100	10,710,152	100	10,710,152			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	12	12	10,970,527	12	10,710,152	12	10,710,152	12	10,710,152	12	10,710,152	12	10,710,152			
BIRO PEREKONOMIAN							4,726,511		5,483,078		5,718,714		5,955,064		6,192,142		6,429,962			
	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro	Tingkat Inflasi*)	Persen	N/A	3,3-3,8	785,543	1,5-3,5	1,004,180	1,5-3,5	1,058,460	1,5-3,5	1,112,740	1,5-3,5	1,167,020	1,5-3,5	1,221,300			
		Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi*)	Persen	N/A	3,3-3,8	785,543	1,5-3,5	1,004,180	1,5-3,5	1,058,460	1,5-3,5	1,112,740	1,5-3,5	1,167,020	1,5-3,5	1,221,300	Perangkat Daerah Provinsi, Tim TPID, Bank	Provinsi Jawa Barat	



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/W/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi	
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																			Indonesia, OJK, BPS, Pemda Kab/Kota, Masyarakat Umum	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kebijakan Pengendalian Inflasi Responsif terhadap Isu Peningkatan Harga Barang di Masyarakat	Persentase Kebijakan Pengendalian Inflasi yang dirumuskan	Persen	N/A	100	361,000	100	490,484	100	513,696	100	547,674	100	545,447	100	537,570	Perangkat Daerah Provinsi, Tim TPIID, Bank Indonesia, OJK, BPS, Pemda Kab/Kota, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi Mutakhir yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	100	424,543	100	513,696	100	544,764	100	565,066	100	621,573	100	683,730	Perangkat Daerah Provinsi, Tim TPIID, Bank Indonesia, OJK, BPS, Pemda Kab/Kota, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	
		Meningkatnya ketepatan perumusan rekomendasi pengendalian inflasi	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Dirumuskan Berbasis Data dan Bukti	Persen	N/A	100	361,000	100	490,484	100	513,696	100	547,674	100	545,447	100	537,570			
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Mutakhir	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Mutakhir	Persen	N/A	100	424,543	100	513,696	100	544,764	100	565,066	100	621,573	100	683,730			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	N/A	12	785,543	12	1,004,180	12	1,058,460	12	1,112,740	12	1,167,020	12	1,221,300			
	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi (RB General)	Persen	86,44	86,45	3,940,969	86,47	4,478,898	86,5	4,660,254	86,54	4,842,324	86,59	5,025,122	86,65	5,208,662			
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	75,90	76,66	1,339,843	77,43	2,695,080	78,20	2,840,760	78,98	2,986,440	79,77	3,132,120	80,57	3,277,800	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	Poin	43,94	44,1	669,922	44,2	2,053,500	44,3	1,453,385	44,4	1,520,328	44,5	1,584,396	44,6	1,645,304	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Perencanaan Kebijakan Sarana Perekonomian Berkualitas	Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	N/A	100	283,000	100	311,300	100	338,800	100	372,680	100	409,948	100	450,943			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	N/A	3	33,000	3	36,300	3	36,300	3	39,930	3	43,923	3	48,315			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	N/A	2	250,000	2	275,000	2	302,500	2	332,750	2	366,025	2	402,628			
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Perencanaan Kebijakan Sumber Daya Alam Berkualitas	Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	N/A	100	399,922	100	471,093	100	1,114,585	100	1,147,648	100	1,174,448	100	1,194,361			
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	N/A	3	359,922	3	395,914	3	1,032,910	3	1,057,805	3	1,075,622	3	1,085,652			



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

Sasaran RP/JMD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	N/A	1	30,000	1	33,000	1	36,300	1	39,930	1	43,923	1	48,315		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersedianya dukungan data, informasi, dan analisis yang akurat untuk penyusunan kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	N/A	1	10,000	1	42,180	1	45,375	1	49,913	1	54,904	1	60,394		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	Poin	40.6	43	669,922	45	641,580	47	1,387,375	49	1,466,113	50	1,547,724	51	1,632,496	Perangkat Daerah Provinsi, Penda Kab/Kota, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Sarana Perekonomian Berkualitas	Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	N/A	100	175,225	100	390,679	100	151,250	100	166,375	100	183,013	100	201,314		
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	N/A	2	85,580	2	145,910	2	90,750	2	99,825	2	109,808	2	120,788		
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	N/A	2	89,645	2	55,000	2	60,500	2	66,550	2	73,205	2	80,526		
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Berkualitas	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	N/A	100	185,961	100	374,330	100	1,236,125	100	1,299,738	100	1,364,711	100	1,431,182		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	N/A	3	143,981	3	158,379	3	1,100,000	3	1,150,000	3	1,200,000	3	1,250,000		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	N/A	2	21,980	2	131,592	2	90,750	2	99,825	2	109,808	2	120,788		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersedianya dukungan data, informasi, dan analisis yang akurat untuk penyusunan kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	N/A	1	10,000	1	42,180	1	45,375	1	49,913	1	54,904	1	60,394		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Perekonomian	Persen	N/A	100	2,601,126	100	1,783,818	100	1,819,494	100	1,855,884	100	1,893,002	100	1,930,862	Internal Biro	Kota Bandung
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	N/A	100	35,979	100	199,644	100	100,580	100	24,973	100	27,470	100	30,217		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	N/A	1	35,979	1	199,644	1	100,580	1	24,973	1	27,470	1	30,217		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi Umum	Persen	N/A	100	123,979	100	96,188	100	155,807	100	116,387	100	128,026	100	140,829		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	N/A	4	123,979	4	96,188	4	155,807	4	116,387	4	128,026	4	140,829		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	N/A	90	1,504,554	90.01	958,521	90.02	1,054,373	90.03	1,159,810	90.04	1,097,914	90.05	1,045,359		
		Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro Perekonomian	Poin	N/A	95.2		95.25		95.3		95.35		95.4		95.45			
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Biro	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	93.41	93.64		93.87		94.11		94.34		94.57		94.81			
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	67	67		69		71		73		75		77			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	12	1,504,554	12	958,521	12	1,054,373	12	1,159,810	12	1,097,914	12	1,045,359		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SPBE Biro Perekonomian	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Perekonomian	Persen	N/A	-		68	191,906	75	64,190	82	15,609	90	17,170	100	18,887		
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	-		5	191,906	6	64,190	6	15,609	7	17,170	8	18,887		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya layanan jasa penunjang biro perekonomian	Persentase Layanan Jasa penunjang biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	936,614	100	337,559	100	444,545	100	539,105	100	622,422	100	695,571		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	12	936,614	12	337,559	12	444,545	12	539,105	12	622,422	12	695,571		
BIRO BUMD, INVESTASI, DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						6,079,188	6,843,305	7,096,197	7,350,145	7,605,172	7,861,298								
	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	2.1420	1.4440	352,100	1.475	480,260	1.500	506,220	1.529	532,180	1.560	558,140	1.585	584,100		
		Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	Persen	N/A	78.37	352,100	81.08	480,260	83.78	506,220	86.48	532,180	89.18	558,140	91.89	584,100	BUMD Jabar	Provinsi Jawa Barat
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan BUMD	RoA BUMD Jabar*)	Persen	N/A	1.62	352,100	1.72	480,260	1.83	506,220	1.95	532,180	2.07	558,140	2.2	584,100	BUMD Jabar	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Aset BUMD dimanfaatkan secara optimal	Persentase BUMD yang Memiliki Aset Produktif	Persen	N/A	51.35	352,100	54.05	480,260	56.76	506,220	59.46	532,180	62.16	558,140	64.86	584,100		
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	N/A	1	92,900	1	186,882	1	196,984	1	207,086	1	217,188	1	227,289		
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Dokumen	N/A	1	259,200	1	293,378	1	309,236	1	325,094	1	340,952	1	356,811		
	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif	Persentase Capaian RB General	Persen	86.44	86.45	5,727,088	86.47	6,363,045	86.50	6,589,977	86.54	6,817,965	86.59	7,047,032	86.65	7,277,198		
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	75.90	76.66	4,278,167	77.43	3,220,480	78.20	3,394,560	78.98	3,568,640	79.77	3,742,720	80.57	3,916,800	Perangkat Daerah Provinsi, BUMD Jabar	Provinsi Jawa Barat
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah	Poin	39.44	40.36	1,711,267	41.29	1,288,340	42.22	1,357,980	43.14	1,427,620	44.07	1,497,260	45	1,566,900	Perangkat Daerah Provinsi, BUMD Jabar	Provinsi Jawa Barat



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/E1FA443D9A>

Sasaran RPJMD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Perencanaan Kebijakan BUMD dan BLUD Berkualitas	Persentase Kebijakan BUMD dan BLUD yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	NA	100	1,407,078	100	713,275	100	751,830	100	790,386	100	828,941	100	867,497		
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	3	3	402,692	3	277,339	3	292,330	3	307,321	3	322,313	3	337,304		
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Dokumen	3	3	926,716	3	301,810	3	318,124	3	334,438	3	350,752	3	367,066		
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	1	1	77,669	1	134,126	1	141,376	1	148,626	1	155,876	1	163,126		
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Perencanaan Kebijakan Investasi Berkualitas	Persentase Kebijakan Investasi yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	NA	100	304,189	100	575,065	100	606,150	100	637,234	100	668,319	100	699,403		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	2	2	304,189	2	575,065	2	606,150	2	637,234	2	668,319	2	699,403		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah	Poin	38.72	39.54	2,566,900	40.47	1,932,140	41.40	2,036,580	42.32	2,141,020	43.25	2,245,460	44.18	2,349,900	Perangkat Daerah Provinsi, BUMD Jabar	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan BUMD dan BLUD Berkualitas	Persentase Kebijakan BUMD, Investasi dan BLUD yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	NA	90	2,110,616	91	1,069,708	92.50	1,127,530	94	1,185,352	95.5	1,243,174	97	1,300,996		
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	4	4	604,039	4	415,929	4	438,411	4	460,894	4	483,377	4	505,859		
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Dokumen	4	4	1,390,074	4	452,629	4	477,095	4	501,561	4	526,028	4	550,494		
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	3	3	116,504	3	201,150	3	212,023	3	222,896	3	233,769	3	244,642		
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Investasi Berkualitas	Persentase Kebijakan Investasi yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	NA	90	456,284	91	862,432	92.50	909,050	94	955,668	95.5	1,002,286	97	1,048,904		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	3	3	456,284	3	862,432	3	909,050	3	955,668	3	1,002,286	3	1,048,904		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RPJMD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja -> 0%	Persen	63.04	63.28	137,035	63.51	500,000	63.75	500,000	63.98	500,000	64.22	500,000	64.45	500,000	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Progres kinerja perangkat Daerah sesuai Perencanaan	Persentase Perangkat Daerah yang memindaklanjuti Rekomendasi akselerasi Kinerja	Persen	NA	100	137,035	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Instansi Vertikal	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pengendalian Kinerja Program Pembangunan	Persentase Rekomendasi Akselerasi Kinerja Program Pembangunan yang Mutakhir	Persen	NA	100	137,035	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000		
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	4	4	137,035	4	500,000	4	500,000	4	500,000	4	500,000	4	500,000		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Persen	NA	100	1,311,886	100	2,642,565	100	2,695,417	100	2,749,325	100	2,804,312	100	2,860,398	Internal Biro	Kota Bandung
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	100	4,600	100	4,600	100	4,600	100	4,600	100	4,600	100	4,600		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang telah dikumpulkan dan di periksa lingkup Biro BUMD, Investasi dan Adminitrasi Pembangunan	Data	N/A	10	4,600	10	4,600	10	4,600	10	4,600	10	4,600	10	4,600		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang dipenuhi	Persen	100	100	228,327	100	276,551	100	276,551	100	276,551	100	276,551	100	276,551		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	175,106	12	182,598	12	182,598	12	182,598	12	182,598	12	182,598		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	4	53,221	4	93,953	4	93,953	4	93,953	4	93,953	4	93,953		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	Persen	90.51	90.81	388,596	91.11	1,667,801	91.41	1,719,943	91.71	1,772,986	92.01	1,826,918	92.31	1,881,719		
		Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro	Poin	88.95	89.94		90.74		91.35		91.77		92		92.04			
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	61	63.13		65.34		67.63		70		72.46		75			
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	91.62	92.07		92.53		92.99		93.45		93.91		94.36			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	388,596	12	1,667,801	12	1,719,943	12	1,772,986	12	1,826,918	12	1,881,719		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SPBE Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Persen	N/A	-		68	3,250	75	3,960	82	4,825	90	5,880	100	7,164		
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	-		5	3,250	6	3,960	6	4,825	7	5,880	8	7,164		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Persen	100	100	690,363	100	690,363	100	690,363	100	690,363	100	690,363	100	690,363		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Laporan	2	2	21,680	2	21,680	2	21,680	2	21,680	2	21,680	2	21,680		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	668,683	12	668,683	12	668,683	12	668,683	12	668,683	12	668,683		
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							4,733,656		4,802,872		4,844,930		4,887,829		4,931,585		4,976,217		
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif		Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General	Persen	86.44	86.45	4,733,656	86.47	4,802,872	86.5	4,844,930	86.54	4,887,829	86.59	4,931,585	86.65	4,976,217		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	90.29	90.3	4,733,656	90.31	4,802,872	90.32	4,844,930	90.33	4,887,829	90.34	4,931,585	90.35	4,976,217	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola UKPBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3	3	3,100,486	3	2,700,000	3	2,700,000	3	2,700,000	3	2,700,000	3	2,700,000	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Penyedia Barang/Jasa	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kapasitas SDM PBJ	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	21.05	22.84	354,884	23,04	308,000	23,24	308,000	23,44	308,000	23,64	308,000	23,84	308,000		
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	96	128	163,577	128	100,000	128	100,000	128	100,000	128	100,000	128	100,000		
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Permasalahan Barang dan Jasa yang Diselesaikan	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	12	126,591	12	108,000	12	108,000	12	108,000	12	108,000	12	108,000		
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Kematangan UKPBJ Dimensi Kelembagaan	Level	3	3		3		3		3		3		3			
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	12	64,716	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	100,000	12	100,000		
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	807,467	100	621,000	100	621,000	100	621,000	100	621,000	100	621,000		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	135,517	12	108,000	12	108,000	12	108,000	12	108,000	12	108,000		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	302,089	12	243,000	12	243,000	12	243,000	12	243,000	12	243,000		
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan PBJ	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	29.24	29.25		29,26		29,27		29,28		29,29		29,3			
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	369,862	12	270,000	12	270,000	12	270,000	12	270,000	12	270,000		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/W/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi	
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sesuai Standar	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Sesuai Standar	Persen	100	100	1,938,135	100	1,771,000	100	1,771,000	100	1,771,000	100	1,771,000	100	1,771,000			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	12	12	234,660	12	250,000	12	250,000	12	250,000	12	250,000	12	250,000			
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	1,451,436	12	1,300,000	12	1,300,000	12	1,300,000	12	1,300,000	12	1,300,000			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	252,039	12	221,000	12	221,000	12	221,000	12	221,000	12	221,000			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	NA	100	1,633,170	100	2,102,872	100	2,144,930	100	2,187,829	100	2,231,585	100	2,276,217	Internal Biro	Kota Bandung	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100	2,236	100	13,908	100	13,908	100	13,908	100	13,908	100	13,908			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	NA	1	2,236	1	13,908	1	13,908	1	13,908	1	13,908	1	13,908			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	69	69,79	122,500	69,79	200,000	70,83	200,000	70,83	200,000	72,92	200,000	72,92	200,000			
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	58	24	122,500	24	200,000	24	200,000	24	200,000	24	200,000	24	200,000			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	100	100	1,109,245	100	1,468,964	100	1,511,022	100	1,553,921	100	1,597,677	100	1,642,309			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	152,369	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000			
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	43,458	1	63,086	1	63,086	1	63,086	1	63,086	1	63,086			
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	83,25	90		90,01		90,02		90,03		90,04		90,05				
		Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro PBJ	Poin	96,86	90		90,01		90,02		90,03		90,04		90,05				
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	89,87	100		100		100		100		100		100				
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	88,86	89,74		90,63		91,52		92,41		93,3		94,19				
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	913,418	12	1,242,786	12	1,284,844	12	1,327,742	12	1,371,499	12	1,416,131			
		Meningkatnya Implementasi SPBE Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	N/A	-		68		75		82		90		100				
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	Dokumen	N/A	-		5	13,092	6	13,092	6	13,092	7	13,092	8	13,092			



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RP/JMD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Persen	100	100	399,189	100	420,000	100	420,000	100	420,000	100	420,000	100	420,000		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	399,189	12	420,000	12	420,000	12	420,000	12	420,000	12	420,000		
BIRO ORGANISASI							1,388,570		2,468,081		3,082,913		3,597,408		4,220,778		5,011,409		
	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General	Persen	86.44	86.45	1,388,570	86.47	2,468,081	86.5	3,082,913	86.54	3,597,408	86.59	4,220,778	86.65	5,011,409		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik*)	Poin	4.76	4.76	193,118	4.77	121,000	4.77	176,250	4.78	257,813	4.78	322,266	4.79	402,832	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat
	Program Penataan Organisasi	Pelayanan Publik Perangkat Daerah Memenuhi Ekspektasi Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai IKM Minimal SANGAT BAIK	Persen	84.21	86.84	193,118	89.47	121,000	92.11	176,250	94.74	257,813	97.37	322,266	100	402,832	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Standar Pelayanan	Persen	100	100	193,118	100	121,000	100	176,250	100	257,813	100	322,266	100	402,832		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	193,118	1	121,000	1	176,250	1	257,813	1	322,266	1	402,832		
		Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Poin	68.45	68.45	316,659	73.093	1,105,000	73.093	1,256,250	73.093	1,382,813	79.598	1,728,516	79.598	2,160,645	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat
	Program Penataan Organisasi	Kelembagaan Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur	Poin	37.378	37.378	223,169	38.271	984,000	38.271	1,080,000	38.271	1,125,000	41.518	1,406,250	41.518	1,757,813	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Struktur dan Tupoksi sesuai dengan Ketentuan Pedoman Penataan Kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah dengan Struktur dan Tupoksi yang sesuai dengan Ketentuan Pedoman Penataan Kelembagaan	Persen	84.21	84.21	75,324	84.21	190,000	84.21	267,000	84.21	415,000	100	490,000	100	650,723		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	75,324	1	190,000	1	267,000	1	415,000	1	490,000	1	650,723		
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jabatan sesuai Kebutuhan	Persentase Jabatan yang Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Persen	100	100	55,338	100	604,000	100	552,000	100	385,000	100	467,750	100	590,000		
	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	47	1	55,338	1	604,000	1	552,000	1	385,000	1	467,750	1	590,000		
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Meningkatnya kualitas pelayanan penataan Kelembagaan Kabupaten/kota	Persentase usulan kelembagaan Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	92,507	100	190,000	100	261,000	100	325,000	100	448,500	100	517,090		
	Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	27	1	92,507	1	190,000	1	261,000	1	325,000	1	448,500	1	517,090		
	Program Penataan Organisasi	Organisasi Tepat Proses	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Proses	Poin	31.071	31.071	93,490	34.821	121,000	34.821	176,250	34.821	257,813	38.080	322,266	38.080	402,832	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Peta Proses Bisnis Sesuai Kebutuhan Kinerja dan Mendorong Terbentuknya Organisasi Berbasis Kinerja	Persentase Proses Bisnis yang Sesuai Ketentuan Arsitektur SPBE	Persen	13.16	21.05	83,651	31.58	96,800	52.63	140,180	65.79	201,980	78.95	244,640	100	291,000		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	1	1	83,651	1	96,800	1	140,180	1	201,980	1	244,640	1	291,000		
		Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Tata Laksana	Persentase Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang Patuh terhadap Kebijakan Tata Laksana	Persen	100	100	9,839	100	24,200	100	36,070	100	55,833	100	77,626	100	111,832		
		Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	1	1	9,839	1	24,200	1	36,070	1	55,833	1	77,626	1	111,832		
		Meningkatnya Praktek Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Persen	87	89	185,799	92	242,000	95	352,500	97	515,625	100	628,906	100	786,133	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat
	Program Penataan Organisasi	Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi	Persen	100	100	185,799	100	242,000	100	352,500	100	515,625	100	628,906	100	786,133	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Diterapkan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Persen	100	100	116,533	100	121,000	100	176,250	100	257,813	100	337,926	100	436,133		
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	116,533	1	121,000	1	177,149	1	263,140	1	337,926	1	436,133		
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas tata kelola budaya kerja	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja	Persen	100	100	69,267	100	121,000	100	176,250	100	257,813	100	290,980	100	350,000		
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	38	38	69,267	38	121,000	38	175,351	38	252,485	38	290,980	38	350,000		
		Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Poin	13.55	13.58	123,168	13.61	121,000	13.65	201,250	13.68	326,563	13.71	408,203	13.74	510,254	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat
	Program Penataan Organisasi	Pelaporan Kinerja Berkualitas dan Bermanfaat	Nilai Pemenuhan, Kualitas, dan Kebermanfaatan Pelaporan Kinerja	Poin	13.55	13.58	36,950	13.61	36,300	13.65	70,375	13.68	125,469	13.71	156,836	13.74	196,045	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pelaporan Kinerja Memenuhi Standar 7 Informasi	Persentase LKIP Pemda dan Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar 7 Informasi	Persen	100	100	36,950	100	36,300	100	70,375	100	125,469	100	156,836	100	196,045		
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	38	38	36,950	38	36,300	38	70,375	38	125,469	38	156,836	38	196,045		
	Program Penataan Organisasi	Meningkatnya kualitas tatakelola SAKIP	Persentase Tindak Lanjut LHE SAKIP dari KemenPANRB	Persen	100	100	86,217	100	84,700	100	130,875	100	201,094	100	251,367	100	314,209	Perangkat Daerah Provinsi, Pemda Kab/Kota	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terintegrasinya Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase komponen SAKIP yang terintegrasi	Persen	100	100	86,217	100	84,700	100	130,875	100	201,094	100	251,367	100	314,209		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RPJMD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	38	38	86,217	38	84,700	38	130,875	38	201,094	38	251,367	38	314,209		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Organisasi	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Organisasi	Persen	N/A	100	569,826	100	879,081	100	1,096,663	100	1,114,596	100	1,132,888	100	1,151,545	Internal Biro	Kota Bandung
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	100	2,100	100	2,000	100	2,500	100	3,125	100	3,906	100	3,786		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	1	2,100	1	2,000	1	2,500	1	3,125	1	3,906	1	3,786		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	100	100	54,634	100	25,900	100	32,375	100	40,469	100	50,586	100	49,032		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	48,634	12	20,900	12	26,125	12	32,656	12	40,820	12	39,566		
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	6,000	12	5,000	12	6,250	12	7,813	12	9,766	12	9,466		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	N/A	97	472,652	97	527,971	97	657,775	97	665,986	97	647,126	97	686,853		
		Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro	Poin	92.17	92.2		92.23		92.26		92.29		92.32		92.35			
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	92.33	92.79		93.25		93.71		94.17		94.63		95.09			
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	53	56		58		61		64		67		70			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	472,652	12	527,971	12	657,775	12	665,986	12	647,126	12	686,853		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Organisasi	Persen	N/A	62	40,440	68	323,210	75	404,013	82	405,016	90	431,270	100	411,875		
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	5	40,440	5	323,210	6	404,013	6	405,016	7	431,270	8	411,875		
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							52,458,754		47,943,262		48,902,128		49,880,170		50,877,773		51,895,329		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan	Persentase Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi	Persen	N/A	100	41,223,383	100	35,628,368	100	36,340,935	100	37,067,754	100	37,809,109	100	38,565,291	Gubernur, Wakil Gubernur	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretaris Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	100	100	23,648,351	100	19,076,982	100	19,255,124	100	19,436,829	100	19,622,168	100	19,811,213		
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	N/A	12	16,864,650	12	12,262,258	12	12,351,329	12	12,442,181	12	12,534,851	12	12,629,373		
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	N/A	12	6,783,701	12	6,814,724	12	6,903,795	12	6,994,648	12	7,087,317	12	7,181,840		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/V/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Informasi dan Komunikasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	100	100	10,724,255	100	10,343,730	100	10,610,942	100	10,883,499	100	11,161,508	100	11,445,076		
	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	N/A	12	2,374,409	12	3,161,173	12	3,250,244	12	3,341,096	12	3,433,766	12	3,528,288		
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	N/A	12	3,678,494	12	2,551,839	12	2,640,910	12	2,731,762	12	2,824,432	12	2,918,954		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	N/A	12	4,671,352	12	4,630,718	12	4,719,789	12	4,810,641	12	4,903,310	12	4,997,833		
	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan	Persentase Layanan Keprotokolan yang Dipenuhi	Persen	100	100	6,850,778	100	6,207,656	100	6,474,869	100	6,747,426	100	7,025,434	100	7,309,002		
	Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	N/A	12	2,268,433	12	1,531,000	12	1,620,071	12	1,710,923	12	1,803,593	12	1,898,115		
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah	Laporan	N/A	12	2,638,569	12	1,969,354	12	2,058,425	12	2,149,277	12	2,241,946	12	2,336,469		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	N/A	12	1,943,776	12	2,707,302	12	2,796,373	12	2,887,225	12	2,979,895	12	3,074,418		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Persen	N/A	100	11,235,371	100	12,314,894	100	12,561,192	100	12,812,416	100	13,068,664	100	13,330,038	Internal Biro	Kota Bandung
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	100	26,800	100	39,239	100	80,289	100	122,159	100	164,867	100	208,430		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor	Data	N/A	4	26,800	4	39,239	4	80,289	4	122,159	4	164,867	4	208,430		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	100	100	734,466	100	456,716	100	538,816	100	622,557	100	707,973	100	795,098		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3	493,246	5	335,632	5	376,681	5	418,552	5	461,260	5	504,822		
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	2	241,220	3	121,085	3	162,135	3	204,005	3	246,713	3	290,275		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	N/A	95	1,869,899	95.1	2,766,173	95.2	2,807,222	95.3	2,849,093	95.4	2,891,801	95.5	2,935,363		
		Layanan Biro Berkualitas	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro	Poin	96.03	92		92.1		92.2		92.3		92.4		92.5			
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	95.91	96.14		96.38		96.62		96.86		97.1		97.34			
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	58	60		61		62		63		64		65			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1,869,899	12	2,766,173	12	2,807,222	12	2,849,093	12	2,891,801	12	2,935,363		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Persen	N/A	-		68	448,560	75	489,609	82	531,480	90	574,188	100	617,750		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RP/JMD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	-		5	448,560	6	489,609	6	531,480	7	574,188	8	617,750		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Persen	N/A	100	8,604,206	100	8,604,206	100	8,645,256	100	8,687,127	100	8,729,835	100	8,773,397		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	12	8,604,206	12	8,604,206	12	8,645,256	12	8,687,127	12	8,729,835	12	8,773,397		
BIRO UMUM							459,434,381		378,038,628		385,599,401		393,311,389		401,177,616		409,201,169		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Poin	82.66	82.7	459,430,209	83.4	375,764,320	84.1	383,279,607	84.8	390,945,199	85.5	398,764,103	86.2	406,739,385	Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Biro pada Setda, Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Vertikal, Masyarakat Umum	Provinsi Jawa Barat
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SETDA	Nilai SAKIP Setda	Poin	86.3	86.8	293,271	87.3	975,000	87.8	994,500	88.3	1,014,390	88.8	1,034,678	89.3	1,055,371		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	11	7	124,176	7	350,000	7	357,000	7	364,140	7	371,423	7	378,851		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	3	11,747	3	225,000	3	229,500	3	234,090	3	238,772	3	243,547		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	N/A	1	3,327	1	225,000	1	229,500	1	234,090	1	238,772	1	243,547		
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	18	154,021	18	175,000	18	178,500	18	182,070	18	185,711	18	189,426		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Lingkup Setda	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setda	Poin	91.64	91.81	776,161	91.98	850,000	92.15	867,000	92.32	884,340	92.49	902,027	92.66	920,067		
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	187,643	12	250,000	12	255,000	12	260,100	12	265,302	12	270,608		
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Latihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	500	500	588,518	500	600,000	500	612,000	500	624,240	500	636,725	500	649,459		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Kearsipan Sekretariat Daerah Efektif dan Efisien	Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)	Poin	95.19	95.5	600,373	95.75	675,000	95.97	688,500	96.15	702,270	96.3	716,315	96.5	730,642		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	600,373	12	675,000	12	688,500	12	702,270	12	716,315	12	730,642		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	Poin	N/A	85.2	193,625,381	85.7	218,488,866	86.2	222,858,643	86.7	227,315,816	87.2	231,862,132	87.7	236,499,375		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	750	750	193,276,427	750	217,388,866	750	221,736,643	750	226,171,376	750	230,694,804	750	235,308,700		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	12	3	189,940	3	275,000	3	280,500	3	286,110	3	291,832	3	297,669		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	3	26,916	3	275,000	3	280,500	3	286,110	3	291,832	3	297,669		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	14,242	1	275,000	1	280,500	1	286,110	1	291,832	1	297,669		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	16	16	117,855	16	275,000	16	280,500	16	286,110	16	291,832	16	297,669		
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	Persen	100	100	31,015,627	100	31,015,627	100	31,635,940	100	32,268,659	100	32,914,032	100	33,572,312		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2,215,627	2	2,215,627	2	2,259,940	2	2,305,139	2	2,351,241	2	2,398,266		
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	28,800,000	2	28,800,000	2	29,376,000	2	29,963,520	2	30,562,790	2	31,174,046		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Tertib Administrasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi	Persen	N/A	100	456,189	100	450,000	100	459,000	100	468,180	100	477,544	100	487,094		
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	456,189	12	450,000	12	459,000	12	468,180	12	477,544	12	487,094		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Kerumahahtangaan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kerumahahtangaan Sekretariat Daerah	Poin	N/A	85.2	20,800,538	85.7	10,535,216	86.2	10,745,920	86.7	10,960,839	87.2	11,180,056	87.7	11,403,657		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	4	969,764	4	850,000	4	867,000	4	884,340	4	902,027	4	920,067		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	75	25	7,873,339	25	200,000	25	204,000	25	208,080	25	212,242	25	216,486		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	9,291,611	12	8,955,079	12	9,134,181	12	9,316,865	12	9,503,202	12	9,693,266		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	15	841,646	15	530,137	15	540,740	15	551,554	15	562,585	15	573,837		
		Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1,824,179	0											
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Ketatausahaan Sekretariat Daerah	Poin	N/A	-		85.7	100,000	86.2	102,000	86.7	104,040	87.2	106,121	87.7	108,243		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	N/A		12	100,000	12	102,000	12	104,040	12	106,121	12	108,243		



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RP/JMD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi	
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Memadai	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Persen	N/A	100	26,667,320	100	12,383,410	100	6,974,785	100	7,114,280	100	7,256,566	100	7,401,697			
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	5	2,162,111	0		0		0		0		0				
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	5	7,891,448	5	3,838,024	5	3,914,785	5	3,993,080	5	4,072,942	5	4,154,401			
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12	16,613,760	12	3,000,000	12	3,060,000	12	3,121,200	12	3,183,624	12	3,247,296			
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							9	5,545,386											
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Pelayanan Kebersihan. Keamanan. Air. Listrik. Front Office. Driver. dan komunikasi terpenuhi	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan. Keamanan. Air. Listrik. Front Office. Driver. dan komunikasi terpenuhi	Persen	N/A	100	87,558,976	100	77,259,594	100	78,804,786	100	80,380,882	100	81,988,499	100	83,628,269			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	5,629,192	12	4,855,272	12	4,952,377	12	5,051,425	12	5,152,453	12	5,255,502			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	81,929,784	12	72,404,322	12	73,852,409	12	75,329,457	12	76,836,046	12	78,372,767			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Berfungsi	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	N/A	100	85,814,885	100	21,931,607	100	28,026,533	100	28,587,063	100	29,158,805	100	29,741,981			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Terbayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1000	500	10,604,760	500	11,000,000	500	11,220,000	500	11,444,400	500	11,673,288	500	11,906,754			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	20	57,632,810	20	7,000,000	20	12,796,294	20	13,052,220	20	13,313,264	20	13,579,529			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	23	23	17,577,315	23	3,931,607	23	4,010,239	23	4,090,444	23	4,172,253	23	4,255,698			
	Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	N/A	100	11,821,488	100	1,100,000	100	1,122,000	100	1,144,440	100	1,167,329	100	1,190,675			
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paket	12	12	11,821,488	12	1,100,000	12	1,122,000	12	1,144,440	12	1,167,329	12	1,190,675			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Umum	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Umum	Persen	N/A	100	4,172	100	2,274,308	100	2,319,794	100	2,366,190	100	2,413,514	100	2,461,784	Internal Biro	Kota Bandung	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai ketentuan	Persen	100	100	4,172	100	225,000	100	229,500	100	234,090	100	238,772	100	243,547			



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



Sasaran RP/MD yang Relevan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/ Sasaran Program / Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kelompok Sasaran	Lokasi
						2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	1	4,172	2	225,000	2	229,500	2	234,090	2	238,772	2	243,547		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Biro	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	N/A	100		100	1,999,308	100	2,039,294	100	2,080,080	100	2,121,682	100	2,164,115		
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	40	40.45		41.01		41.57		42.13		42.7		43.26			
		Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	87.56	87.6		87.9		88.2		88.5		88.8		89.1			
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	92.58	93.04		93.5		93.96		94.43		94.89		95.35			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		12	1,999,308	12	2,039,294	12	2,080,080	12	2,121,682	12	2,164,115		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Umum	Persen	N/A	-		68	50,000	75	51,000	82	52,020	90	53,060	100	54,122		
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	-		5	50,000	6	51,000	6	52,020	7	53,060	8	54,122		

*) Indikator Utama Pembangunan (IUP)



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



4.2. Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki program prioritas pembangunan daerah yaitu program-program yang memiliki dampak besar, menyentuh kepentingan publik, dan seringkali bersifat lintas urusan. Program prioritas pembangunan daerah memiliki tujuan dalam mendukung pencapaian visi dan misi secara lebih cepat. Kinerja Setda mendukung ketercapaian tiga program prioritas pembangunan Jawa Barat dari tiga misi.

Pada Misi 1 terdapat Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi yang didukung oleh Program Kesejahteraan Rakyat dengan sasaran 'Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu' dan dilaksanakan secara operasional satu sub kegiatan. Pada Misi 2 terdapat Program Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD yang didukung oleh Program Perekonomian dan Pembangunan dengan sasaran 'Kebijakan Pengendalian Inflasi Responsif terhadap Peningkatan Harga Barang di Masyarakat' dan 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan BUMD' dan dilaksanakan secara operasional kepada tiga sub kegiatan. Sedangkan pada Misi 4 terdapat program prioritas pembangunan Penguatan *Good Governance* serta Kerja Sama Daerah dan Internasional, didukung oleh enam program yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Program Penataan Organisasi.



E1FA443D9A



Tabel 4.5. Dukungan Program Sekretariat Daerah terhadap Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM UNGGULAN/STRATEGIS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cagur Bageur, Bener, Pinter dan Singer	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Modal Manusia	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun	Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi	LENGGAH KATILU: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.	Jawa Barat memiliki SDM potensial yang berilmu dan beradab serta berdaya saing tinggi pada seluruh lapangan kerja potensial yang ada	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Biro Kesejahteraan Rakyat
Misi 2 Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Tingkat Inflasi 2. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Program Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	Laju Inflasi Jawa Barat dapat ditekan dibawah rata-rata nasional dan cenderung stabil	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Biro Perekonomian Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	
Misi 4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan	Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian RB General	Program Transformasi Birokrasi berbasis Digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerja sama Daerah dan Internasional	LENGGAH KASALAPAN: Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.	Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan di Jawa Barat yang sesuai dengan Prinsip	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum dan HAM



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id//E1FA443D9A>

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM UNGGULAN/STRATEGIS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance						Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), serta memiliki daya saing yang semakin kuat	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Biro Kesejahteraan Rakyat



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM UNGGULAN/STRATEGIS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
							Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Biro Perekonomian



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM UNGGULAN/STRATEGIS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
							Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi
							Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
							Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM UNGGULAN/STRATEGIS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	dan Otonomi Daerah



E1FA443D9A



4.3. Target Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain sebagai alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, IKK juga dapat digunakan untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, menjadi dasar dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EKPPD), dan mendukung penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). Dengan demikian, IKK digunakan dalam penyusunan LPPD, pelaksanaan EKPPD, monitoring capaian kinerja daerah, serta sinkronisasi kinerja pusat dan daerah.

Merujuk kepada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pernah dilaksanakan kepada Setda, IKK yang dinilai berkaitan dengan kinerja pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, target IKK sebagai target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Setda merupakan kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun outcome yang digunakan masih merujuk kepada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 sebagaimana terurai dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.6. Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	32,71	32,73	32,75	32,77	32,79
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	61,37	61,47	61,57	61,67	61,77
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Persen	13,62	13,65	13,68	13,71	13,74



E1FA443D9A



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ini disusun untuk meningkatkan kinerja Setda sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam kerangka pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang telah disusun dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian harus menjadi komitmen bersama bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Setda Provinsi Jawa Barat. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat sesuai target kinerja sasaran yang akan dicapai.

Di dalam Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ini dimuat 12 sasaran strategis yang pencapaiannya diukur melalui 12 indikator kinerja utama. Kinerja ini dijabarkan secara operasional kepada delapan program, 29 kegiatan, dan 93 sub kegiatan. Untuk mendukung ketercapaian kinerja indikasi anggaran yang dibutuhkan selama lima tahun ke depan adalah sebesar Rp3.841.507.059.373,00. Dokumen ini juga telah menetapkan target kinerja dan indikasi kegiatan serta anggaran hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan kinerja dalam mendukung visi Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Setda Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang



E1FA443D9A



selanjutnya akan menjadi bukti pencapaian kinerja. Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ini juga harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing biro. Semua biro juga diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan secara bertanggung jawab yang berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat diwujudkan.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Setda Provinsi Jawa Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Setda Provinsi Jawa Barat ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setda Provinsi Jawa Barat.

Setda Provinsi Jawa Barat termasuk setiap unit kerja di dalamnya, sesuai struktur perangkat daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan kegiatan yang ada di dalam Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kab/Kota, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 Setda dijabarkan dengan berorientasi pada komitmen dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kinerja Setda dijabarkan ke dalam 12 sasaran Renstra, yaitu: meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan tinggi, terkendalinya stabilitas harga daerah Jawa Barat, meningkatnya kinerja BUMD, regulasi daerah adaptif, meningkatnya efektivitas dukungan kebijakan terhadap pembangunan, kelembagaan *agile*, meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah, pelaporan kinerja pemda berdampak pada akselerasi kinerja pembangunan, kinerja perangkat daerah mencapai target, meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah



E1FA443D9A



provinsi, meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik Jawa Barat.

Seluruh Biro di bawah lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai dokumen ini dengan sebaik baiknya serta berkewajiban untuk menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada dokumen Renstra ini serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Selanjutnya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Setda Tahun 2025-2029, dilakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi termasuk diantaranya pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra perangkat daerah. Pengendalian pelaksanaan Renstra Setda yang mencakup indikator kinerja Setda, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Setda. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra Setda. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Setda, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Setda telah dilaksanakan melalui Renja Setda.

Sekretaris Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Setda dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Setda kepada gubernur melalui kepala Bappeda. Kebijakan serta target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra Setda akan dievaluasi tahunan melalui LKIP, pada pertengahan (Tahun 2027) dan pada akhir periode 5 tahun (Tahun 2029) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun demikian evaluasi, revisi dan koreksi tetap diperlukan serta harus menjadi perhatian agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat segera direalisasikan. Masih terdapat kelemahan di beberapa sisi dalam kesamaan persepsi di seluruh biro dalam hal konsep perencanaan, akan tetapi tidak mengurangi semangat dari tim penyusun dalam hal perbaikan kedepannya. Kepada semua pihak yang terlibat dan



E1FA443D9A



memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja kerasnya.



E1FA443D9A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>





RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
2025-2029



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1FA443D9A>

E1FA443D9A